PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA BUMN PERIODE 2011 - 2015

FINNI AMALIA
8215132779

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017

THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE TO THE CORPORATE PERFORMANCE ON STATE-OWNED ENTREPRISE (SOE) PERIOD 2011 - 2015

FINNI AMALIA
8215132779

Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Economics Accomplishment

STUDY PROGRAM OF MANAGEMENT
FACULTY OF ECONOMICS
STATE UNIVERSUTY OF JAKARTA
2017

ABSTRAK

Finni Amalia, 2017; Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada BUMN Periode 2011 – 2015. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Keuangan, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan pada BUMN periode 2011 - 2015. Mekanisme *Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Komisaris Independen, Remunerasi, Ukuran Komite Audit, dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit. Sedangkan Kinerja Perusahaan diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang dikhususkan untuk tujuan tertentu dan dengan pertimbangan mendapatkan sampel yang representative. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisarsi Independen, Remunerasi, dan Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan Frekuensi Pertemuan Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Perusahaan. Selanjutnya peneliti melakukan *robustness check* terhadap hasil untuk mengetahui ketahanan estimasi regresi penelitian. Hasil menunjukkan Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Komisaris Independen, Remunerasi, dan Ukuran Komite Audit memiliki hasil *robust*. Sedangkan Frekuensi Pertemuan Komite Audit memiliki hasil tidak *robust*

Kata kunci: Kinerja Perusahaan, Corporate Governance.

ABSTRACT

Finni Amalia, 2017; *The Effect of Corporate Governance to the Corporate Performance on State-Owned Enterprises (SOE) Period 2011 - 2015. Thesis, Jakarta: Concentration in Finance, Study Program of Management, Faculty of Economic, State University of Jakarta.*

The aim of this study is to determine the effect of Corporate Governance to the Corporate Performance on State-Owned Enterprises (SOE) Period 2011 – 2015. This study use Size of Board Director, Size of Independent Commisioner, Remmuneration, Size of Audit Committee, and Frequency of Audit Committee Meeting as a mechanism of Corporate Governance. While Corporate Performance is proxied by Return on Asset (ROA). The sampling method of this study is purposive sampling. The research model in this study employs panel data analysis with Fixed Effect Model approach. The empirical result shows that Size of Board Director, Size of Independent Commisioner, Remmuneration and Size of Audit Committee have unsignificantly influences to Corporate Performance. Whrereas, Frequency of Audit Committee Meeting has negative and significant influence to Corporate Performance. Furthermore, researcher did the robustness check on the results to determine the resilience of research regression estimation. The results show that Size of Board of Directors, Size of Independent Commissioner, Remuneration, and Size of Audit Committee have robust result. Whereas Frequency of Audit Committee Meeting has result not robust.

Keyword: Corporate Performance, Corporate Governance.

.

LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Dedi Purwana, ES., M.Bus

NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Dr. Dewi Susita, M.Si NIP. 19610506 198603 2 001	Ketua	.....	18/07/17
2. Destria Kurnianti, S.E., M.Sc NIP. 882610016	Sekretaris	.....	18/07/17
3. Dr. Suherman, M.Si NIP. 19731116 200604 1 001	Penguji Ahli	.....	13/07/17
4. Dr. Gatot Nazir Ahmad, S.Si.,M.Si NIP. 1972056 200604 1 002	Pembimbing I	.....	18/07/17
5. Dra. Umi Mardiyati, M.Si NIP. 19570221 198503 2 002	Pembimbing II	.....	20/07/17

Tanggal Lulus 16 Juni 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta, maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupapencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Juni 2017

Yang membuat pernyataan

Finni Amalia

No. Reg. 8215132779

KATA PENGANTAR

Terima kasih kepada Allah SWT karena atas izin dan limpahan rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan pada BUMN periode 2011 – 2015" dengan lancer. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Mama dan Papa sebagai sumber motivasi dan semangat, yang tiada hentinya selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, nasihat, dan kekuatan kepada penulis.
2. Dr. Gatot Nazir Ahmad S.Si., M.Si, selaku dosen pembimbing 1 sekaligus Ketua Program Studi S1 Manajemen, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Dra. Umi Mardiyati, M.Si selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing, memberikan motivasi, serta nasihat kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
4. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
5. Dr. Dewi Susita, M.Si sebagai ketua sidang dalam sidang skripsi yang memberikan masukan dan penyempurnaan skripsi ini.
6. Dr. Suherman, M.Si sebagai penguji ahli dalam sidang skripsi yang memberikan masukan dan penyempurnaan skripsi ini.
7. Destria Kurnianti, S.E., M.Sc sebagai sekretaris dalam sidang skripsi yang memberikan masukan dan penyempurnaan skripsi ini

8. Seluruh dosen Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta atas seluruh ilmu pengetahuan dan pengalaman selama penulis menempuh pendidikan.
9. Fennia dan Rafie yang selalu menjadi penghibur, dan selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis.
10. Firda dan Kak Krisna yang selalu mendampingi di saat-saat penting dan membutuhkan, yang selalu setia mendengarkan keluh kesah selama penulisan skripsi, yang selalu memberikan semangat dan motivasi. Terima kasih atas segala perhatian yang telah diberikan kepada penulis.
11. Assya, Habibah, Heshi, Putsar, Nada, Fikri, Tatag, Faisal K., Faisal Y., Fajar, Kevin, Ammar, Gusde, Erix, yang selalu menjadi teman susah dan senang dari awal perkuliahan hingga saat ini. Akan merindukan momen ketika berorganisasi bareng kalian dari mulai susahnya sampai senangnya. Akan merindukan momen belajar bareng kalau mau ulangan dan begadang bareng karena ngerjain tugas. Akan merindukan momen jalan-jalan bareng sama kalian dan membicarakan hal-hal gapenting bareng kalian. Terima kasih telah mengisi masa-masa perkuliahan penulis termasuk selama penulis menyelesaikan skripsi dengan banyak cerita indah. Semoga pertemanan kita sampai Jannah-Nya. *See you on top, Guys!*
12. Senior-senior di manajemen keuangan, Kak Yose dan Kak Ali, terima kasih atas segala bantuan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi.

13. Teman-teman kelasku Manajemen B 2013 dan teman-teman manajemen 2013 lainnya yang telah menjadi teman seperjuangan dari masa pengenalan akademik hingga saat ini.
14. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan dalam skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan isnpirasi bagi penelitian berikutnya. Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran demi perbaikan tulisan ini di masa yang mendatang. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **iii**
ABSTRACT ..... **iv**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **v**
PERNYATAAN ORISINALITAS..... **vi**
KATA PENGANTAR..... **vii**
DAFTAR ISI..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN..... **1**
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Tujuan Penelitian 14
D. Manfaat Penelitian 15
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS **16**
A. Kajian Pustaka..... 16
1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)..... 16
2. Teori Keagenan *(Agency Theory)*..... 17
3. *Corporate Governance*..... 23
a. Pengertian *Corporate Governance* 23
b. Prinsip-prinsip *Corporate Governance*..... 26
c. Penerapan *Corporate Governance* pada Perusahaan di Indonesia..... 32
4. Indikator *Corporate Governance*..... 35
a. Ukuran Dewan Direksi..... 35
b. Ukuran Dewan Komisaris Independen..... 40
c. Remunerasi..... 43
d. Ukuran Komite Audit..... 45
e. Frekuensi Pertemuan Komite Audit..... 49
5. Kinerja Perusahaan..... 52
a. *Return on Asset* (ROA)..... 54
b. *Return on Equity* (ROE)..... 55
c. *Net Profit Margin*..... 55
B. Penelitian Terdahulu..... 56
C. Kerangka Penelitian..... 69
D. Hipotesis..... 76

BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... 77
A. Objek dan Ruang Lingkup Pekerjaan 77
B. Metode Penelitian..... 77
C. Operasionalisasi Variabel Penelitian..... 78
1. Variabel Terikat..... 78
2. Variabel Bebas..... 79
D. Metode Penentuan Populasi dan Sampel 82
1. Populasi..... 82
2. Sampel..... 83
E. Prosedur Pengumpulan Data..... 84
1. Pengumpulan Data Sekunder..... 84
2. Penelitian Kepustakaan..... 84
F. Metode Analisis..... 86
1. Statistik Deskriptif..... 86
2. Analisis Regresi Linear Berganda..... 86
3. Model Estimasi Data Panel..... 87
a. *Common Effect Model*..... 88
b. *Fixed Effect Model*..... 89
c. *Random Effect Model*..... 91
4. Pendekatan Model Estimasi..... 92
a. Uji Chow..... 92
b. Uji Hausman..... 92
5. Uji Asumsi Klasik..... 93
6. Uji Hipotesis..... 95
a. Pengujian Parsial..... 96
b. Koefisien Determinasi..... 96
BAB IV PEMBAHASAN..... 98
A. Statistik Deskriptif 98
B. Uji Asumsi Klasik..... 103
1. Uji Multikolinearitas..... 103
C. Hasil Uji Regresi Panel..... 104
1. *Chow Test*..... 104
2. *Hausman Test*..... 107
D. Hasil Uji Regresi dan Pembahasan..... 110
E. Hail Uji Hipotesis..... 115
1. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan..... 116
2. Pengaruh Ukuran Dewan Komisrais Independen Terhadap Kinerja Perushaan 118
3. Pengaruh Remunerasi Terhadap Kinerja Perusahaan 121

4. Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan 123
5. Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan 125
6. Koefisien Determinasi 128

BAB V KESIMPULAN 129

A. Kesimpulan 129
B. Implikasi 131
C. Saran 131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	66
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel Penelitian	82
Tabel III.2	Proses Pemilihan Sampel	84
Tabel III.3	Sampel Penelitian Perusahaan BUMN	85
Tabel IV.1	Statistik Deskriptif	98
Tabel IV.2	Hasil Uji Multikolinearitas	103
Tabel IV.3	Hasil Uji Chow Perusahaan BUMN	105
Tabel IV.4	Hasil Uji Chow Perusahaan BUMN Publik	106
Tabel IV.5	Hasil Uji Chow Perusahaan BUMN Non-Publik	106
Tabel IV.6	Hasil Uji Hausman Perusahaan BUMN	108
Tabel IV.7	Hasil Uji Hausman Perusahaan BUMN Publik	109
Tabel IV.8	Hasil Uji Hausman Perusahaan BUMN Non-Publik	109
Tabel IV.9	Hasil Uji Regresi Data Panel Perusahaan BUMN	111
Tabel IV.10	Hasil Uji Regresi Data Panel Perusahaan BUMN Publik	113
Tabel IV.11	Hasil Uji Regresi Data Panel Perusahaan BUMN Non-Publik	114
Tabel IV.12	Rekapitulasi Hasil Uji t	116

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar II.1	Kerangka Penelitian	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Sampel Perusahaan BUMN
Lampiran 2	Hasil Uji Statistik Deskriptif Perusahaan BUMN
Lampiran 3	Hasil Uji Multikolinearitas Perusahaan BUMN
Lampiran 4	Hasil Uji Chow Perusahaan BUMN
Lampiran 5	Hasil Uji Chow Perusahaan BUMN Publik
Lampiran 6	Hasil Uji Chow Perusahaan BUMN Non-Publik
Lampiran 7	Hasil Uji Hausman Perusahaan BUMN
Lampiran 8	Hasil Uji Hausman Perusahaan BUMN Publik
Lampiran 9	Hasil Uji Hausman Perusahaan BUMN Non-Publik
Lampiran 10	Hasil Uji Regresi Data Panel Perusahaan BUMN
Lampiran 11	Hasil Uji Regresi Data Panel Perusahaan BUMN Publik
Lampiran 12	Hasil Uji Regresi Data Panel Perusahaan BUMN Non-Publik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep *corporate governance* saat ini bukan lagi menjadi instrumen baru bagi manajemen korporasi. *Corporate Governance* adalah topik yang cukup modis untuk dibicarakan saat ini. Konsep ini sangat penting bagi perusahaan karena memiliki fungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *stakeholders* pada umumnya, serta para *shareholders* khususnya. Konsep *corporate governance* ini semakin sering digaungkan bukan semata karena adanya kesadaran akan pentingnya konsep ini untuk keberlangsungan perusahaan, melainkan dilatarbelakangi oleh adanya kasus-kasus skandal keuangan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar yang sempat menjadi perhatian dunia, seperti Enron, Tyco, Wordlcom, Global Crossing[1] yang melibatkan akuntan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, berita jatuhnya Lehman Brothers, Washington Mutual, General Motors, CIT Group, MF Global Holdings Ltd[2], di Amerika Serikat yang menjadi pukulan berat bagi perekonomian negara yang dikenal dengan sebutan Paman Sam

---

[1] Cornett M.M *et al., Earning Management, Corporate Governance, and True Financial Performance,* 2006.

[2] Martsila, Ika Surya dan Wahyu Meiranto. "Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.2, No.4, 2013.

tersebut, serta HIH Insurance Company Ltd, dan One Pty Ltd di Australia, lalu Parmalat di Italia, menambah deretan gagalnya manajemen korporasi dalam mengelola perusahaan-perusahaan tersebut. Kejadian tersebut membuktikan bahwa belum adanya penerapan konsep *corporate governance* yang baik dan benar sehingga dianggap menjadi pemicu utama kebangkrutan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar dan krisis yang terjadi diberbagai belahan dunia. Konsep *corporate governance* menjadi bukti bahwa setiap perusahaan harus melakukan pemisahan fungsi dengan baik dan benar, yaitu antara fungsi kepemilikan yang berada di tangan pemilik, dan fungsi pengelolaan yang dilaksanakan oleh manajer.

Di Indonesia sendiri, konsep *corporate governance* mulai diperkenalkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia melalui pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) bekerja sama dengan *International Monetary Fund* (IMF) pada tahun 1999 dalam rangka *economy recovery* pasca krisis. Namun sampai saat ini, penerapan *corporate governance* di Indonesia dapat dikatakan masih terbilang lemah. Hasil survei dari *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) menunjukkan Indonesia berada pada peringkat terendah setelah China dan Korea[3]. Lemahnya implementasi sistem *corporate governance* merupakan salah satu penentu yang dapat memicu permasalahan dalam perusahaan. Kelemahan tersebut diantaranya terlihat dari

[3] Ferial, Fery., Suhadak, dan Siti Ragil Handayani. 2016. "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan dan Efeknya terhadap Nilai Peusahaan". *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.33, No.1, h.146 - 153

minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh dewan komisaris dan auditor, serta kurangnya peran eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang *fair*, seperti sistem hukum yang konsisten dan efektif, dukungan pelaksanaan GCG dari lembaga pemerintahan, *benchmark* pelaksanaan GCG yang tepat, dan sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat[4]. Lemahnya penerapan konsep *corporate governance* juga menjadi penyebab utama terjadinya berbagai kasus keuangan. Kasus penggelapan, pembobolan, penipuan dan korupsi yang dilakukan oleh oknum tertentu pada perusahaan itu sendiri banyak terjadi di perusahaan Indonesia[5]. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan *corporate governance* di Indonesia.

Salah satu ketidakefektifan penerapan *corporate goverance* adalah ketika manajer sebagai pengelola perusahaan tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal sehingga tidak dapat memenuhi tujuan yang diinginkan oleh para pemegang saham yang mempekerjakan mereka. Ketidakefektifan mengakibatkan *agency conflict* yang merupakan konflik kepentingan antar kelompok yang saling bertentangan, dalam hal ini adalah manajer selaku pengelola perusahaan *(agents)* dan pemegang saham selaku pemilik perusahaan *(principals)*. Konflik *corporate governance* ini muncul karena adanya pemisahan wewenang antara kepemilikian *(pincipals)* dan pengendali perusahaan *(agents)*. Pemisahan kepentingan antara agen dan prinsipal ini

---

[4] Dhanis, R. P. S. U. 2012. "Pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010". *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.*

[5] *Ibid.*, 2012

didasarkan pada *agency theory* yang dalam hal ini agen selaku pengelola perusahaan cenderung akan meningkatkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling, prinsipal selaku pemegang saham mempekerjakan agen atau pengelola perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seara efektif dan efisien untuk memberikan profit dan *sustainability* perusahaan[6]. Dikarenakan sering terjadinya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dalam perusahaan, maka konsep *corporate governance* merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan.

Sinaga mengatakan bahwa *Good corporate governance* merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, yang di dalamnya sudah mencakup suatu bentuk perlindungan baik terhadap pemegang saham sebagai pemilik perusahaan maupun pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan agar tidak ada satupun yang merasa dirugikan[7]. Penerapan *Corporate governance* yang baik dapat membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan (dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan para pemegang saham) dan elemen luar perusahaan (kreditor) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan mekanisme *corporate governance* yang baik tentu saja akan

---

[6] Jensen, Michael C. dan Wiliam H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics,* Vol. 3, No. 4, pp. 305 – 360

[7] Sinaga, Nobert Stevan. 2014. "Analisis Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan dan Growth Opportunity Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 – 2013. *Skripsi yang dipublikasikan,* Universitas Diponegoro

memberikan jaminan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh kembali nilai investasi yang mereka tanamkan pada perusahaan secara wajar, tepat, dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen mengelola perusahaan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan perusahaan. *Corporate governance* adalah salah satu kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis perusahaan dalam menjalankan bisnis yang sehat yang meliputi serangkaian hubungan antar s*takeholder* baik internal maupun eksternal. Penerapan *corporate governance* dianggap penting untuk dijadikan acuan dalam mengelola struktur perusahaan, mengarahkan dan mengelola bisnis serta berbagai urusan perusahaan lainnya guna meningkatkan kemakmuran perusahaan. Dalam pelaksanannya terdapat dua mekanisme yang ditujukan untuk menciptakan *corporate governance* yang baik, yakni melalui mekanisme internal dan mekanisme eksternal[8]. Mekanisme internal melibatkan pengelola dan pemilik perusahaan seperti komposisi dewan komisaris, komposisi dewan direksi dan komposisi internal audit. Sedangkan mekanisme eksternal melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di luar perusahaan seperti penggunaan utang dari para pemberi pinjaman yang tercantum dalam *leverage* perusahaan[9]. Kedua mekanisme ini bisa mengarahkan manajemen, yang pada awalnya mungkin memiliki kecenderungan untuk mengejar keuntungan pribadi, berubah tujuan menjadi mengambil keputusan sesuai dengan aturan dan

[8] Martsila dan Meiranto, *loc. cit.*

[9] Puspitasari, Filia dan Endang Ernawati. 2010. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha". *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, Vol.3, No.2, h.189 – 21

berorientasi pada tujuan perusahaan guna memaksimalkan nilai dari para pemegang saham[10].

Berkaitan dengan kinerja, penilaian terhadap kinerja perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Untuk dapat bersaing dalam pasar global yang semakin sengit ini, penilaian kinerja harus mencerminkan peningkatan peningkatan dari suatu periode ke periode selanjutnya. Kinerja perusahaan merupakan suatu pencapaian tujuan dari serangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama periode tertentu yang diukur menggunakan standar tertentu. Pengukuran kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan suatu metode atau pendekatan. Menurut Sam'ani, pengukuran kinerja perusahaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran pengukuran kinerja keuangan *(financial performance measurement)* dan pengukuran kinerja non keuangan *(non financial performance measurement)*[11]. Pendekatan keuangan adalah pendekatan terhadap kinerja perusahaan yang dilakukan dengan cara membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan atau biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan karakterisik pertanggungjawabannya. Pendekatan ini sangat berkaitan dengan angka-angka yang ada pada laporan keuangan. Beberapa rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan

---

[10] Martsila dan Meiranto, *loc. cit.*

[11] Sam'ani. 2008. "Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa fek Indonesia (BEI) Tahun 2004 – 2007". *Thesis*, Universitas Diponegoro

berdasarkan pendekatan laporan keuangan. Sedangkan pendekatan non-keuangan menggunakan ukuran aktivitas perusahaan sebagai pondasinya.

Laporan keuangan sering menjadi tolak ukur untuk penilaian kinerja perusahaan. Laporan keuangan adalah suatu gambaran pencapaian dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Sebagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan, laporan keuangan tidak terlepas dari kebijakan dalam proses penyusunannya yang akan mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan. Jenis pengukuran kinerja perusahaan dengan pendekatan laporan keuangan diantaranya adalah dengan menggunakan *Return of Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPV). ROA, ROE, dan NPV merupakan contoh dari rasio profitabilitas yang yang dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dalam hal ini, peneliti menggunakan *return of asset* (ROA) sebagai alat ukur kinerja perusahaan. Peneliti juga menggunakan beberapa karakteristik *corporate governance* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan, yakni ukuran komisaris independen, remunerasi, komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang tertuang dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance*, direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan[12]. Dewan direksi dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengelola perusahaan. Dalam hubungannya dengan

[12] Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.

corporate governance, penelitian Hoque *et al* mengatakan adanya pengaruh positif antara jumlah dewan direksi dengan kinerja perusahaan yang diproksikan dengan Tobins'Q[13]. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran dewan direksi maka akan semakin meningkatkan kinerja perusahaanyang dikarenakan *network* yang berhasil terbangun serta kecukupan sumber daya. Hasil penelitian Aurora juga menyatakan bahwa jumlah dewan direksi memiliki hubungan yang positif dengan Tobin's Q[14]. Namun hasil yang berbeda didapatkan oleh Aurora ketika menguji jumlah dewan direksi dengan ROA, keduanya memiliki hubungan yang negatif tidak signifikan. Begitu juga dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh Bukhori yang mengatakan adanya pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan[15]. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah dewan direksi maka permasalahan dalam hal komunikasi dan kordinasi akan semakin meningkat. Selain itu, semakin besar jumlah dewan direksi maka proses pengawasan pun akan menjadi sulit dan akan menimbulkan permasalahan agensi.

Dewan komisaris di suatu perusahaan bertugas untuk mewakili kepentingan para pemegang saham dan merupakan salah satu mekanisme yang dirancang untuk memantau konflik kepentingan dalam upaya memastikan bahwa baik pemilik perusahaan maupun komponen kontrol, pada akhirnya akan berkontribusi secara maksimal untuk meningkatkan nilai perusahaan[16]. Dalam

---

[13] Hoque, Mohammad Ziaul, Md. Rabiul Islam, dan Hasnan Ahmed. 2013. "Corporate Governance and Bank Performance: The Case of Bangladesh". *SSRN*, h.1 – 37

[14] Aurora, Akhsita. 2012. "Corporate Governance and Firm Performance in Indian Pharmaceutical Sector". *Asian Profile an International Journal*, Vol.40, No.6, h.537 - 550

[15] Bukhori, Iqbal dan Raharja. 2012. "Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan". *Diponegoro Journal of Accounting*, h.1 – 12

[16] Mertsila dan Meiranto, 2013, *loc. cit.*

keanggotaan komisaris terdapat proporsi dari dewan komisaris yang tidak memiliki kemampuan independensi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas. Keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan diharapkan dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan yang didasarkan untuk memuaskan kepentingan pribadi saja karena dewan komisaris independen berfungsi menjadi pemisah kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Yunizar dan Rahardjo mengatakan adanya pengaruh positif dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan[17]. Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih banyak memiliki dewan komisaris independen cenderung akan memberikan pemantauan yang lebih baik terhadap kebijakan-kebijakan manajemen. Namun Martsila dan Meiranto mengatakan bahwa dewan komisaris independen tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan[18]. Hal ini dikarenakan ukuran dewan komisaris independen yang semakin besar mengindikasikan banyaknya komisaris dari luar yang memiliki pengetahuan minim mengenai masalah dan seluk beluk perusahaan, hal ini mengakibatkan kinerja komisaris independen tidak efektif.

Remunerasi merupakan total kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya. Biasanya remunerasi diasosiasikan dengan penghargaan dalam bentuk uang *(monetary rewards)*, atau dapat disebut dengan gaji atau upah. Muller dalam penelitiannya mengatakan bahwa remunerasi dari perusahaan untuk para eksekutif memiliki pengaruh yang sangat besar untuk

---

[17] Yunizar dan Rahardjo (2014) Yunizar, Rendy Irawan dan Shiddiq Nur Rahardjo. 2014. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.3, No.4, h.1 – 10

[18] Martsila dan Meiranto, *loc. cit*

meningkatkan kinerja perusahaan jangka panjang[19]. Hal ini diperkuat oleh penelitian Raithatha dan Komera yang menjelaskan adanya hubungan yang positif antara remunerasi dengan kinerja perusahaan[20].

Selanjutya, komite audit memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaporan akuntansi dan keuangan, pengendalian internal perusahaan, audit laporan keuangan, serta fungsi-fungsi audit. Keberadaan komite audit dapat mencegah terjadinya *moral hazard*. Semakin besar jumlah komite audit, maka proses pengawasan terhadap akuntansi dan keuangan perusahaan akan semakin baik sehingga berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gil dan Obradovich yang mengatakan terdapat hubungan yang positif signifikan antara ukuran komite audit dengan kinerja perusahan[21]. Namun, hasil penelitian lain diperoleh oleh Yunizar dan Rahardjo menjelaskan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena ukuran komite audit yang terlalu besar mengakibatkan kinerja yang kurang fokus dan tidak partisipatif.[22]. Selain itu, keberadaan komite audit masih dijadikan hanya sebagai pemenuhan regulasi saja.

Rapat dan pertemuan komite audit sangat penting untuk dilaksanakan karena dapat mempengaruhi kinerja komite audit, karena rapat dan pertemuan tersebut

---

[19] Muller, Victor Octavian. 2014. "Do Corporate Board Compensation Characteristics Influence the Financial Performance of Listed Companies?". *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 109, h.983 – 988

[20] Raithatha, Mehul dan Surenderrao Komera. 2016. "Excecutive Compensation and Firm Performance: Evidence from Indian Firms". *IIMB Management Review*, 28, h.160 – 169

[21] Gill, Amarjit dan John D. Obradovich. 2012. "The Impact of Corporate Governance and Financial Leverage on the Value of American Firms". *International Research Journal of Finance and Economics*, Vol.91, h.1 – 14

[22] Widyati, Maria Fransisca. 2013. "Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol.1, No.1, h.234 – 24

dapat dijadikan sebagai media komunikasi dan kordinasi antar anggota komite audit. Komite audit harus melakukan rapat paling sedikit setiap tiga bulan[23]. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menghendaki bahwa komite audit mengadakan rapat dengan frekuensi yang sama dengan ketentuan minimal frekuensi rapat dewan direksi yang ditetapkan pada anggaran dasar. Pamudji berpendapat bahwa komite audit yang aktif akan lebih mudah dan efektif dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen[24]. Namun hasil lain diperoleh oleh penelitian Al-Matar *et al* yang mengatakan bahwa jumlah rapat komite audit memiliki pengaruh yang negatif terhadap kinerja perusahaan[25]. Artinya semakin tinggi frekuensi pertemuan komite audit maka dapat menurunkan kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan rapat komite audit yang terlalu banyak justru akan mengakibatkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan.

Penerapan *corporate governance* ditujukan untuk semua perusahaan di Indonesia, sektor swasta maupun sektor publik. Penerapan *corporate governance* yang maksimal pada setiap perusahaan diharapkan mampu menciptakan kestabilan ekonomi Indonesia. Tujuan ini relevan dengan Undang Undang Republik Indonesia 1945 pasal 33 yang mengamanatkan bahwa pembangunan perekonomian di Indonesia dilakukan oleh tiga pelaku utama, yaitu negara (Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)), swasta (Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)), dan Koperasi.

---

[23] Komite Nasional Good Corporate Governance. 2002. *Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif*. Jakarta.

[24] Pamudji, Sugeng dan Aprillya Trihartati. 2010. "Pengaruh Independensi dan Efektivitas Komite Audit terhadap Manajemen Laba". *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.2, No.1, h.21 – 29

[25] Al-Matar, E.M., Al-Swidi, A.K., Faudziah, F.H. 2014. "Audit Committee Characteristics and Executive Committee Charactersitics and Firm Performance in Oman: Empirical Study". *Asian Social Science*, Vol.10, No. 12, h.149-171

Ketiga pelaku ekonomi itu disebut sebagai *"tiga pilar perekonomian Indonesia"* yang dijadikan sebagai tumpuan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Setiap pelaksanaan ketiga pelaku ekonomi tersebut, tentunya memiliki peranan dan fungsi yang berbeda.

Selanjutnya untuk menciptakan pembangunan perekonomian yang baik perlu didukung oleh perusahaan – perusahaan yang sehat yang salah satu penilaiannya dapat dilihat dari kinerja perusahaannya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang keseluruhan atau sebagian sahamnya dikuasi oleh pemerintah sering sekali mendapatkan sentimen negatif dari para masyarakat mengenai pencapaian kinerjanya. BUMN dianggap sebagai badan usaha yang tidak efektif dan boros dalam pengelolaan keuangan perusahaan. BUMN sebagai salah satu pelaku utama perekonomian Indonesia memiliki kewajiban untuk mendukung keuangan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMN diharapkan bisa berperan aktif sebagai salah satu lokomotif penggerak roda perekonomian nasional. Maka untuk mencapai itu, BUMN terus berbenah menjadi badan usaha yang jauh lebih baik dari sebelumnya, termasuk pembenahan dalam penerapan konsep *corporate governance.* Sejak tahun 2002, melalui Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) No.Kep-117/M-MBU/2002 tentang kewajiban penerapan konsep *Good Corporate Governance* pada BUMN yang kemudian Keputusan Meneg BUMN tersebut diperbaharui pada tahun 2011 No.PER-01/MBU/2011 dengan tujuan melakukan penyempurnaan penerapan *corporate governance* pada BUMN. Dengan adanya keharusan bagi BUMN dalam

penerapan konsep *corporate governance*, maka diharapkan BUMN dapat meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Selain itu, kesadaran akan pentingnya penerapan konsep *corporate governance* di Indonesia dikarenakan keinginan untuk menegakkan integritas perusahaan, meningkatkan kinerja, serta menjalankan bisnis yang sehat agar BUMN dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya.

Berdasarkan pernyataan yang terdapat dalam Pasal 44 (1) Permen BUMN 01/2011, BUMN harus melakukan pengukuran terhadap kualitas penerapan GCG yang dilaksanakan berkala setiap dua tahun sekali yang terdiri dari dua bentuk pengukuran yaitu penilaian (*assessment*) atas pelaksanaan GCG dan evaluasi (*review*) atas tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan dari hasil penilaian sebelumnya[26]. BUMN itu sendirilah yang memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi, atau bisa disebut dengan penilaian mandiri, namun tetap dalam pengawasan dewan komisaris[27] (Sinaga, 2014). Indikator atau parameter penilaian dan evaluasi penerapan GCG pada BUMN dikategorikan menjadi enam faktor komitmen, yaitu komitmen terhadap penerapan GCG berkelanjutan (7%), pemegang saham dan RUPS (9%), dewan komisaris (35%), direksi (35%), pengungkapan dan keterbukaan informasi (9%), faktor lainnya (5%).

Berdasarkan uraian dan permasalahan pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan pada BUMN periode 2011 – 2015"

---

[26] Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

[27] Sinaga, 2014, *loc. cit.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah jumlah remunerasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
4. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
5. Apakah frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan direksi mempengaruhi kinerja perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris independen mempengaruhi kinerja perusahaan.
3. Untuk mengetahui apakah jumlah remunerasi mempengaruhi kinerja perusahaan.
4. Untuk mengetahui apakah ukuran komite audit mempengaruhi kinerja perusahaan.
5. Untuk mengetahui apakah frekuensi pertemuan komite audit mempengaruhi kinerja perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan dan akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan.
2. Untuk perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemilik perusahaan dan pihak manajemen untuk meningkatkan kualitas *corporate governance* agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
3. Untuk pihak eksternal, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para investor, kreditor, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan.
4. Untuk pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan terkait *corporate governance*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Hadirnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia dianggap sebagai salah satu pilar perekonomian nasional yang didasarkan atas UUD 1945, disamping keberadaan sektor swasta dan koperasi. Berdasarkan Undang-undang (UU) No.19 tahun 2003 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku utama perekonomian nasional yang bertujuan untuk mendukung keuangan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-undang (UU) No.19 Tahun 2003 pasal 2, maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
2. Mengejar keuntungan.
3. Memberikan kebermanfatan umum dengan berupaya melakukan penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi kebutuhan hajat hidup orang banyak.

4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia terdiri dari dua bentuk, yaitu:

1. Perusahaan Perseroan (Persero)

   Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dari saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh negara dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Organ Persero terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.
2. Perusahaan Umum (Perum)

   Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara, tidak terbagi atas saham, yang memiliki tujuan untuk kemanfaatan umum melalui penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Organ Perum terdiri dari Menteri, Dewan Pengawas, dan Direksi.

2. Teori Keagenan (Agency Theory)

Untuk memahami *corporate governance* dengan baik, hubungan keagenan merupakan hal paling mendasar yang harus diketahui. *Agency theory* menjelaskan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan (prinsipal) kepada para tenaga kerja profesional (agen) untuk

mejalankan bisnisnya[28]. Jensen dan Meckling menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antar manajer *(agent)* dan investor *(principal)* yang memberikan keuntungan untk semua pihak[29]. Teori keagenan akan berlaku ketika sudah terjadi hubungan antara prinsipal dan agen.

Ketidakmampuan prinsipal dalam mengelola perusahaannya sendiri, membuat prinsipal memutuskan untuk menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaannya kepada agen dengan harapan agen dapat memberikan yang terbaik untuk mencapai tujuan dari prinsipal yaitu meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, agen memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengelola perusahaan dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam atas nama prinsipal. Jensen dan Mackling menyatakan dalam melaksanakan kerjasama pihak agen ditugaskan oleh pihak prinsipal untuk memanfaatkan dan mengelola dana yang tersedia dengan harapan bisa memperolah keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya yang efisien[30]. Dengan demikian, terdapat dua kepentingan di dalam suatu perusahaan, yakni kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan milik prinsipal dan kepentingan agen itu sendiri yang memegang tanggung jawab besar dalam mengelola perusahaan untuk mendapatkan imbalan yang besar pula.

Dalam menjalankan tugasnya, pihak agen juga memiliki kewajiban untuk melaporkan semua kegiatan perusahaan kepada prinsipal sebagai pemilik

---

[28] Ferial dkk, *loc. cit*
[29] Jensen dan Meckling, *loc. cit*
[30] Jensen dan Mackling, *loc. cit*

perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Sementara, pihak prinsipal bertugas melakukan kontrol terhadap kinerja agen untuk memastikan modal yang dimiliki prinsipal dikelola dengan sebaik mungkin. Untuk itu, diperlukan biaya pengawasan yang bisa dilakukan melalui cara-cara seperti pengikatan agen, pemeriksaan laporan keuangan, membatasi divergensi kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh manajemen dengan memberikan insentif yang tepat, dan pembatasan terhadap pengambilan keputusan oleh manajemen. Biaya-biaya tersebut digunakan untuk mengontrol semua aktivitas yang dilakukan oleh manajer dan mengurangi kesenjangan antara manajer dan pemilik perusahaan agar manajer dapat bertindak sesuai dengan perjanjian kontraktual yang telah disepakati.

Ketika menjalani hubungan antara prinsipal dan agen tentu tidak akan jauh dari kemungkinan terjadinya konflik. Konflik tersebut dapat berupa perbedaan dalam memperoleh informasi dan juga perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Ketidakmampuan prinsipal untuk memonitor kinerja agen sehari-hari untuk memastikan bahwa kinerja agen sesuai dengan keinginan prinsipal mengakibatkan perbedaan penerimaan informasi yang diperoleh oleh prinsipal dan agen mengenai perusahaan. Agen berhasil memiliki informasi lebih banyak daripada prinsipal, kedaan seperti inilah yang disebut asimetri informasi. Selain itu, konflik dalam perushaan juga disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing prinsipal dan agen yang ingin mempertahankan kesejahteraanya.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa seorang manajer sebagai pengelola perusahaan mengetahui lebih banyak informasi internal dan prospek perusahaan untuk waktu ke depan dibandingkan dengan pemilik perusahaan *(information asymetry)*. Adanya ketidakseimbangan dalam memperoleh informasi inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya konflik dalam perusahaan. Konflik yang disebabkan oleh asimetri informasi juga dapat memicu munculnya kesempatan kepada manajer untuk melakukan praktik manajemen laba yang dapat merugikan pemilik perusahaan. Asimetri informasi juga dapat menimbulkan permasalahan untuk prinsipal, yakni kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan pengendalian terhadap tindakan-tindakan agen.

Menurut Jensen dan Meckling, permasalahan dalam asimetri informasi yaitu[31]:

1. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan ketika beberapa orang seperti manajer perusahaan dan pihak-pihak dalam *(insiders)* lebih mengetahui informasi mengenai prospek perusahaan, sehingga pemilik saham tidak mengetahui keputusan yang diambil oleh agen benar-benar sesuai dengan informasi yang diperolehnya atau tidak, yang mengakibatkan timbulnya kelalaian dalam tugas.
2. *Moral Hazard*, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh agen tidak sepenuhnya diketahui oleh prinsipal, sehingga agen dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan prinsipal yang melanggar kontrak dan secara norma atau etika tidak layak untuk dilakukan.

[31] Jensen dan Meckling, *loc. cit*

Selanjutnya berkaitan dengan penyebab lain timbulnya konflik dalam perusahaan yaitu *conflict of interest*, Eisenhardt menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi yaitu[32]:

1. Asumsi tentang sifat manusia, menekankan bahwa manusia memiliki tiga sifat, yaitu:
    a. Memiliki sifat mementingkan diri sendiri *(self interest),*
    b. Memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang *(bounded rationality),*
    c. Manusia selalu menghindari resiko *(risk averse).*
2. Asumsi keorganisasian, yaitu adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* (AI) antara prinsipal dan agen.
3. Asumsi informasi, yaitu informasi sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan.

Berdasarkan sifat dasar manusia tersebut, maka tidak dapat dipungkiri jika terjadi konflik antara agen dan prinsipal dalam perusahaan, karena masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri.

Konflik dalam keagenan ini dapat menimbulkan suatu masalah dalam perusahaan yang disebut dengan *agency problem*. Untuk mengatasi *agency problem* akan timbul biaya-biaya yang dikenal dengan *agency cost. Agency cost* dianggap sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk

[32] Eisenhardt, K.M. 1989. "Agency Theory: An Assesment and Review". *Academy of Management Review*. Vol. 14. No. 1, h.57-74.

melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir tidak mungkin bagi perusahaan untuk tidak memiliki *agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan *shareholders* karena terdapat rentang perbedaan kepentingan yang luas diantara mereka.

Agency problem dapat diminimalisasi melalui suatu mekanisme yang dapat mengurangi kesempatan manajer untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai norma dan merugikan prinsipal. Menurut Jensen dan Meckling mekanisme tersebut terdiri dari tiga macam, yakni *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*[33]. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditangung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal.

Salah satu sistem pengawasan yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency problem* adalah dengan menerapkan *corporate governance*. *Corporate governance* sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan untuk meminimalisasi konflik keagenan, dan merupakan elemen penting untuk meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan *good corporate governance* yang baik adalah transparansi *(transparency)*,

[33] Jensen dan Meckling, *loc. cit*

akuntabilitas *(accountability)*, keadilan *(fairness)*, dan responibilitas *(responsibility)*. Wulandari mengungkapkan bahwa *corporate governance* diperlukan untuk permasalahan keagenan antara pemilik dengan manajer, dan untuk menyamakan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan[34].

3. Corporate Governance

a. Pengertian *Corporate Governance*

Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh *Cadburry Committee Report* (1992) di Inggris yang mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab.

Menurut *International Federation of Accountants* (2004) *corporate governance* adalah serangkaian tanggung jawab dan praktik yang dilakukan oleh dewan komisaris dan eksekutif manajemen dengan tujuan memberi arahan-arahan yang strategis, memastikan bahwa tujuan yang diinginkan dapat tercapai, memastikan bahwa semua risiko dapat dikelola dengan benar, memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara bertanggungjawab.

Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD, 2004) mendefinisikan *corporate governance* sebagai salah satu elemen kunci

---

[34] Wulandari, Ndaruningpuri. 2006. "Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia". *Fokus Ekonomi*, Vol.1, No.2, h.120 - 136

dalam meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan investor yang melibatkan seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dan juga menyediakan struktur melalui tujuan perusahaan, sarana mencapai tujuan tersebut dan memantau kinerja.

Selanjutnya pengertian mengenai *corporate governance* yang ditujukan langsung untuk BUMN terdapat pada Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan *good corporate goverance* pada BUMN menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan *(stakeholder)* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa *corporate governance* merupakan seperangkat sistem yang mengatur, mengelola dan menjelaskan mengenai tata cara praktik berbisnis yang sehat dan beretika serta mengatur hubungan antara prinsipal dan agen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pada pelaksanaanya, sistem *corporate governance* diterapkan sesuai dengan prinsip dan nilai di masing-masing negara pada umumnya dan masing-masing perusahaan pada khususnya negara. Penerapan *corporate governance* akan menghasilkan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat secara baik serta

menghindarkan perusahaan dari pengelolaan sistem yang buruk yang akan menimbulkan masalah pada perusahaan nantinya. Hal lain yang diperoleh dari penerapan sistem *corporate governance* yang baik adalah dapat menciptakan rasa percaya dari para investor, sehingga perusahaan akan mudah dalam memperoleh dana pembiayaan. Selain itu, apabila implementasi mekanisme *corporate governance* dapat berjalan efektif dan efisien maka seluruh proses kegiatan perusahaan juga akan berlangusung secara baik, begitu pun pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan, karena berhasil atau tidaknya suatu perusahaan tergantung oleh sistem dan strategi yang dipilih oleh perusahaan.

Perintah penerapan *corporate governance* tidak semata-mata hanya sebagai simbolis saja tanpa ada dampak yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Beberapa manfaat yang diperoleh dengan menerapkan *corporate governance*, diantaranya:

1. Terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, pengelolaan perusahaan yang efisien, serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap *stakeholder* yang mampu mendorong peningkatan kinerja perusahaan.
2. Meningkatkan nilai perusahaan yang akan berdampak baik pada penilaian para investor dan calon investor terhadap perusahaan sehingga memudahkan perusahaan dalam mendapatkan modal.
3. Memudahkan perusahaan dalam memperoleh simpati para investor.

4. Terciptanya hubungan yang baik antara agen dan prinsipal dalam menjalankan kewajibannya masing-masing sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya konflik agensi.

b. Prinsip-prinsip Dasar Corporate Governance

Pada tahun 2004 *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) mengeluarkan seperangkat prinsip *corporate governance* yang dapat dijadikan acuan oleh berbagai negara di dunia. Prinsip-prinsip tersebut memang dikembangkan seuniversal mungkin, karena prinsip ini disusun dengan tujuan agar bisa dijadikan referensi diberbagai negara yang mempunyai sistem hukum, budaya, dan lingkungan yang berbeda. Dengan demikian prinsip ini bisa digunakan sebagai pedoman perusahaan yang dapat diselaraskan dengan sistem hukum, aturan, dan lingkungan yang berlaku di negara masing-masing.

Prinsip-prinsip *corporate governance* berdasarkan OECD (Verhezen *et al*) mencakup hal-hal sebagai berikut[35]:

1. Memastikan dasar kerangka bagi *corporate governance* yang efektif *(Ensuring the basis for an effective corporate governance framework).* Kerangka *corporate governance* harus bisa meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar, konsisten dengan aturan hukum dan secara jelas

[35] Verhezen, Peter., Erry Riyana H., dan Pri Notowidigdo. 2012. *Is Coroprate Governance Relevant? How Good Corporate Governance Practices Affect Indonesian Organization*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

mengartikulasikan pembagian kewajiban antara pengawas, regulasi, dan otoritas pelaksana yang berbeda.

2. Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan kunci *(The rights of shareholders and key ownesrship function)*

   Kerangka *corporate governance* harus melindungi dan memfasilitasi hak-hak pemegang saham. Adapun hak-hak pemegang saham yang dimaksud disini adalah hak untuk: 1) menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, 2) mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya, 3) memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, 4) ikut berperan dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham, 5) memilih anggota dewan komisaris dan direksi, dan 6) memperoleh pembagian keuntungan perusahaan.

3. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham *(The equitable treatment of shareholder)*

   Kerangka *coprporate governance* harus memastikan persamaan perlakuan bagi seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk memperoleh penggantian atau perbaikan kembali secara efektif atas pelanggaran hak-hak mereka. Prinsip-prinsip ini juga mengharuskan adanya perlakuan yang sama terhadap pemegang saham yang berada pada satu golongan yang sama, melarang praktik-praktik kecurangan seperti melakukan transaksi penjualan dengan orang dalam

(insider trading), dan mewajibkan kepada dewan direksi untuk melakukan keterbukaan terhadap tindakan yang berbenturan dengan kepentingan *(conflict of interest).*

4. Peran pemangku kepentingan terkait dengan *corporate governance (The role of stakeholders dalam corporate governance)*

   Kerangka *corporate governance* harus mengakui hak-hak *stakeholders* yang telah ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian bersama dan mendorong kerjasama aktif antara korporat dan para *stakeholders* dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja dan kesinambungan usaha. Hal tersebut diciptakan dalam bentuk mekanisme yang mengakomodasi peran *stakeholders* dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan juga diharuskan untuk melakukan keterbukaan dalam akses informasi yang relevan untuk kalangan *stakeholder* yang ikut berperan dalam proses *corporate governance*.

5. Keterbukaan dan transaparansi *(Disclosure and transparency)*

   Kerangka *corporate governance* harus mampu memberikan jaminan adanya keterbukaan informasi yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam hal ini pengungkapan informasi yang dimaksud adalah mengenai informasi keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Kemudian, informasi yang disusun harus diaudit, dan disajikan sesuai standar yang berkualitas.

6. Kewajiban dewan *(The responsibilities of the board)*

   Kerangka *corporate governance* harus mampu memberikan jaminan agar dewan direksi dan dewan bisa melakukan pemantauan yang efektif serta terciptanya akuntabilitas. mengenai terciptanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan direksi dan dewan komisaris, serta akuntabilitas dewan komisaris dan dewan direksi terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga mencakup kewajiban dewan direksi dan dewan komisaris terhadap pemegang saham dan *stakeholders* lannya.

Prinsip-pinsip dasar *corporate governance* tersebut diharapkan bisa menjadi acuan yang dijadikan oleh para pelaku usaha dalam membangun *framework* bagi penerapan *corporate governance* yang mampu menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, efektivitas pengawasan terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan, akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan *shareholders*, dan tentunya *corporate governance* dapat dianggap sebagai seperangkat mekanisme kontrol organisasi yang diadopsi untuk mencegah kegiatan yang merugikan kesejahteraan *stakeholders* dan *shareholders*. Bagi para pelaku usaha dan pasar modal, prinsip-prinsip ini juga bisa dijadikan pedoman dalam menerapkan *best practice* bagi peningkatan nilai dan kelangsungan hidup perusahaan.

Corporate governance memang bukan satu-satunya hal yang dapat mencegah kesalahan dan kejahatan dalam perusahaan, tetapi *corporate governance* mampu mengimprovisasi cara perusahaan beraktivitas. Menurut

Verhezen *et al* ada beberapa prinsip yang bisa dijadikan acuan oleh perusahaan dalam menerapkan *"best" international corporate governance*, yaitu[36]: 1) perlindungan dasar terhadap hak-hak pemegang saham, 2) larangan terhadap paktik-praktik perdagangan orang dalam, 3) pengungkapan terhadap kepentingan dewan dan manajer puncak serta kepatuhan terhadap standar pengungkapan internasional, 4) menghormati hak-hak para pemegang saham utama dan juga bertindak untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat luas, 5) pertemuan komite audite independen secara berkala, 6) dewan harus memperlakukan semua shareholders secara adil, 7) pengungkapan mengenai struktur modal kepada pemegang saham bisa dikontrol secara proporsional, 8) menyediakan akses informasi yang lengkap untuk para anggota dewan, 9) penyebaran informasi yang adil dan tepat waktu kepada semua pihak yang terlibat.

Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2013 mengeluarkan Pedoman Umum *good corporate governance* Indonesia. Pedoman GCG merupakan panduan bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan cara membangun, melaksanakan, dan mengkomunikasikan praktik GCG kepada pemangku kepentingan. Pada pedoman tersebut, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memaparkan prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagai berikut[37]:

---

[36] Verhezen, Peter, dkk, *loc. cit*
[37] KNKG, 2006, *loc. cit*

1. Transparansi *(Transparency)*

   Prinsip ini mengandung unsur keterbukaan *(disclosure)* dan penyediaan informasi yang tepat waktu, memadai, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Keterbukaan ini diperlukan agar dapat melindungi kepentingan orang-orang yang bersangkutan dengan perusahaan dan menciptakan objektivitas serta profesionalisme.

2. Akuntabilitas *(Accountablility)*

   Prinsip ini mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas adalah hal penting untuk menciptakan keselarasan kinerja.

3. Responsibilitas *(Responsibility)*

   Prinsip ini mengandung unsur kewajiban terhadap peraturan yang ada di internal maupun eksternal serta tanggung jawab terhadap para pemegang kepentingan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan goor corporate citizen.

4. Independensi *(Independency)*

   Prinsip ini mengandung unsur kebebasan dari intervensi pihak-pihak tertentu.

5. Kewajaran dan Kesetaraan *(Fairness)*

   Prinsip ini mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan porsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Good corporate governance diperlukan agar terciptanya kualitas perusahaan yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan *good corporate governance* perlu didukung oleh tiga pilar yang saling behubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha (KNKG)[38].

c. Penerapan *Corporate Governance* pada Perusahaan di Indonesia

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan kerangka paling penting bagi perundang-undangan yang ada mengenai *corporate governance* di Indonesia. Berdasarkan UUPT, suatu perusahaan adalah suatu badan hukum tersendiri dengan direksi dan komisaris yang mewakili perusahaan.

[38] KNKG, 2006, *loc. cit*

Implementasi *good corporate governance* akan mendorong tumbuhnya mekanisme *check and balance* dilingkungan perusahaan khususnya untuk manajemen perusahaan dengan tujuan untuk memberi perhatian lebih kepada *stakeholder* khususnya investor. Akibat implementasi *corporate governance* secara nyata dapat memberikan kontribusi untuk memulihkan kembali keadaan perusahaan setelah dilanda krisis. Penerapan *corporate governance* secara baik juga akan mengembalikan kepercayaan investor dan kreditor terhadap kinerja suatu perusahaan.

Kiahatu memaparkan penerapan *corporate governance* secara umum pada perusahaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut[39]:

1. Tahap Persiapan, terdiri dari tiga langkah utama, yaitu:
    a. *Awareness building*, langkah awal untuk membentuk kesadaran akan pentingnya menerapkan GCG.
    b. GCG *assessment*, upaya untuk melakukan pengukuran kondisi perusahaan terkini untuk penetapan GCG.
    c. GCG *manual building*, atau sering disebut pedoman implementasi GCG, pedoman ini akan dijadikan acuan perusahaan dalam menerapkan GCG. *Manual building* ini terdiri dari dua macam, yaitu *manual* untuk organ-organ perusahaan, dan *manual* untuk keseluruhan anggota perusahaan, seperti kebijakan GCG

[39] Kaihatu, Thomas S. 2006. "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.8, No.1. h.1 – 9

perusahaan, pedoman perilaku, *audit committee charter*, kebijakan *disclosure* dan transparansi, *roadmap* implementasi.

2. Tahap implementasi, terdiri dari tiga langkah utama, yaitu:
   a. Sosialisasi, kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan penerapan GCG, khususnya mengenai pedoman penerapan GCG.
   b. Implementasi, kegiatan yang dilakukan sesuai dengan pedoman GCG yang telah disusun.
   c. Internalisasi, merupakan tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh aspek proses bisnis perusahaan, dan berbagai peraturan perusahaan.
3. Tahap evaluasi, adalah tahapan jangka panjang yang perlu dilakukan dari waktu ke waktu secara berkala untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG yang telah dilakukan melalui tindakan penilaian.

Penerapan prinsip *corporate governance* ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien dengan melakukan harmonisasi pada manajemen perusahaan. Untuk itu, dibutuhkan peran dan komitmen yang kuat oleh setiap pihak yang terlibat dalam menjalankan perusahaan, serta investor.

4. Indikator *Corporate Governance*

a. Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan pihak dalam peruahaan yang melaksanakan operasi dan kepengurusan perusahaan. Dewan Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan seperti pemasok, pemerintah, konsumen, dan pihak-pihak lainnya. Berdasarkan pernyataan yang terdapat pada UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Direksi adalah bagian dari perusahaan yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab penuh atas kegiatan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar[40]. Direksi memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan perusahaan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Keberadaan dewan direksi merupakan salah satu sistem manajemen yang memungkinkan terjadinya optimalisasi anggota dewan direksi dalam penyelenggaraan *corporate governance*.

Pengangkatan dewan direksi ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), begitu pun dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

---

[40] UU No.40 Tahun 2007 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan demikian, tentu saja dewan direksi bekerja untuk kepentingan perusahaan. Dewan direksi yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi dan tidak memikirkan *shareholdes* tidak akan bisa bekerja dengan baik untuk kepentingan perusahaan. Maka, dewan direksi yang tepat harus mempunyai moral yang baik serta kemampuan teknis yang mendukung.

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tercantum fungsi, wewenang dan tanggung jawab dewan direksi yang dirangkum sebagai berikut[41]:

1. Dewan direksi harus menjalankan pengurusan perusahaan demi kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan
2. Dewan direksi memiliki wewenang untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam menjalankan kegiatan perusahaan
3. Dewan direksi memiliki wewenang untuk mewakili perusahaan secara tidak terbatas dan tidak bersyarat
4. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan
5. Bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui penyampaian laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan.
6. Ketika selama menjalankan tugasnya anggota dewan direksi melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian perusahaan, maka yang bersangkutan akan dimintai pertanggungjawaban secara penuh.

Menurut Muskibah, kewajiban yang dimiliki oleh dewan direksi berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang terdiri

[41] UU No. 40 Tahun 2007, *loc. cit.*

dari prinsip tranparansi, prinsip keadilan, prinsip akuntabilitas[42] dan prinsip tanggung jawab tercermin dalam berbagai ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal di UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni[43]:

1. Tanggung Jawab yang Berhubungan dengan Prinsip Transparansi

   Berkaitan dengan tanggung jawab dewan direksi untuk melakukan transparansi, dewan direksi memiliki tanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan keakuratan setiap data dan keterangan yang disajikan kepada publik dan para pemegang saham maupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian, yaitu untuk hal-hal yang berkaitan dengan kinerja keuangan, *liability*, kepemilikan, dan isi *corporate governance*. Singkatnya, prinsip transparansi menekankan aspek keterbukaan yang harus diterapkan dalam segala aspek perusahaan yang berhubungan dengan kepentingan publik dan pemegang saham.

2. Tanggung Jawab yang Berhubungan dengan Prinsip Keadilan

   Prinsip keadilan adalah memberikan perlakuan yang sama terhadap pemegang saham. Perlakuan yang sama ini misalnya dalam hal memberikan informasi yang benar dan akurat atas kinerja perusahaan, dan informasi ini diberikan tidak kepada pemegang saham tertentu saja, tetapi setiap pemegang saham pada suatu perusahaan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, termasuk juga perlakuan yang adil dan perlindungan hukum yang sama bagi

[42] Muskibah. 2010. "Tanggung Jawab Direksi dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vo.2, No.3

[43] UU No.40 Tahun 2007, *loc. cit.*

pemegang saham minoritas. Serta larangan pembagian saham untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.

3. Tanggung Jawab yang Berhubungan Dengan Prinsip Akuntabilitas

   Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban secara periodik dari pengurus perseroan. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat. Jadi dewan direksi berkewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban perusahaan kepada yang berhak secara cepat dan tepat.

4. Tanggung Jawab yang Berhubungan Dengan Prinsip Responsibilitas

   Prinsip Responsibilitas merupakan prinsip yang berkenaan dengan tanggung jawab direksi dan para pemegang saham dalam suatu perusahaan yaitu terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum, antara lain harus mengikuti peraturan di bidang perpajakan, ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, kesehatan, lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan larangan praktek monopoli serta usaha persaingan usaha tidak sehat. Dewan direksi dalam hal ini berperan untuk mengordinasi.

Sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggota dewan direksi terdiri dari dua atau lebih. Keanggotaan dewan direksi terdiri dari beberapa direktur, yang dipimpin oleh direktur utama atau CEO

(*Chief Executive Officer*)[44]. Setiap anggota direksi tentu memiliki tanggung jawab dan wewenang yang berbeda. Agar pelaksanaan fungsi, wewenang dan kewajiban dewan direksi bisa berjalan secara efektif, maka menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut[45]:

1. Komposisi dewan direksi harus diertimbangkan dengan sebaik mungkin sehingga kinerjanya bisa efektif, terutama untuk pengambilan keputusan agar dapat efektif, tepat, cepat, serta dapat bertindak independen
2. Direksi harus bersikap profesional yaitu berintegrasi dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya
3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaanagar dapat menghasilkan keuntungan dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan
4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ukuran dewan direksi adalah besarnya jumlah direksi suatu perusahaan yang ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Semakin besar ukuran dewan direksi maka kemampuan dalam mengendalikan rapat juga akan semakin besar, serta variasi ide-ide yang muncul juga bisa menjadi

[44] UU No. 40 Tahun 2007, *loc. cit*
[45] KNKG, 2006, *loc. cit*

pilihan dalam menemukan solusi ketika ada masalah. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari menyatakan bahwa ukuran dewan direksi yang besar akan mempengaruhi kinerja perusahaan menjadi optimal, namun hal ini berlangsung sampai pada kondisi tertentu saja[46]. Optimalnya kinerja perusahaan terjadi ketika jumlah dewan direksi sebesar empat sampai lima orang, apabila lebih dari itu maka kinerja perusahaan akan menurun. Hal ini disebabkan jika ukuran dewan direksi terlampau besar maka akan timbul masalah seperti permasalahan dalam hal terhambatnya komunikasi, kesulitan dalam hal mengkoordinasi tim sehingga mendorong *free-riding*, serta kesulitan memonitori para karyawan.

b. Ukuran Dewan Komisaris Independen

Menurut Widyati, komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan pihak manajemen, pemegang saham mayoritas, bahkan anggota dewan komisaris lainnya, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan yang lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perusaahan[47].

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari anggota dewan komisaris yang memiliki peran untuk memediasi hubungan antara direksi, manajer, auditor, dan pemegang saham. Menurut Fama dan Jensen *non-executive directors* (komisaris independen) memiliki wewenang untuk

---

[46] Wulandari, *loc. cit*

[47] Widyati, Maria Fransisca. 2013. "Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol.1, No.1, h.234 – 24

bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara pengurus internal perusahaan serta mengawasi kebijaksanaan serta memberikan nasihat kepada direksi[48]. Selain itu, dewan komisaris independen juga memiliki fungsi untuk memastikan bahwa dewan direksi melaksanakan kebijakan perusahaan yang telah ditentukan untuk kepentingan pemegang saham.

Keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan sangat diperlukan. Herwidayatmo dalam artikelnya mengutip pernyataan dari Berry Reiter bahwa keberadaan komisaris independen dapat membantu memberikan kontinuitas dan objektivitas yang diperlukan oleh suatu perusahaan agar dapat berkembang dan makmur. Komisaris independen membantu merencanakan strategi jangka panjang perusahaan dan secara berkala melakukan evaluasi atas pelaksanaan strategi tersebut. Hal ini tentu saja akan memberikan benefit tersendiri bagi perusahaan, karena perusahaan bisa mendapatkan akses atas talenta dan pengetahuan-pengetahuan khusus yang dimiliki oleh dewan komisaris independen yang mungkin akan menjadi mahal nilainya bila diperoleh selain melalui komisaris independen[49].

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) komisaris independen memiliki tanggung jawab yang sama dengan komisaris yaitu mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh direksi serta

---

[48] Fama, Eugene F. Dan Michael C. Jensen. 1983. "Separation of Ownership and Contril". *Journal of Law and Economics*, Vol.26.

[49] Herwidayatmo. 2000. "Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik Indonesia". *Usahawan*, No.10.

memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan[50]. Adapun persyaratan menjadi komisaris independen menurut KNKG adalah sebagai berikut[51]:

1. Tidak ada afiliasi dengan pemegang saham dan pengendali perusahaan yang bersangkutan
2. Tidak ada afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan
3. Tidak memiki jabatan merangkap sebagai direktur di perusahaan lain yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan
4. Paham akan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
5. Ditunjuk oleh pemegang saham dan dipilih oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Ukuran dewan komisaris independen yang dimaksud di sini adalah banyaknya jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan. Komposisi komisaris haruslah tersusun dengan sedemikian rupa. Menurut peraturan Kementrian BUMN, setidaknya 20% dari anggota komisaris harus merupakan komisaris independen dalam rangka meningkatkan efektivitas dan transparansi atas pertimbangan-pertimbangan komisaris. Namun meskipun begitu, dewan komisaris tidak memiliki wewenang untuk turut mengambil keputusan operasional. Ditambah lagi, pembagian tugas diantara dewan komisaris, bukan dimaksud untuk mengambil keputusan, tetapi untuk mempelajari lebih lanjut mengenai hal-hal yang perlu diputuskan oleh dewan

[50] KNKG, *loc. cit*
[51] KNKG, *loc. cit*

komisaris. Dewan komisaris independen berperan sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan dewan komisaris.

Menurut Martsila dan Meiranto, jumlah dewan komisaris independen yang lebih banyak cenderung akan memberikan pemantauan yang lebih baik terhadap kebijakan-kebijakan manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan[52]. Selain itu, komisaris independen juga dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui aktivitas evaluasi yang efektif dan keputusan strategis.

c. Remunerasi

Remunerasi adalah suatu imbalan yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja yang telah berkontribusi untuk mengelola dan menjalankan perusahaan. Remunerasi adalah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan atas jasa yang telah dikerjakan selama satu periode. Biasanya remunerasi dianggap sebagai penghargaan dalam bentuk uang atau dapat disebut sebagai gaji atau upah. Para direksi dan komisaris cenderung menginginkan remunerasi yang tinggi. Menurut Muller, besaran remunerasi bisa mendorong kinerja direksi dan komisaris dalam mengelola perusahaan sehingga akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan jangka panjang[53]. Kinerja perusahaan yang baik salah satunya terlihat dari peningkatan profit yang diperoleh oleh perusahaan sehingga pemberian remunerasi kepada direksi dan komisaris juga akan semakin besar. Direksi dan komisaris memiliki kemampuan yang disproporsional untuk

[52] Martsila dan Meiranto, *loc. cit*
[53] Muller, *loc. cit*

memengaruhi kinerja organisasi sehingga keputusan mengenai kompensasi mereka adalah hal yang kritis.

Teori keagenan menjelaskan tentang adanya biaya agensi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan akibat dari perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Tindakan untuk memaksa agen untuk selalu bertindak demi kepentingan pemegang saham akan menimbulkan biaya monitoring yang besar. Pemberian remunerasi bertujuan untuk mengurangi masalah agensi yang biasanya terjadi diantara agen dan prinsipal.

Remunerasi telah diatur oleh Bapepam dalam Bapepam-LK No.X.K.6 tahun 2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten yang bersisi mengenai kewajiban pencantuman remunerasi dalam laporan keuangan tahunan, baik mengenai tata cara pengelolaan remunerasi maupun besaran remunerasi yang dibagikan. Tingkat remunerasi yang ditetapkan harus bisa menarik dan mempertahankan anggota dewan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Remunerasi ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Penetapan remunerasi harus dilakukan secara terstruktur dan berdasarkan beberapa kriteria seperti, produktivitas, tingkat inflasi, ukuran dan pertumbuhan perusahaan, serta pengalaman serta kontribusi yang dibutuhkan oleh perseroan terhadap individu yang bersangkutan. Remunerasi direksi dan komisaris dikaji oleh komite nominasi, komite remunerasi, dan komite sumber daya manusia. Paket remunerasi yang ditujukan untuk direksi dan komisaris terdiri dari pembayaran tetap dan insentif, dengan jumlah

remunerasi yang diterima oleh setiap direksi dan komisaris dalam bentuk gaji, tunjangan, dan tantiem yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan.

d. Ukuran Komite Audit

Konsep audit mulai diperkenalkan kepada dunia usaha di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Kemudian pada tahun 1970-an, *New York Stock Exchange* (NYSE) mewajibkan keberadaan komite audit sebagai persyaratan pencatatan. Sejak itu, banyak negara yang membuat ketentuan mengenai komite audit, baik dalam bentuk *Code of Best Practice*, peraturan perundang-undangan, ataupun persyaratan pencatatan di bursa. Bouaziz mengatakan bahwa komite audit mencakup dua perspektif teori, yaitu teori keagenan yang berfungsi sebagai pengendali konflik antara agen dan prinsipal, serta teori institusional yang berfungsi sebagai pengendali lingkungan organisasi[54].

Sedangkan menurut Widyati, komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk langsung oleh dewan komisaris sehingga dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dengan tujuan untuk memastikan kecukupan pengendalian yang dilakukan oleh pihak manajemen, termasuk di dalamnya adalah pengendalian proses pelaporan keuangan, serta implementasi *corporate governance*[55]. Menurut Komite Nasioal Kebijakan Governance (KNKCG), komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih dewan komisaris dan anggota lainnya bisa

[54] Bouaziz, Zied. 2012. "The Impact of Presence Audit Committees on The Financial Performance of Tunisian Companies". *IJMBS*, Vol.2, No.4

[55] Widyati, *loc.cit*

berasal kalangan luar dengan berbagai keahlian pengalaman, dan kualitas lain untuk mencapai tujuan komite audit[56]. Adanya komite audit diharapkan mampu mengawasi setiap keputusan yang diambil oleh dewan eksekutif dalam mencapai visi dan misi perusahaan serta dapat mendorong meningkatnya kinerja perusahaan.

Al-Matari *et al* menyebutkan bahwa dalam strukturnya, komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga anggota[57]. Hal ini bertujuan untuk mencapai efektivitas kinerja komite audit. Salah satu dari anggota tersebut merupakan komisaris independen yang tidak melakukan tugas-tugas eksekutif sekaligus merangkap sebagai ketua, sedangkan pihak anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen. Anggota komite komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

Dalam Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKCG), komite audit memiliki tujuan sebagai berikut[58]:

---

[56] Komite Nasioal Kebijakan Governance, *loc. cit*

[57] Al-Matari, Y.A., Al-Swidi, A.K., Fadzil, F.H., dan Al-Matari, E.M. 2012. "Board of Directors, Audit Committee Characteristics and Performance of Saudi Arabia Listed Companies". *International Review of Management and Marketing*, Vol.2, No.4, h. 241-251.

[58] KNKG, *loc. cit*

1. Laporan keuangan

   Komite audit memiliki tanggung jawab atas:

   a. Pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dengan cara menekankan standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku dapat terpenuhi
   b. Memeriksa kembali laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan standar dan kebijakan yang telah ditentukan serta memastikan konsistensi dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit
   c. Mengawasi pelaksaaan audit laporan keuangan eksternal dan menilai kualitas pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal.

2. Manajemen risiko dan kontrol

   Komite audit memiliki tanggung jawab atas:

   a. Pengawasan terhadap proses manajemen risiko dan kontrol, termasuk identifikasi risiko pngawasan terhadap proses manajemen risiko dan kontrol, termasuk identifikasi risiko dan evaluasi kontrol untuk mengecilkan risiko tersebut,
   b. Pengawasan terhadap pelaksanaan laporan auditor internal dan auditor eksternal untuk memastikan bahwa semua bidang kunci risiko dan kontrol diperhatikan,

c. Kepastian bahwa pihak manajemen melaksanakan semua rekomendasi yang telah diberikan terkait dengan risiko dan kontrol, yang dibuat oleh auditor internal dan auditor eksternal.

3. *Corporate Governance*

Komite audit memiliki tanggung jawab atas:

a. Pengawasan terhadap proses *Corporate Governance*
b. Kepastian bahwa manajemen senior membudayakan *corporate governance*
c. Kepastian bahwa perusahaan tunduk pada *code of conduct*
d. Semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja finansial atau non-finansial perusahaan,
e. Kepastian bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku
f. Keharusan auditor internal untuk melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan lainnya.

Kemudian, dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris, diantaranya adalah:

1. Memperbaiki kualitas laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris
2. Menciptakan kedislipinan dan pengawasan yang efektif sehingga dapat mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan

3. Memberikan kesempatan untuk anggota non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan melaksanakan suatu peranan yang positif
4. Membantu kinerja direktur keuangan dengan cara memberikan suatu kesempatan mengenai pokok-pokok persoalan yang penting dan sulit dilaksanakan dapat dikemukakan
5. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan secara efektif
6. Memperkuat posisi auditor internal dengan meningkatkan kekuatan independensinya dari manajemen
7. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik.

e. Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh komite audit dalam pelaksanaan tugasnya adalah mengadakan pertemuan formal antar anggota komite audit, dewan komisaris, dewan direksi, maupun auditor eksternal. Pertemuan yang dilakukan oleh komite audit merupakan hal penting bagi kesuksesan kinerja komite audit karena aktivitas tersebut merupakan media komunikasi dan koordinasi anggotanya dalam melaksanakan pengawasan dan pelaporan kinerja manajemen. *Price Waterhouse Corporation* merekomendasikan bahwa komite audit secara berkala harus melakukan

evaluasi kinerja. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menyatakan bahwa komite audit mengadakan rapat dengan frekuensi yang sama dengan ketentuan minimal frekuensi rapat dewan komisaris yang telah ditetapkan di anggaran dasar. Frekuensi pertemuan komite audit dapat disesuaikan berdasarkan ukuran perusahaan dan besarnya tanggung jawab yang diterima oleh komite audit.

Di setiap *audit committee charter* yang dimiliki oleh setiap anggota, komite audit diharuskan untuk mengadakan pertemuan untuk rapat secara berkala dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat khusus jika diperlukan. Menurut Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif (KNKCG), setiap pertemuan komite audit yang akan dilaksanakan harus direncanakan dan dipersiapkan secara baik. Ketua komite audit harus memiliki tanggung jawab atas agenda dan bahan-bahan pendukung pertemuan yang diperlukan[59], yaitu:

1. Komite audit harus mengadakan rapat paling sedikit setiap tiga bulan,
2. Anggota komite audit harus menghadiri rapat-rapat yang telah diagendakan, termasuk rapat dengan pihak luar yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan audit eksternal,
3. Setiap pembahasan dalam rapat harus disesuaikan dengan agenda yang telah disepakati dan tujuan yang ingin dicapai,

[59] KNKCG, *loc. cit*

4. Hasil rapat-rapat harus dicatat oleh notulen, dan disebarluaskan kepada seluruh peserta rapat yang hadir.

Selanjutnya menurut peraturan Nomor IX.15 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012 menjelaskan mengenai rapat pertemuan komite audit[60] sebagai berikut:

1. Komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam setiap 3 (tiga) bulan
2. Rapat komite audit hanya bisa dilaksanakan apabila dihadiri oleh ½ (satu per dua) jumlah anggota
3. Keputusan hasil rapat komite audit diambil berdasarkan hasil musyawarah untuk mufakat
4. Setiap rapat dalam komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinions)*, yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris.

Pertemuan komite audit berfungsi sebagai media formal untuk berkomunikasi antar anggota komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap kepastian pelaksanaan *corporate governance*, *code of conduct*, serta peraturan

[60] Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

dan undang-undang yang berlaku, untuk mengetahui lebih awal mengenai pokok permasalahan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja perusahaan baik secara keuangan maupun non-keuangan, dan mengharuskan auditor internal untuk melaporkan secara tertulis hasil kerjanya.

5. Kinerja Perusahaan

Marsila dan Meiranto mengatakan bahwa kinerja adalah hasil atau pencapaian suatu tujuan dari kegiatan atau pekerjaan secara keseluruhan yang telah dilakukan sebagai cerminan prestasi kerja selama periode tertentu yang diukur berdasarkan standar[61]. Penilaian kinerja merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan pihak manajemen untuk pemiliki perusahaan dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Sinaga, penilaian kinerja perusahaan ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, dan merupakan permasalahan yang kompleks karena menyangkut efektivitas pemanfaatan modal dan efisiensi dari aktivitas perusahaan yang menyangkut nilai serta keamanan dari berbagai tuntutan yang timbul terhadap perusahaan[62]. Maka untuk menilai suatu kinerja dibutuhkan tolak ukur. Sam'ani menjelaskan bahwa pengukuran kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan serta kondisi perusahaan. Pengukuran kinerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran kinerja keuangan *(financial performance measurement)* dan pengukuran kinerja non keuangan *(non financial*

[61] Martsila dan Meiranto, *loc. cit*
[62] Sinaga, *loc. cit*

performance measurement)[63]. Informasi untuk mengukur kinerja keuangan bersumber dari laporan keuangan sedangkan informasi untuk mengukur kinerja non keuangan tidak disajikan dalam satuan rupiah atau mata uang, melainkan dari aktivitas perusahaan.

Tolak ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang bersumber dari laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap memiliki fungsi sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan juga dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan dalam menentukan perencanaan perusahaan. Menurut Fahmi, dalam memperoleh informasi laporan keuangan terdiri dari dua bagian, yaitu: (1) *management accounting information*, yang berfungsi sebagai pemberi informasi bagi pihak manajemen yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, (2) *financial accounting information*, merupakan laporan keuangan yang terdiri dari: neraca, informasi kinerja perusahaan, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang menjadi bagian integral dari laporan keuangan[64]. Maka dari itu, fokus utama yang terkandung dalam laporan keuangan adalah informasi mengenai kinerja perusahaan

Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu media pengukuran yang objektif yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Kinerja

---

[63] Sam'ani, *loc. cit*
[64] Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan.* Bandung: Alfabeta.

keuangan yang optimal dapat dicapai dengan pelaksanaan fungsi yang benar dalam pengelolaan perusahaan. Untuk menganalisa kinerja keuangan yang dapat menggambarkan kondisi kinerja suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan ada banyak jumlahnya dan setiap rasio memiliki kegunaannya masing-masing. Salah satu rasio keuangan adalah rasio profitabilitas yang diantaranya terdiri dari:

***a. Return on Asset* (ROA)**

Manurut Sutrisno, *Return on Asset* (ROA) merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan[65]. Efektivitas terkait dengan kemampuan pihak manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya badan usaha. Jika *Return on Asset* (ROA) yang diperoleh dari penggunaan aktiva perusahaan selama beroperasi positif, menandakan bahwa perusahaan mampu memberikan laba, dan menandakan terjadinya efisiensi dalam penggunaan aktiva, sehingga memiliki kemungkinan untuk meningkatkan pertumbuhan. Sedangkan jika *Return on Asset* (ROA) yang dihasilkan dari penggunaan aktiva selama beroperasi negatif, itu menandakan bahwa perusahaan mengalami kerugian yang akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan perusahaan. Menurut Puspitasari dan Ernawati, *Return on Asset* (ROA) dapat diperoleh dengan cara membandingkan *net profit* terhadap total aset[66].

---

[65] Sutrisno. 2013. *Manajemen Keuangan*; *Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
[66] Puspitasari dan Ernawati, *loc. cit*

b. *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity (ROE) juga merupakan salah satu rasio profitabilitas. ROE adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal sendiri. *Return on Equity* (ROE) sering juga disebut dengan *rate of return on net worth* atau rentabilitas modal sendiri[67]. Rasio ini menunjukkan efeisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi nilai ROE, maka akan semakin baik, artinya posisi pemilik saham perusahaan menjadi semakin kuat karena tingkat profitabilitas yang diperoleh pemiliki saham semakin tinggi, beitupun sebaliknya. Selain itu, nilai ROE yang tinggi juga menggambarkan pemasukan badan usaha atas investasi yang sangat baik dan manajemen biaya yang efektif. *Return on Equity* (ROE) diukur dengan membandingkan laba bersih dan total aset perusahaan yang berasal dari modal sendiri. Selain itu, *Return on Equity* (ROE) juga dapat diukur dengan menggunakan sistem pendekatan *Du Pont.* Penghitungan dengan pendekatan *Du Pont* adalah dengan cara mengalikan margin laba bersih, perputaran ekuitas, dan pengganda ekuitas[68]. Hasil yang diperoleh dari perhitungan rumus biasa dengan pendekatan *Du Pont* adalah sama.

c. Net Profit Margin (NPM)

Manurut Kasmir, *Net Profit Margin* (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan bersih yang diukur dengan cara membandingkan antara laba setelah buga dan

[67] Sutrisno, *loc. cit*
[68] Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

pajak dengan penjualan[69]. Rasio ini menggambarkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Rasio ini sangat penting bagi manajer operasional karena dapat dijadikan acuan untuk menyusun strategi penetapan harga penjualan perusahaan dan digunakan juga untuk mengendalikan beban usaha[70]. Semakin besar *net profit margin* menandakan bahwa perusahaan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan rasa percaya dari para investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Rasio ini menunjukkan seberapa besar laba bersih yang diperoleh dari setiap aktivitas penjualan[71]. Hubungan antara *net profit* dengan *net sales* menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan secara baik untuk menyisakan ukuran *margin* tertentu yang selanjutnya akan digunakan salah satunya sebagai kompensasi yang wajar untuk pemilik atas kesediannya memberikan modalnya untuk suatu risiko[72]. Penting sekali bagi seorang investor mengetahui dan menilai apakah suatu perusahaan dapat menghasilkan keuntungan atau tidak.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *corporate governance* dan kinerja perusahaan sudah banyak dilakukan sebelumnya, sehingga hasil dari penelitian sebelumnya bisa dijadikan referensi dalam penelitian ini. Ringkasan mengenai penelitian

---

[69] Kasmir, *loc. cit*

[70] Isbanah, Yuyun. 2015. "Pengaruh Esop, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *Journal of Research in Economics and Management*, Vol.15, No.1, h.28 - 41

[71] Sutrisno, *op. cit*, hal.228

[72] Isbanah, *loc. cit*

terdahulu terdapat pada table II.1. Berikut adalah penjelasan mengenai gambaran penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi oleh peneliti:

1. Melia Agustina Tertius (2015)

   Dalam penelitiannya yang berjudul *"Pengaruh Good Corporate Goernance terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor Keuangan"*, penelitian memperoleh data dari perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 – 2013 dengan jumlah sampel sebanyak 62 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dan metode yang digunakan adalah *multiple linear regression.* Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA, sedangkan variabel independennya adalah *good corporate governance* yang diproksikan komisaris independen. Hasil penelitian ini menunjukkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan[73].

2. Ika Surya Martsila dan Wahyu Meiranto (2013)

   Dalam penelitiannya yang berjudul *"Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan",* peneliti memperoleh data dari perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2010 dengan jumlah sampel sebanyak 117 data analisis. Teknik

[73] Tertius, Melia Agustina dan Yulius Jogi Christiawan. 2015. "Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Persahaan pada Sektor Keuangan". *Business Accounting Review*, Vol.3, No.1, h.223 – 232

pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dan metode yang digunakan adalah *multiple linear regression.* Variabel dependen yang digunakan peneliti adalah kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA, ROE, PER, dan Tobin's Q, sedangkan variabel independennya adalah *corporate governance* yang diproksikan dengan independensi dewan komisaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ROA, Tobin's Q, ROE dan PER[74].

3. Mohammad Ziaul Hoque, Md. Rabiul Islam dan Hasnan Ahmed (2013)

   Dalam penelitiannya yang berjudul *"Corporate Governance and Bank Performance",* peneliti memperoleh data dari bank yang terdaftar di Dhaka Stock Exchange (DSE) tahun 2003 – 2011 dengan jumlah sampel sebanyak 25 perusahaan. Metode yang digunakan adalah *OLS multiple regression.* Kemudian peneliti menjadikan *bank performance* sebagi variabel dependen yang diproksikan dengan ROA, ROE, dan Tobin's Q, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah *corporate governance* yang diproksikan dengan dewan direksi dan komite audit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, ROE, dan Tobin's Q. Dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tobin's Q. Tetapi dewan direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dan ROE[75].

[74] Ika Surya Martsila dan Wahyu Meiranto, *loc. cit*
[75] Mohammad Ziaul Hoque, Md. Rabiul Islam dan Hasnan Ahmed, *loc. cit*

4. Iqbal Bukhori (2012)

   Dalam penelitiannya yang berjudul "*Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan*", peneliti memperoleh data dari perusahaan yang tercatat di BEI pada kuartal terakhir 2010 dengan total sampel sebanyak 160 data analisis. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling*, dan metode yang digunakan oleh peneliti adalah *multiple linear regression*. Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang diproksikan dengan CFROA, dan variabel independennya adalah *good corporate governance* yang diproksikan dengan jumlah dewan direksi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa *corporate governance* yang diproksikan dengan dewan direksi, tidak mempengaruhi kinerja perusahaan secara signifikan[76].

5. Filia Puspitasari dan Endang Ernawati (2010)

   Dalam penelitiannya yang berjudul *"Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha"*, peneliti memperoleh data dari badan usaha yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2005-2007 dengan jumlah sampel sebanyak 112 data analisis. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling*, dan metode yang digunakan adalah *multiple linear regression*. Peneliti menjadikan kinerja keuangan sebagai variabel dependen yang diproksikan dengan ROA, ROE, PER, dan Tobin's Q, sedangkan variabel independennya adalah *corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris

[76] Iqbal Bukhori, *loc. cit*

independen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ROA, ROE, PER dan Tobin's Q[77].

6. Dominikus Octavianto Kresna Widagdo (2014)

   Dalam penelitiannya yang berjudul *"Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan",* peneliti memperoleh data dari perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 dengan jumlah sampel sebanyak 85 perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dan metode penelitian yang digunakan adalah *multiple linear regression.* Peneliti menjadikan kinerja perusahaan sebagai variabel dependen yang diproksikan dengan EPS, sedangkan variabel independennya adalah *corporate governance* yang diproksikan dengan independensi dewan komisaris dan jumlah rapat komite audit. Hasil penelitian ini menunjukkan independensi dewan komisaris dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap EPS[78].

7. Rendy Irawan Yunizar dan Shiddiq Nur Rahardjo (2014)

   Dalam penelitiannya yang berjudul *"Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan"*, peneliti memperoleh data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2012 dengan jumlah sampel sebanyak 112 data analisis. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dan *multiple linear regression*

[77] Filia Puspitasari dan Endang Ernawati, *loc. cit*

[78] Widagdo, Dominikus Octavianto Kresno dan Anis Chairi. 2014. "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.3, No.3, h.1 – 9

digunakan sebagai metode penelitian. Variabel dependen yang digunakan oleh peneliti adalah kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA, sedangkan variabel independennya adalah mekanisme *corporate governance* yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, dan aktivitas komite audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif signifkan terhadap kinerja keuangan, komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, aktivitas komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan[79].

8. Mohammad Makhrus (2013)

   Dalam penelitiannya yang berjudul *"Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaanmelalui Manajemen Laba sebagai Variabel Intervening"*, peneliti memperoleh data dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 – 2011 dengan sampel sebanyak 31 perusahaan. Peneliti menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan sampel penelitianya. *Multiple linear regression* digunakan oleh peneliti sebagai metode penelitian. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja perusahaan yang diproksikan dengan Tobin's Q, dan variabel independennya adalah komite audit. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan[80].

---

[79] Rendy Irawan Yunizar dan Shiddiq Nur Rahardjo, *loc. cit*

[80] Mkahrus, Mohammad. 2013. "Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan melalui Manajemen Laba sebagai Variabel Intervening". *Jurnal Akuntansi dan Akuntansi Islam*, Vol.1, No.1, h.53-77

9. Mehul Raithatha dan Surenderrao Komeras (2016)

   Dalam penelitiannya yang berjudul *"Executive Compensation and Firm Performance"*, peneliti memperoleh data dari perusahaan yang terdaftar dalam *Centre for Monitoring Indian Economy* (CMIE) tahun 2002 – 2012 dengan jumlah sampel sebanyak 3.100 data analisis. *Purposive sampling* digunakan sebagai metode pegambilan sampel oleh peneliti, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah *Pooled Least Square* dan *Panel Fixed Effect Estimators. Firm performance* digunakan sebagai variabel dependen yang diproksikan dengan ROA, ROE, Tobin's Q, dan Annual Stock Return (RET), dan variabel independennya terdiri dari *executive compensation*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi dewan eksekutif secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan[81].

10. Maria Fransisca Widyawati (2013)

    Dalam penelitiannya yang berjudul *"Pengaruh Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan"*, peneliti memperoleh data dari perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 – 2011 dengan jumlah sampel sebanyak 54 data analisis. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah *multiple linear regression*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja

[81] Mehul Raithatha dan Surenderrao Komeras, *loc. cit*

keuangan yang diproksikan dengan *Market Value Added* (MVA), dan variabel independennya terdiri dari dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, namun dewan direksi, komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan[82].

11. Yahya Ali Al-Matari *et al* (2012)

Dalam penelitiannya yang berjudul *"Board Directors, Audit Committee Characteristics, and Performance of Saudi Arabia Listed Company"*, peneliti memperoleh data dari perusahaan yang terdaftar di *Saudi Stock Exchange* pada tahun 2010 dengan sampel 135 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, sedangkan metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah *multiple linear regression*. Variabel dependen yang digunakan peneliti adalah *corporate performance* yang diproksikan dengan Tobin's Q . Sedangkan variabel independennya adalah *board size, audit committee activity, and audit committee size*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *board size, audit committee activity* tidak berpengaruh terhadap *corporate performance*, sedangkan *audit committee size* berpengaruh negatif signifikan terhadap *corporate performance*[83].

[82] Maria Fransisca Widyawati, *loc. cit*

[83] Yahya Ali Al-Matari *et al*, *loc. cit*

12. Ebrahim Mohammed Al-Matar (2014)

Dalam penelitiannya yang berjudul "*The Effect of Board Directors Characteristics, Audit Commitcommitteecteristics, and CEO Characteristics on Firm Performance in Oman: An Empirical Study*", peneliti memperoleh data dari perusahaan *non-financial* di Oman periode 2011 – 2012 dengan jumlah sampel sebanyak 81 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling,* sedangkan metode penelitian yang berpengaruh positif tidak signifikan terhadap digunakan untuk penelitian ini adalah *multiple linear regression*. Variabel dependen yang digunakan adalah *firm performance* dengan proksi Tobin's Q. Sedangkan variable independen yang digunakan adalah *board size, board independence, CEO compensation, audit committee size, and audit committee meeting*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *board size,* berpengaruh positif signifikan terhadap *firm performance*. Lalu *board independece* berpengaruh negatif signifikan terhadap firm performance. *CEO compensation, audit committee size* tidak berpengaruh terhadap *firm performance.* Kemudian ada *audit committee meeting* tidak berpengaruh terhadap *firm performance*[84].

13. Amarjit Gill dan John D. Obradovic (2013)

Dalam penelitiannya yang berjudul *"The Impact of Corporate Governance and Financial Leverage on The Value of American Firms"*. Data dalam penelitian ini diperoleh dari perusahaan yang terdaftar di *New York Stock Exchange* pada periode tahun 2009-2011 dengan sampel 333 perusahaan.

[84] Ebrahim Mohammed Al-Matar *et al, loc. cit*

Teknik pengambilan OLS *multiple regression*. sampel yang digunakan adalah *random sampling*, sedangkan metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah OLS *multiple regression*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diproksikan dengan Tobin's Q. Variabel independennya adalah komite audit. Hasil penelitian komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tobin's Q[85].

14. Victor Octavian Muller (2014)

Dalam penelitiannya yang berjudul *"Do Corporate Board Compensation Characteristics Influence the Financial Performance of Listed Company?"*. Data dalam penelitian ini diperoleh dari perusahaan yang terdaftar di London Stock Exchange pada tahun 2010 – 2011 dengan sampel sebanyak 5 perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah OLS *multiple regression*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *performance company* yang diproksikan dengan ROA, dan variabel independennya terdiri dari *chairman remuneration, senior non-executive total remuneration, non-executive director basic fee, additional remuneration for board committee meetings*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa remunerasi berpengaruh secara signifikan terhadap ROA pada tahun berjalan, dan juga berpengaruh secara signifikan pada ROA tahun selanjutnya[86].

[85] Amarjit Gill dan John D. Obradovic, *loc. cit*
[86] Victor Octavian Muller, *loc. cit*

Tabel II. 1

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
Melia Agustina Tertius (2015)	Kinerja Perusahaan (ROA)	*Corporate Governance* (Dewan Komisaris, dan Komisaris Independen)	• Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. • Komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan
Ika Surya Martsila (2013)	Kinerja Keuangan (ROA, ROE, PER, Tobin's Q)	*Corporate Governance* (Komisaris Independen, dan Ukuran Dewan Komisaris)	• Komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA dan Tobin's Q, dan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROE dan PER. • Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap ROA, namun berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROE dan Tobin's Q, serta berpengaruh negatif terhadap PER..
Mohammad Ziaul Hoque, Md. Rabiul Islam dan Hasnan Ahmed (2013)	*Bank Performance* (ROA, ROE, Tobin's Q)	*Corporate Governance* (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit)	• Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, ROE, dan Tobin's Q. • Dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tobin's Q. Tetapi Dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh negatif

			signifikan terhadap ROA dan ROE.
Iqbal Bukhori dan Raharja (2012)	Kinerja Perusahaan (CFRO)	*Corporate Governance* (Ukuran Dewan Direksi)	• Dewan direksi tidak mempengaruhi kinerja perusahaan secara signifikan.
Filia Puspitasari dan Endang Ernawati (2010)	Kinerja Keuangan (ROA, ROE, PER, Tobin's Q)	*Corporate Governance* (Dewan Komisaris Independen)	• Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ROA, ROE, PER dan Tobin's Q.
Dominikus Octavianto Kresna Widagdo (2014)	Kinerja Perusahaan (EPS)	*Corporate Governance* (Independensi Dewan Komisaris, dan Jumlah Rapat Komite Audit)	• Independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap EPS. • Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap EPS.
Rendy Irawan Yunizar dan Shiddiq Nur Rahardjo (2014)	Kinerja Keuangan (ROA)	*Corporate Governance* (Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, dan Aktivitas Pertemuan Komite Audit)	• Dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif signifkan terhadap kinerja keuangan • Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan • Aktivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
Muhammad Makhrus (2013)	Kinerja Perusahaan (Tobin's Q)	Komite Audit	• Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
Mehul Raithatha dan S. Komera (2016)	*Firm Performance* (ROA, ROE, Tobin's Q, dan RET)	*Executive Compensation*	• Kompensasi dewan eksekutif berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Maria Fransisca Widyati (2013)	Kinerja Keuangan (*Market Value Added*)	Dewan Direksi, Komisaris Independen, dan Komite Audit	• Komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. • Dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Yahya Ali Al-Matari dkk (2012)	*Corporate Performance* (Tobin's Q)	*Board Size, Audit Committee Activity, and Audit Committee Size.*	• *Bard size, and Audit committee meet* tidak berpengaruh terhadap *corporate performance*. • *Audit committee size* berpengaruh negatif signifikan terhadap *corporate performance.*
Ebrahim Mohammed Al-Matar dkk (2014)	*Firm Performance* (Tobin's Q)	*Board Size, Board Independence, CEO Compensation, Audit Committee Size, and Audit Committee Meeting.*	• *Board size* berpengaruh positif signifikan terhadap *firm performance*. • *Board independence* berpengaruh negatif signifikan terhadap *firm performance.* • *CEO compensation, audit committee size* tidak berpengaruh terhadap *firm performance.* • *Audit committee meeting* .berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *firm performance.*
Amarjit Gill dan John D. Obradovic (2013)	Nilai Perusahaan (Tobin's Q)	Komite Audit	• Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tobin's Q.

Victor Octavian Muller (2014)	*Company Performance* (ROA)	*Compensation Charecteristic*	• Remunerasi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Sumber: Data diolah oleh penulis

C. Kerangka Penelitian

Berdasarkan telaah pustaka yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat disajikan kerangka pemikiran yang dibuat untuk menjabarkan dalam hal hubungan dari variabel independen, yaitu *corporate governance* yang diproksikan dengan ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, remunerasi, ukuran komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit terhadap variabel dependen dalah hal ini adalah kinerja perusahaan yang dihitung dengan *Return of Asset* (ROA). Kerangka pemikiran yang telah dikembangkan peneliti dijelaskan pada gambar II.1.

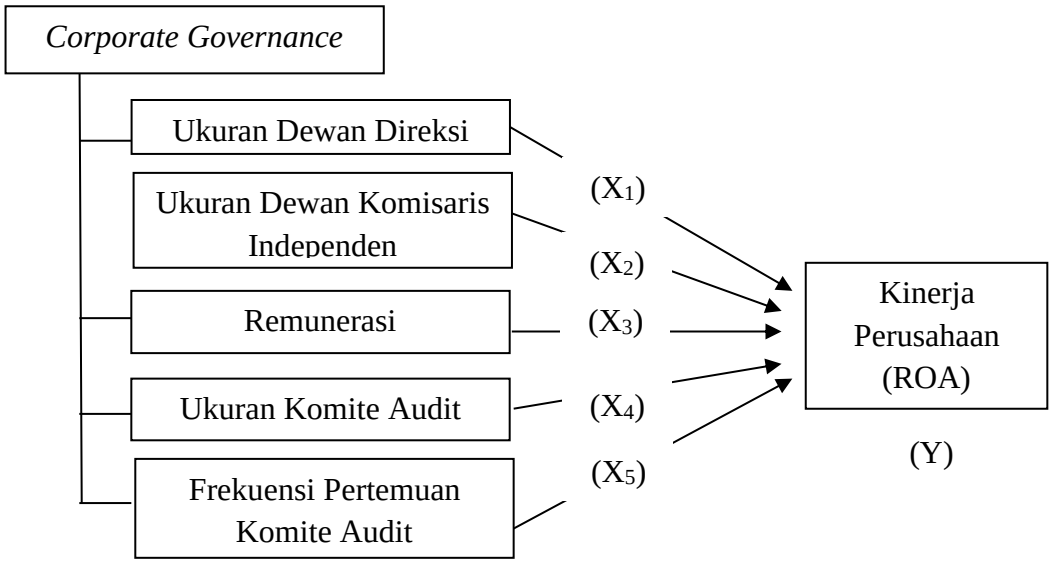

Gambar II.1 Kerangka Penelitian

Sumber : Data diolah Penulis

Berikut adalah penjelasan berdasarkan gambar kerangka penelitian:

1. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Perusahaan

Dewan direksi sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola perusahaan dan sebagai perwakilan dari perusahaan. Kedudukan direktur utama dengan direksi lainnya adalah setara (KNKG)[87]. Masing-masing direksi dapat menjalankan tugas dan wewenangnya. Namun pelaksanaan tugas masing-masing direksi tetap menjadi tanggung jawab bersama. Adanya pemisahan peran antaran dewan direksi dan dewan komisaris, membuat dewan direksi memiliki peran lebih besar dalam mengelola perusahaan. Dewan direksi memiliki peran yang sangat vital bagi perusahaan, salah satu tugasnya adalah menentukan arah kebijakan strategis dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Selain itu, dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan.

Ukuran dewan direksi adalah jumlah direksi yang ditetapkan oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Semakin besar jumlah dewan direksi maka kemampuan dalam pengambilan keputusan akan semakin cepat. Menurut Hoque *et al*, ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, hal ini dikarenakan peningkatan ukuran dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin

[87] KNKG, *loc. cit*

ketersediaan sumber daya[88]. Namun pendapat lain muncul dari Al-Matari *et al* yang mengatakan bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan[89]. Hal ini dikarenakan ukuran dewan direksi yang terlalu besar menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam pengambilan keputusan dikarenakan adanya kemungkinan munculnya keberagaman perspektif serta kesulitan dalam berkoordinasi dan mengatasi masalah. Selain itu, ukuran dewan direksi yang terlalu besar juga akan memberikan kesempatan kepada manajemen dalam melakukan manipulasi data. Tingkat efektivitas besaran ukuran dewan direksi adalah sebanyak tujuh orang.

2. Pengaruh Ukuran Komisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan

Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan memiliki fungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen karena dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi oleh pihak manapun. Selain itu komisaris independen juga dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam memberikan nasihat kepada manajemen serta melalui aktivitas evaluasi dan keputusan stratejik. Keberadaan komisaris independen akan menghasilkan monitoring yang lebih efektif terhadap pihak manajemen karena mereka bekerja hanya untuk kepentingan perusahaan semata. Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa kehadiran dewan komisaris independen memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, seperti

[88] Hoque dkk, *loc. cit*
[89] Matari dkk, *loc. cit*

penelitian yang dilakukan oleh Yunizar dan Rahardjo yang menyatakan dewan komisaris dengan lebih banyak anggota independennya akan memberikan pemantauan yang lebih baik terhadap kebijakan-kebijakan manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan[90]. Aktivitas evaluasi yang diberikan tersebut diharapkan mampu menjadi panduan bagi pihak manajer dalam menjalankan perusahaan. Semakin besar ukuran dewan komisaris independen, maka akan semakin efektif dalam memonitor pihak manajer yang berdampak terhadap kinerja perusahaan yang juga akan meningkat. Hasil penelitian Widyati juga menyatakan hal yang sama, yaitu dewan komisaris independen memiliki pengaruh postif signifikan terhadap kinerja perusahaan[91]. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen dapat menstimulasi perilaku manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

3. Pengaruh Remunerasi terhadap Kinerja Perusahaan

Remunerasi diartikan sebagai imbalan yang diterima oleh direksi dan komisaris atas kontribusi yang telah mereka berikan untuk perusahaan. Remunerasi diasosiasikan sebagai penghargaan yang diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan, dan fasilitas. Direksi dan komisaris cenderung ingin mendapatkan remunerasi yang tinggi. Pemberian remunerasi pada setiap perusahaan berbeda, karena ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria, seperti kinerja manajemen, ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan, tingkat

[90] Yunizar dan Rahardjo, *loc. cit*
[91] Widyati, *loc. cit*

inflasi, serta pengalaman kerja dan komitmen yang dibutuhkan perseroan terhadap individu yang bersangkutan.

Tujuan dari pemberian remunerasi adalah untuk mengurangi masalah agensi yang biasanya terjadi diantara agen dan prinsipal. Teori agensi menyebutkan adanya biaya yang timbul akibat dari perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Tindakan untuk memaksa agen untuk selalu bertindak demi kepentingan pemegang saham menyebabkan timbulnya masalah seperti *opportunistic-self* yang membuat direksi dan komisaris ingin mendapatkan remunerasi yang tinggi atas apa yang telah mereka lakukan untuk perusahaan. Muller menyatakan bahwa remunerasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan[92]. Hal ini dikarenakan remunerasi yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja direksi dan komisaris dalam menjalankan tugasnya menjadi lebih maksimal sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan untuk jangka panjang. Parimana mengatakan bahwa para eksekutif menerima remunerasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, maka akan menimbulkan kepercayaan pada diri mereka kepada perusahaan tempatnya bekerja sehingga mereka akan mengusahakan untuk memaksimalkan keahlian dan sumber daya yang dimilikinya[93]. Raithatha dan Komera juga mengatakan adanya pengaruh signifikan antara remunerasi dengan kinerja perusahaan[94].

---

[92] Muller, *loc. cit*

[93] Parimana, Komang Agung Surya. 2015. "Pengaruh Privatisais, Kompensasi Manajemen Eksekutif, dan Ukuran Perusahaan pada Kinerja Keuangan". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.10, No.3, h.753 - 762

[94] Raithatha dan Komera, *loc. cit*

4. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan

Komite audit adalah auditor internal perusahaan yang dibentuk langsung oleh dewan komisaris untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan pelaporan keuangan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan terutama dalam hal pengendalian. Adanya komite audit yang efektif merupakan salah satu elemen penting dalam implementasi *corporate governance* yang baik. Komite audit membantu memperkuat fungsi komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Gill dan Obradovich mengatakan bahwa komite audit merupakan pemeran penting dalam meningkatkan nilai perusahaan melalui implementasi *corporate governance*[95]. Komite audit melaksanakan tugasnya secara independen dan profesional dalam melakukan pengawasan terhadap peningkatan kualitas arus informasi keuangan.

Dalam penelitiannya, Gil dan Obradovich mengatakan terdapat hubungan positif signifikan antara komite audit dan kinerja perusahaan[96]. Jumlah komite audit yang semakin banyak akan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap proses akuntansi dan keuangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian yang sama juga

[95] Gill dan Obradovich, *loc. cit*
[96] Gil dan Obradovich, *Ibid*

diperoleh oleh Hoque *et al*, [97], Yunizar dan Rahardjo[98], dan Al-Matar *et al*, [99] yang menyatakan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan.

5. Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan

Dalam menjalankan tugasnya, para komite audit dirasa perlu untuk melakukan pertemuan antar anggota komite audit lainnya karena pertemuan yang dilakukan oleh komite audit merupakan hal penting bagi kesuksesan kinerja komite audit karena aktivitas tersebut merupakan media komunikasi dan koordinasi anggotanya dalam melaksanakan pengawasan dan pelaporan kinerja manajemen. Menurut Pamudji, semakin banyak jumlah pertemuan komite audit maka akan semakin terkoordinir pula tugas pengawasan yang dilakukan oleh komite audit[100]. Komite audit yang aktif tentu saja dapat memonitori kinerja manajemen secara efektif. Dengan pengawasan yang maksimal maka kinerja manajemen dapat ditingkatkan sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat.

Penelitian Yunizar dan Rahardo[101], serta Al-Matar *et al*, [102] mengatakan bahwa frekuensi pertemuan komite audit pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang dikarenakan jumlah pertemuan komite audit yang terlalu banyak dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pengambilan

[97] Hoque dkk, *loc. cit*
[98] Yunizar dan Rahardjo, *loc. cit*
[99] Al-Matar dkk, *loc. cit*
[100] Pamudji, *loc. cit*
[101] Yunizar dan Rahardo, *loc. cit*
[102] Al-Matar dkk, *loc. cit*

keputusan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan sehingga tidak memberikan kontribusi bagi kinerja perusahaan.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara atas rumusan masalah dalam penelitian. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_1 : Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan

H_2 : Ukuran dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan

H_3 : Remunerasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan

H_4 : Ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan

H_5 : Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun faktor-faktor yang diteliti adalah ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, remunerasi, ukuran komiet audit, dan frekuensi pertemuan komite audit. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan *(annual report)* yang terdapat pada *website* masing-masing perusahaan. Jangka waktu penelitian ini dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui masing-masing arah dan pengaruh antar variabel independen (ukuran dewan direksi, ukuran komisaris independen, remunerasi, ukuran komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit) dengan variabel dependen (kinerja perusahaan). Regresi yang digunakan adalah regresi data dan panel. Alasan menggunakan regresi data dan panel karena observasi yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari beberapa perusahaan *(cross section)* dan beberapa tahun *(time series).* Data yang diperoleh akan diolah kemudian dianalisis menggunakan *Eviews9*.

C. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel terikat *(dependent variabel)* dan variabel bebas *(independent variabel)*. Tabel operasionalisasi variable penelitian terdapat pada tabel III.1. Berikut adalah penjelasannya:

1. Variabel terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat (*dependent variabel*) adalah jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas *(independent variabel)*. Variabel terikat pada penelitian ini adalah kinerja perusahaan *(corporate performance)*. Kinerja perusahaan adalah suatu analisis sejauh mana pencapaian tujuan perusahaan dari kegiatan atau pekerjaan secara keseluruhan yang telah dilakukan sebagai cerminan prestasi kerja selama periode tertentu yang diukur berdasarkan standar yang harus dipenuhi oleh pihak agen.

Untuk menilai pencapaian kinerja suatu perusahaan diperlukan tolak ukur. Pengukuran kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisinesi suatu perusahaan serta kondisi perusahaan secara keseluruhan. Mneurt Prasinta, rasio keuangan dapat menjadi tolak ukur kinerja perusahaan[103]. Hal ini dikarenakan rasio keuangan dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan. Analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan penting dilakukan guna menentukan arah kebijakan yang diambil untuk masa depan perusahaan.

---

[103] Prasinta, Dian. 2012. "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan". *Accounting Analysis Journal*, Vol.1, No.2, h.1 – 7

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Ernawati kinerja perusahaan dapat dikonfirmasikan melalui *Return on Asset* (ROA)[104]. *Return on Asset* (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. ROA merupakan hasil perbandingan dari *net income* terhadap *total asset*. Pengembalian total asset merupakan ukuran efisiensi operasinal yang relevan. Nilai ini mencerminkan pengembalian seluruh aset yang diberikan kepada perusahaan. Dengan ROA, investor dan kreditor sebagai pihak prinsipal dapat melihat bagaimana perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk dapat memaksimalkan laba.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan ROA *(Return on Asset)* sebagai proksi untuk mengukur kinerja perusahaan. ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{ROA} = \frac{\mathbf{Net\ Income}}{\mathbf{Total\ Asset}}$$

2. Variabel bebas *(Independent Variabel)*

Variabel bebas *(independent variabel)* adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau yang mempengaruhi variabel terikat *(dependent variabel)*. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *corporate governance* yang diproksikan sebagai berikut:

[104] Puspitasari dan Ernawati, *loc. cit*

1. Ukuran Dewan Direksi (X_1)

Ukuran dewan direksi merupakan jumlah keseluruhan dewan direksi pada suatu perusahaan yang dipilih dalam RUPS untuk mewakili kepentingan para pemegang saham dalam mengelola perusahaan. Dewan direksi memiliki peran yang sangat krusial dalam pengelolaan perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran dewan direksi diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{BODSIZE} = \sum \mathbf{Dewan\ Direksi}$$

2. Ukuran Dewan Komisaris Independen (X_2)

Ukuran dewan komisaris independen merupakan jumlah keseluruhan dewan komisaris independen pada suatu perusahaan. Dewan komisaris independen adalah dewan komisaris yang tidak terafiliasi oleh dewan direksi, dewan komisaris lainnya, pemegang saham mayoritas, serta bebas dari hubungan bisnis dan kepentingan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak independen. Dalam penelitian ini ukuran dewan komisaris independen dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{BOCISIZE} = \frac{\mathbf{\Sigma Komisaris\ Independen}}{\mathbf{\Sigma\ Total\ Komisaris}}$$

3. Remunerasi (X_3)

Remunerasi merupakan total pendapatan yang diperoleh oleh dewan direksi dan dewan komisaris sebagai imbalan dari kinerja yang sudah mereka berikan kepada perusahaan. Pemberian remunerasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja masing-masing anggota dewan agar dapat

memaksimalkan kinerja perusahaan. Dalam analisis, remunerasi ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk Ln agar normalitas data tidak terganggu. Remunerasi dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{REM} = \boldsymbol{Ln}(\textbf{Remunerasi})$$

4. Ukuran Komite Audit (X_4)

Ukuran komite audit merupakan jumlah audit internal yang dibentuk langsung oleh dewan komisaris untuk bekerja secara profesional dan independen dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaporan kinerja keuangan. Dalam penelitian ini komite audit dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\textbf{ACSIZE} = \sum \textbf{Komite Audit}$$

5. Frekuensi Pertemuan Komite Audit (X_5)

Frekuensi pertemuan komite audit merupakan jumlah aktivitas pertemuan yang dilakukan oleh komite audit sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pelaporan kinerja keuangan. Pertemuan komite audit ini dimaksudkan sebagai wadah untuk membahas berbagai hal mengenai perusahaan terkait fungsi komite audit sebagai pengawas. Dalam penelitian ini frekuensi pertemuan komite audit dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\textbf{ACMEET} = \frac{\textbf{Frekuensi Pertemuan Komite Audit}_{\boldsymbol{it}}}{\textbf{Jumlah Frekuensi Pertemuan Komite Audit Terbanyak}_{\boldsymbol{t}}}$$

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variebel	Konsep	Pengukuran
Kinerja Perusahaan (ROA)	Rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan secara efektif	$\mathbf{ROA} = \frac{\mathbf{Net\ Income}}{\mathbf{Total\ Asset}}$
Ukuran Dewan Direksi	Untuk mengetahui keseluruhan jumlah dewan direksi pada suatu perusahaan	$\mathbf{BODSIZE} = \sum \mathbf{Dewan\ Direksi}$
Ukuran Komisaris Independen	Untuk mengetahui keseluruhan jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan	$\mathbf{BOCISIZE} = \frac{\mathbf{\Sigma Komisaris\ Independen}}{\mathbf{\Sigma\ Total\ Komisaris}}$
Remunerasi	Rasio untuk mengetahui jumlah remunerasi yang didapat direksi dan komisaris dalam satu periode	$\mathbf{REM} = \mathbf{Ln}(\mathbf{Remunerasi})$
Ukuran Komite Audit	Untuk mengetahui keseluruhan jumlah komite audit pada suatu perusahaan	$\mathbf{ACSIZE} = \sum \mathbf{Komite\ Audit}$
Frekuensi Pertemuan Komite Audit	Untuk mengetahui frekuensi pertemuan komite audit dalam satu periode	$\mathbf{ACMEET} = \frac{\mathbf{Frekuensi\ Pertemuan\ Komite\ Audit}_{it}}{\mathbf{Jumlah\ Frekuensi\ Pertemuan\ Komite\ Audit\ Terbanyak}_{t}}$

Sumber: Data diolah oleh peneliti

D. Metode Penentuan Populasi atau Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sebagai bahan penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak 119 perusahaan.

2. Sampel

Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi sesuai dengan kriteria yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teknik *non random sampling* atau *non probability* yaitu dengan cara pengambilan sampel yang setiap anggota populasi tidak memiliki kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Ada intervensi tertentu dari peneliti dan peneliti menentukan berdasarkan kebutuhan penelitian. Salah satu metode yang digunakan dalam teknik *non random sampling* adalah metode *purposive sampling.* Metode *purposive sampling* adalah metode dalam menentukan sampel, dimana sampel tersebut adalah yang memenuhi kriteria tertentu yang dikehendaki peneliti dan kemudian dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang tercatat sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama 5 tahun berturut-turut pada periode 2011 – 2015.
b. Perusahaan yang membuat dan mempublikasikan laporan tahunan *(annual report)* selama periode penelitian tahun 2011 – 2015.
c. Perusahaan yang menampilkan data secara lengkap mengenai *corporate governance* yang diinginkan peneliti.

Berdasarkan proses seleksi yang mengacu pada kriteria yang ditetapkan di atas, maka didapatkan hasil sebagai serikut:

Tabel III.2
Proses Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Perusahaan yang tercatat sebagai Badan Usaha Milik Negara	119
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan *(annual report)*	(41)
Perusahaan yang *website*nya tidak dapat diakses	(6)
Perusahaan dengan data yang tidak lengkap terkait variabel penelitian	(47)
Jumlah perusahaan dengan data yang lengkap dalam satu tahun	25

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Selanjutnya ditemukan sebanyak 25 sampel perusahaan yang tercatat sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memenuhi kriteria penelitian. Sehingga dengan periode penelitian selama 5 tahun yaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2015 jumlah sampel yang digunakan untuk penelitian ini sebanyak 125 perusahaan. Adapun perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian disajikan pada tabel III.3.

E. Prosedur Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan *(annual report)* perusahaan yang tercatat sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pengumpulan data yang dibutuhkan melalui web Kementrian BUMN dan web resmi perusahaan untuk melengkapi penelitian ini. Data tersebut antara lain mengenai data ukuran dewan direksi, ukuran komisaris independen, remunerasi, ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, *net income*, dan total aset yang diperoleh dari laporan keuangan dan/atau laporan tahunan perusahaan.

Tabel III.3
Sampel Penelitian Perusahaan BUMN

No	Nama Perusahaan
1	PT Adhi Karya Tbk
2	PT Aneka Tambang Tbk
3	PT Angkas Pura I
4	PT Angkas Pura II
5	PT. Mandiri, Tbk
6	PT. Bank Negara Indonesia Tbk
7	PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk
8	PT. Bank Tabungan Negara Tbk
9	PT. Garuda Indonesia Tbk
10	PT. Indofarma (Persero) Tbk
11	PT. Jasa Marga Tbk
12	PT. Kimia Farma Tbk
13	PT. Perkebunan Nusantara III
14	PT. Pertamina
15	PT. Pembangunan Perumahan Tbk
16	PT. Perusahaan Gas Negara Tbk
17	PT. PLN
18	PT. Pupuk Indonesia Holding Company
19	PT. Semen Indonesia Tbk
20	PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk
21	PT. TASPEN
22	PT. Telkom Tbk
23	PT. Timah Tbk
24	PT. Waskita Karya Tbk
25	PT. Wijaya Karya Tbk

Sumber: Data diolah oleh peneliti

2. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat menunjang serta dapat digunakan sebagai pedoman pada penelitian ini. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji literatur yang tersedia

seperti jurnal, buku-buku, referensi, artikel, serta sumber-sumber lain yang relevan dan sesuai dengan topik penelitian.

F. Metode Analisis

1. Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara umum tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan mengenai mengenai objek yang diteliti melalui sampel atau populasi sehingga mempermudah dalam memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam bukunya, Ghozali mengatakan bahwa statistik deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata *(mean)*, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan swekness (kemencengan distribusi)[105].

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Siregar, metode analisis regresi linear berganda ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat[106]. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui secara jelas pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu pengaruh dari ukuran dewan direksi, ukuran komisaris independen, remunerasi, ukuran komite audit, dan frekuensi pertemuan

[105] Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
[106] Sofian, Siregar. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

komite audit terhadap kinerja perusahaan. Pengujian terhadap hipotetsis ini dilakukan dengan persamaan statistik sebagai berikut:

$$\boldsymbol{ROA = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e}$$

Keterangan :

ROA = Variabel kinerja perrusahaan *(return on asset)*

X_1 = Variabel ukuran dewan direksi

X_2 = Variabel ukuran dewan komisaris independen

X_3 = Variabel remunerasi

X_4 = Variabel ukuran komite audit

X_5 = Variabel frekuensi pertemuan komite audit

β_0 = Konstanta

$\beta_{1\text{-}6}$ = Koefisien regresi

e = Variabel pengganggu (*error*)

3. Model Estimasi Data Panel

Model data panel adalah gabungan data antara data *cross-section* dengan data *time-series*. Data *time series* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Sedangkan data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Maka masing-masing modelnya adalah sebagai berikut:

a. Model dengan data *cross section*:

$$\boldsymbol{Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \ldots + \beta_5 X_{5i} + e_i}; \quad i = 1, 2, 3, \ldots, 25$$

$i =$ Banyaknya data *cross section*

b. Model dengan data *time series*:

$$\boldsymbol{Y_t} = \boldsymbol{\beta_0} + \boldsymbol{\beta_1 X_{1t}} + \boldsymbol{\beta_2 X_{2t}} + \ldots + \boldsymbol{\beta_5 X_{5t}} + \boldsymbol{e_i}; \qquad t = 1, 2, 3, 4, 5$$

$t =$ Banyaknya data *time series*

Mengingat data panel adalah gabungan dari data *cross section* dan data *time series*, maka model yang dituliskan adalah sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Y_{it}} = \boldsymbol{\beta_0} + \boldsymbol{\beta_1 X_{1it}} + \boldsymbol{\beta_2 X_{it}} + \ldots + \boldsymbol{\beta_5 X_{5it}} + \boldsymbol{e_{it}};$$

$$i = 1, 2, 3, \ldots, 25 \quad t = 1, 2, 3, 4, 5$$

Keterangan:

$i =$ Banyaknya data *cross section*

$t =$ Banyaknya data *time series*

Menutut Gujarati dan Porter, untuk mengestimasi parameter model dengan data panel dapat dilakukan dengan tiga teknik[107] yaitu:

a. *Common Effect Model*

Pendekatan yang paling sering digunakan adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS). Teknik ini merupakan teknik paling sederhana yang digunakan untuk mengestimasi parameter data panel, yaitu dengan mengkombinasi data *cross section* dan *time series* sebagai satu kesatuan (*pool data*) tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas (individu). Model *common effect* mengabaikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu, atau secara singkat model

[107] Gujarati, Damodar N., dan Dawn C. Porter. 2013. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 – Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat. Penerjemah: Prayogo P. Harto

ini menganggap perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. Maka model *Ordinary Least Square* adalah sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Y_{it}} = \boldsymbol{\beta_0} + \boldsymbol{\beta_1 X_{1it}} + \boldsymbol{\beta_2 X_{it}} + \ldots + \boldsymbol{\beta_5 X_{5it}} + \boldsymbol{e_{it}}$$

$$i = 1, 2, 3, \ldots, 25 \quad t = 1, 2, 3, 4, 5$$

Error term pada *model common effect* diasumsikan $e_{it} \sim \text{iid}\ (0, \sigma_u^2)$, yaitu terdistribusi secara independen dan sama dengan rata-rata sama dengan nol varians yang konstan. Untuk pengujian hipotesis, dapat pula dikatakan *error terms* terdistribusi normal.

b. *Fixed Effect Model* (Model Efek Tetap)

Pendekatan model ini mengasumsikan bahwa adanya kemungkinan *intercept* yang tidak konstan dari setiap individu sedangkan *slope* antar individu adalah tetap atau sama. Teknik ini menggunakan variabel *dummy* untuk melihat adanya perbedaan *intercept* antar individu. Model efek tetap terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Model satu arah

   Model ini hanya mempertimbangkan efek individu (W_i) dalam model. Secara sistematis model satu arah adalah sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Y_{it}} = \boldsymbol{\beta_0} + \boldsymbol{\beta_1 X_{1it}} + \boldsymbol{\beta_2 X_{2it}} + \ldots + \boldsymbol{\beta_5 X_{5it}} + \boldsymbol{\gamma_2 W_{2i}} + \boldsymbol{\gamma_3 W_{3i}} + \ldots + \boldsymbol{\gamma_{25} W_{25i}}$$

2. Model dua arah

Model ini menambahkan efek waktu (Z_t), jadi dalam model ini terdiri dari efek individu (W_i) dan efek waktu (Z_t).

$$\boldsymbol{Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{1it} + \ldots + \beta_5 X_{5it} + \gamma_2 W_{2i}}$$
$$\boldsymbol{+ \gamma_3 W_{3i} + \ldots + \gamma_{25} W_{25i} + \delta_2 Z_{2t} + \ldots + \delta_5 Z_{5t} + e_{it}}$$

Keterangan:

Y_{it} = Variabel terikat untuk individu ke-i dan waktu ke-t

X_{it} = Variabel bebas untuk individu ke-i dan waktu ke-t

W_{it} dan Z_{it} variabel *dummy* yang didefinisikan sebagai berikut:

W_{it} = 1; untuk individu i; i = 1, 2, 3, ..., 25

= 0; lainnya

Z_{it} = 1; untuk periode t; t = 1, 2, ..., 5

= 0; lainnya

Dengan adanya efek individu dan waktu, maka banyaknya parameter yang digunakan sebanyak:

1. (N – 1) buah parameter γ
2. (T – 1) buah parameter δ
3. Sebuah parameter α
4. Sebuah parameter β

Dari model di atas menggambarkan bahwa model efek tetap memiliki kesamaan *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

c. *Random Effect Model (*Model Efek Random)

Pendekatan yang digunakan dalam model ini mengasumsikan bahwa setiap perusahaan memiliki *intercept*, dimana *intercept* tersebut adalah variabel random atau stokastik. *Intercept* pada model ini diakomodasi oleh *error terms* perusahaan. Model ini sangat berguna jika entitas (individu) yang diambil sebagai sampel adalah dipilih secara random sebagai perwakilan dari populasi. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa *error* mungkin berkorelasi sepanjang *cross section* dan *time series*. Mengingat ada dua komponen yang mempunyai kontribusi pada pembentukan *error*, yaitu individu dan waktu, maka *random error* pada model efek random perlu diurai menjadi *error* untuk komponen individu dan *error* untuk komponen waktu dan *error* gabungan. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS). Maka, persamaan model efek random diformulasikan sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Y_{it}} = \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta X_{it}} + \boldsymbol{w_{it}}\,; \quad w_{it} = e_i + u_{it}$$

Keterangan:

e_i = Komponen *error cross section*

u_{it} = Komponen *error time series*

Asumsi yang digunakan untuk komponen *error* tersebut adalah:

$e_i \sim N(0,\sigma_u^2)$

$u_{it} \sim N(0,\sigma_t^2)$

$E(e_i u_{it}) = 0$; $E(e_i e_j) = 0$ $(i \neq j)$

$E(u_{it} u_{is}) = E(u_{ij} u_{ij}) = E(u_{it} u_{is}) = 0$ $(i \neq j; t \neq s)$

yaitu, komponen eror individual tidak terkolerasi satu sama lainnya dan tidak ada autokolerasi baik antara *cross section* dan *time series*.

4. Pendekatan Model Estimasi

Untuk menguji permodelan data panel, terdapat tiga metode terbaik yang ditujukan untuk menentukan apakah model data panel dapat diregresi dengan metode *Common Effect, metode Fixed Effect, atau metode Random Effect*.

a. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah penggunaan teknik regresi data panel metode *common effect* akan lebih baik dibandingkan dengan penggunaan metode *fixed effect*. Hipotesis dari uji chow adalah:

H_0 : Model regresi yang tepat untuk data panel adalah *common effect*

H_1 : Model regresi yang tepat untuk data panel adalah *fixed effect*

Peneliti menggunakan signifikansi 5% ($\alpha = 0.05$) dalam penelitian ini. Jika Pengambilan keputusan dari uji Chow ini adalah jika nilai *p-value* $\leq$ 0.05 maka H_0 ditolak yang berarti model yang tepat untuk regresi data panel adalah *fixed effect*, sedangkan apabila nilai *p-value* > 0.05 maka H_0 diterima yang berarti model yang tepat untuk regresi data panel adalah *common effect.*

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah metode *random effect* atau *fixed effect* yang lebih baik dibandingkan

common effect. Uji ini didasarkan pada ide bahwa *Least Squares Dummy Variables (LSDV*) dalam metode *fixed effect* dan *Generalized Least Squares* (GLS) dalam metode *random effect* adalah efisien *sedangkan Ordinary Least Squares (OLS)* dalam metode *common effec*t tidak efisien. Hipotesis dalam uji Hausman ini adalah :

H_0 : Model regresi yang tepat untuk data panel adalah *random effect*

H_1 : Model regresi yang tepat untuk data panel adalah *fixed effect*

Peneliti menggunakan signifikansi 5% ($\alpha = 0.05$) dalam penelitian ini. Jika Pengambilan keputusan dari uji Chow ini adalah apabila nilai *p-value* ≤ 0.05 maka H_0 ditolak yang berarti model yang tepat untuk regresi data panel adalah *fixed effect*, sedangkan apabila nilai *p-value* > 0.05 maka H_0 diterima yang berarti model yang tepat untuk regresi data panel adalah *random effect.*

5. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa sampel dalam penelitian terhindar dari gangguan normalitas, multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data panel, sehingga hanya uji multikolinearitas saja yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan uji multikolinearitas penting digunakan dalam penelitian yang menggunakan lebih dari satu variable independen. Menurut Gujarati dan Poreter, kelebihan penggunaan data panel adalah data yang digunakan menjadi lebih informatif, variabilitasnya lebih besar, kolineariti yang lebih

rendah diantara variabel, memiliki banyak derajat bebas *(degree of freedom),* dan lebih efisien[108].

Uji multikolonieritas adalah pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi secara signifikan antar variabel-variabel bebas dalam satu model regresi linear berganda. Menurut Ghozali, uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas[109]. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal, atau dapat disimpulkan bahwa variabel bebas pada penelitian ini memiliki nilai korelasi antar sesama independen sama dengan nol. Adanya multikolinearitas dalam model persamaan regresi yang digunakan akan mengakibatkan ketidakpastian estimasi, sehingga mengarah pada kesimpulan yang menerima hipotesis nol.

Menurut Ghozali, untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi[110] yaitu :

a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen tidak mempengaruhi signifikan variabel dependen.
b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variable independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas angka 0,90), maka merupakan indikasi adanya multikolinearitas.

---

[108] Gujarati & Porter, *Ibid*
[109] Ghozali, *op. cit,* hal. 103
[110] Ghozali, *Ibid*

c. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Suatu model regresi yang bebas dari masalah multikolinearitas apabila mempunyai nilai toleransi ≤ 0,1 dan nilai VIF ≥ 10.

6. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial ataupun simultan dapat mempengaruhi variabel terikatnya. Dalam penilitian ini uji hipotesis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui masing-masing pengaruh ukuran dewan direksi, ukuran komisaris independen, remunerasi, ukuran komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit terhadap kinerja perusahaan secara parsial menggunakan uji t. Menurut Ghozali, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menafsir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of fit*[111]. Secara statistik *Goodness of fit* setidaknya dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t dengan tingkat signifikan 5% dimana perhitungan statistik dapat disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (H_0 ditolak), sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya H_0 diterima. Karena penelitian ini hanya menggunakan uji parsial, maka untuk mengukur *Goodness of fit* hanya menggunakan koefisien determinasi dan nilai statistik uji t.

[111] Ghozali, *Op. cit*, hal.95

a. Pengujian Parsial (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali, uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan tingkat pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat[112]. Pengujian dilakukan dengan menggunakan level signifikansi sebesar 0,05 (α = 5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $\leq$ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) berkisar diantara nilai satu dan nol. Nilai R^2 yang kecil atau semakin mendekati 0 mengartikan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu mengartikan bahwa

[112] Ghozali, *Op. cit*, hal.97

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Dalam bukunya, Ghozali mengatakan bahwa kelemahan mendasar dari penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model[113]. Bias yang dimaksudkan adalah setiap tambahan satu variabel independen, maka nilai R^2 akan meningkat tanpa melihat apakah variable tersebut berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Ghozali juga mengatakan bahwa disarankan menggunakan nilai adjusted R^2 pada saat mengevaluasi model regresi yang baik, hal ini dikarenakan nilai adjusted R^2 dapat naik dan turun bahkan dalam kenyataannya nilainya dapat menjadi negatif[114]. Apabila terdapat nilai adjusted R^2 bernilai negatif, maka dianggap bernilai nol.

[113] Ghozali, *Ibid*
[114] Ghozali, *Ibid*

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau mendesripsikan secara umum tanpa melakukan analisis mengenai objek yang diteliti dalam penelitian ini yang disajikan dalam bentuk tabel. Analisis deskriptif yang disajikan dalam penelitian ini berupa *mean*, *median*, *minimum*, *maximum*, dan *standar deviation* yang didapat dari masing-masing sampel perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2011- 2015. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel IV.1.

Tabel IV.1

Statistik Deskriptif

Perusahaan BUMN di Indonesia

	ROA	BODSIZE	BOCISIZE	REM (Milyar)	ACSIZE	ACMEET
Mean	0,064112	6,728000	0,371219	46,525600	4,088000	20
Median	0,043187	6,000000	0,333333	24,559900	4,000000	16
Maximum	0,250000	11,000000	0,714286	319,665800	8,000000	57
Minimum	-0,107705	4,000000	0,142857	0,394500	2,000000	4
Std. Deviation	0,639420	1,846426	0,122565	57,500100	1,204936	11
Observations	125	125	125	125	125	125

Sumber : Data diolah peneliti menggunakan *eviews 9*

Berdasarkan hasil pada Tabel IV.I yang menunjukkan statistik deskriptif perusahaan BUMN dengan total sampel sebanyak 125 unit analisis menunjukkan nilai rata- rata *Return on Asset* (ROA) sebesar 0,0641 dan nilai standar deviasi ROA perusahaan BUMN yang juga sebesar 0,0639. Besaran nilai rata-rata dan standar deviasi yang relatif sama mengindikasikan bahwa perusahaan yang

berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara periode 2011 – 2015 memiliki variabilitas ROA yang cukup besar selama periode penelitian.

Nilai ROA maksimum perusahaan BUMN yaitu sebesar 0,2500 diperoleh oleh PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk pada tahun 2011. Nilai tersebut didapat karena pada tahun 2011 perseroan berhasil mengoptimalkan peluang dari kenaikan komoditas batu bara, sehingga mampu meningkatkan total pendapatan sebesar 33,8%, menjadi sebesar Rp 10,58 triliyun dari Rp 7,91 triliyun pada tahun 2010. Selain itu, konsistensi PT. Batu Bara dalam menggalakkan serangkaian inovasi operasional untuk meningkatkan efisiensi, terbukti sukses melonjakkan *net profit* secara tajam hingga 54,5% menjadi Rp 3,09 triliyun di tahun 2011, dari pada Rp 2,00 triliyun pada tahun sebelumnya. Langkah pengendalian biaya pun terus dilaksanakan secara efektif sejalan dengan inovasi untuk peningkatan efektivitas operasional, sehingga membuahkan hasil peningkatan volume produksi per *output* yang terkendali. Strategi-strategi yang dilakukan oleh perushaan sebagai upaya efisiensi operasional nyatanya memang bekerja secara efektif sehingga berhasil meningkatkan nilai ROA.

Sedangkan nilai ROA minimum perusahaan BUMN sebesar -0,1077 diperoleh oleh PT. Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2014. Nilai tersebut didapat karena pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi secara global sedang tidak bersahabat. Tingkat pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada kisaran 3,2% pada awal tahun, namun faktanya pada pertengahan tahun pertumbuhan ekonomi merosot menjadi 2,8%. Hal tersebut yang mengakibatkan kinerja keuangan perusahaan mengalami turbulensi. Selain itu, tingginya nilai tukar

rupiah, melonjaknya harga avtur, gencarnya pertumbuhan *Low Cost Carrier* di wilayah domestik, kondisi *over supply* di kawasan Asia Pasifik, peningkatan jumlah armada yang dioperasikan namun tidak diikuti oleh pertumbuhan trafik yang seimbang, serta kinerja keuangan perseroan yang mengalami *impairment loss* memperparah kondisi kinerja perusahaan. Perusahaan harus mengalami pembengkakan biaya operasional, sehingga pada tahun 2014 PT. Garuda Indonesia Airlines Tbk membukukan rugi komprehensif sebesar USD 334,0 juta, naik dari tahun 2013 sebesar negatif USD 3,9 juta

Pada variabel ukuran dewan direksi (BODSIZE) menunjukkan rata-rata sebesar 6,7280. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan BUMN di Indonesia memiliki dewan direksi sebanyak 7 orang, yang berarti sudah memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Kementrian BUMN yaitu sebesar 2 orang. Standar deviasi pada variabel ukuran dewan direksi sebesar 1,8464 lebih kecil dari nilai rata-rata 6,7280 yang mengartikan kurangnya variabilitas ukuran dewan direksi pada perusahaan BUMN di Indonesia selama periode penelitian. Ukuran dewan direksi tertinggi pada perusahaan BUMN sebanyak 11 orang, yaitu pada PT. Mandiri Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk selama tahun 2011 - 2015. Sedangkan ukuran dewan direksi terendah pada perusahaan BUMN sebanyak 4 orang, yaitu pada PT. Indofarma (Persero) Tbk selama tahun 2013 – 2015.

Pada variabel ukuran dewan komisaris independen (BOCISIZE) menunjukkan rata-rata sebesar 0,3712. Hal tersebut menunjukkan jumlah rata-rata dewan komisaris independen pada perusahaan BUMN di Indonesia sebesar

37% dari jumlah keseluruhan dewan komisaris, yang menandakan bahwa rata-rata jumlah dewan komisaris independen pada perusahaan BUMN sudah memenuhi standar minimum yang telah ditentukan oleh Kementerian BUMN yaitu sebesar 20% dari jumlah keseluruhan dewan komisaris. Standar deviasi variabel ini sebesar 0,1226 lebih kecil dari nilai rata-rata 0,37 yang mengartikan kurangnya variabilitas ukuran dewan komisaris independen pada perusahaan BUMN di Indonesia selama periode penelitian. Ukuran tertinggi dewan komisaris independen sebesar 0,7143 yang terdapat pada PT. Aneka Tambang Tbk tahun 2011, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk tahun 2014, dan PT. Waskita Karya Tbk tahun 2015. Sedangkan ukuran terendah dewan komisaris independen sebesar 0,1429 yang terdapat pada PT. Pupuk Indonesia Holding Company tahun 2011.

Pada variabel remunerasi (REM) menunjukkan rata-rata sebesar Rp 46,5256 milyar. Hal ini menandakan bahwa secara rata-rata perusahaan BUMN di Indonesia memberikan remunerasi kepada dewan komisaris dan dewan direksi sebesar Rp 46,5256 milyar selama setahun. Standar deviasi sebesar Rp 57,5001 milyar lebih besar daripada rata-rata Rp 46,5256 milyar yang mengartikan besarnya variabilitas remunerasi pada perusahaan BUMN di Indonesia selama periode penelitian. Pemberian jumlah remunerasi tertinggi kepada dewan komisaris dan dewan direksi diperoleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk pada tahun 2015 dengan remunerasi sebesar Rp 319,6 milyar. Sedangkan pemberian remunerasi terendah kepada dewan komisaris dan dewan diperoleh PT. Kimia Farma Tbk tahun 2011 dan tahun 2012 dengan remunerasi sebesar Rp 394,4 juta.

Pada variabel ukuran komite audit (ACSIZE) menunjukkan rata-rata sebesar 4,0880. Hal ini menandakan bahwa rata-rata ukuran komite audit pada perusahaan BUMN di Indonesia sebanyak 4 orang yang mengartikan bahwa rata-rata jumlah komite audit pada perusahaan BUMN di Indonesia sudah memenuhi standar minimum yang telah ditentukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yaitu sebanyak 3 orang. Standar deviasi sebesar 1,2049 lebih kecil dari rata-rata 4,0880 yang mengartikan kurangnya variabilitas ukuran komite audit pada perusahaan BUMN di Indonesia selama periode penelitian. Ukuran komite audit tertinggi sebanyak 8 orang pada PT. Bank Rakyat Indonesia tahun 2012 – 2014 dan pada PT. Perusahaan Listrik Negara tahun 2011. Sedangkan ukuran komite audit terendah sebanyak 2 orang pada PT. Adhi Karya Tbk tahun 2014. Ukuran komite audit pada PT. Adhi Karya Tbk tahun 2014 yang hanya berjumlah 2 orang tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah diberikan oleh Bapepam, yaitu berjumlah 3 orang, yang bertujuan agar tercapainya pengelolaan korporasi yang baik.

Pada variabel frekuensi pertemuan komite audit (ACMEET) menunjukkan rata-rata pertemuan komite audit sebesar 20 kali pertemuan dalam setahun. Standar deviasi sebesar 11 kali pertemuan lebih kecil dari rata-rata sebesar 20 kali pertemuan yang mengartikan kurangnya variabilitas frekuensi pertemuan komite audit pada perusahaan BUMN di Indonesia selama periode penelitian. Jumlah frekuensi pertemuan komite audit tertinggi sebesar 57 kali pertemuan pada PT. Perusahaan Gas Negara Tbk tahun 2012. Jumlah frekuensi pertemuan komite audit terendah sebesar 4 kali pertemuan pada PT. Wasita Karya tahun

2011. Data-data tersebut mengartikan bahwa jumlah frekuensi pertemuan komite audit pada perusahaan BUMN di Indonesia sudah memenuhi standar minimum yang telah ditentukan oleh Bapepam yaitu sebanyak 3 atau 4 kali pertemuan dalam setahun.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mencari tahu ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas pada model regresi. Model regresi yang baik tidak akan menunjukkan korelasi antar variabel bebas. Jika koefisien lebih besar dari 0,90, maka model regresi tersebut terdeteksi adanya multikoliniearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel IV.2.

Pada tabel IV.2 tidak ada koefisien korelasi antar variabel yang lebih dari 0,90, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa data sampel perusahaan BUMN di Indonesia periode 2011 – 2015 tidak terdeteksi multikolinearitas antar variabel bebasnya.

Tabel IV.2

Hasil Uji Multikolinearitas

Perusahaan BUMN di Indonesia

	BODSIZE	BOCISIZE	REM	ACSIZE	ACMEET
BODSIZE	1,000000	0,473539	0,698602	0,670556	0,230095
BOCISIZE	0,473539	1,000000	0,352572	0,424239	0,296721
REM	0,698602	0,35872	1,000000	0,501270	0,288715
ACSIZE	0,670556	0,424239	0,501270	1,000000	0,179658
ACMEET	0,209050	0,301586	0,288715	0,168046	1,000000

Sumber : Data diolah peneliti menggunakan *eviews 9*

C. Hasil Uji Regresi Data Panel

Peneliti terlebih dahulu menguji jenis data panel yang paling baik untuk model, agar mendapatkan model regresi yang terbaik. Pada model estimasi data panel ini terdapat tiga teknik yang dapat digunakan, yaitu: *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model.*

1. Chow Test

Uji Chow digunakan dengan tujuan untuk mengetahui model yang paling tepat dalam regresi data panel. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan model antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Pada persamaan dilakukan regresi data panel dengan menggunakan *equation estimation* pada *Eviews* 9 dan pilih *cross-section* dengan *fixed*. Kemudian diuji dengan *chow test* (*redundant fixed effect – likelihood ratio*) untuk menentukan model yang paling tepat, yaitu *common effect model* atau *fixed effect model*.

Pengambilan keputusan yang digunakan dalam pengujian ini dilihat dari *output* yang dihasilkan, yaitu nilai *chi-square* dan *p-value* dengan tingkat signifikansi 0,05. Apabila dalam pengujian ini *p-value* > 0,05 maka model yang paling tepat ntuk regresi data panel adalah *common effect model*. Namun jika *p-value* ≤ 0,05 maka model yang tepat untuk regresi data panel adalah *fixed effect model* kemudian dilanjutkan ke *hausman test* untuk menntukan model yang paling tepat antara *fixed effect model* atau *random effect model*. Hipotesis yang digunakan pada *chow test* adalah sebagai berikut:

H_0: Model regresi yang tepat untuk data panel adalah *common effect model*

H_1: Model regresi yang tepat untuk data panel adalah *fixed effect model*

Hasil *chow test* perusahaan BUMN di Indonesia dapat dilihat pada tabel IV.3, kemudian untuk perusahaan BUMN publik pada tabel IV.4, dan untuk perusahaan BUMN non-publik pada tabel IV.5.

Tabel IV.3

Hasil Uji Chow

Perusahaan BUMN di Indonesia (Publik dan Non-Publik)

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Fixed Effect
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.486560	(24,95)	0.0000
Cross-section Chi-square	152.847035	24	0.0000

Sumber : Data diolah peneliti menggunakan *eviews 9*

Berdasarkan data pada tabel IV.3, hasil *chow test* perusahaan BUMN di Indonesia menunjukkan *Chi-square* sebesar 152,847035 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,00. Karena nilai probabilitas 0,00 < 0,05 maka H_0 ditolak dan menerima H_1. Maka dapat diketahui bahwa *common effect model* bukan model yang terbaik untuk dijadikan model regresi data panel pada sampel perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2011 – 2015. Sehingga untuk selanjutnya perlu dilakukan pengujian *hausman test* untuk menentukan model yang terbaik antara *fixed effect model* atau *random effect model*.

Berdasarkan data pada tabel IV.4, hasil *chow test* perusahaan BUMN publik di Indonesia menunjukkan *Chi-square* sebesar 132,550561 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,00. Karena nilai probabilitas 0,00 <

0,05 maka H_0 ditolak dan menerima H_1. Maka dapat diketahui bahwa *common effect model* bukan model yang terbaik untuk dijadikan model regresi data panel pada sampel perusahaan BUMN periode 2011 – 2015.

Tabel IV.4

Hasil Uji Chow

Perusahaan BUMN Publik di Indonesia

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Fixed Effect
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	13.247714	(17,67)	0.0000
Cross-section Chi-square	132.550561	17	0.0000

Sumber : Data diolah peneliti menggunakan *eviews 9*

Sehingga untuk selanjutnya perlu dilakukan pengujian *hausman test* untuk menentukan model yang terbaik antara *fixed effect model* atau *random effect model*.

Tabel IV.5

Hasil Uji Chow

Perusahaan BUMN Non-Publik di Indonesia

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Fixed Effect
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.637600	(6,23)	0.0010
Cross-section Chi-square	31.657245	6	0.0000

Sumber : Data diolah peneliti menggunakan *eviews 9*

Berdasarkan data pada tabel IV.5, hasil *chow test* perusahaan BUMN non-publik di Indonesia menunjukkan *Chi-square* sebesar 31,657245

dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,00. Karena nilai probabilitas 0,00 < 0,05 maka H_0 ditolak dan menerima H_1. Maka dapat diketahui bahwa *common effect model* bukan model yang terbaik untuk dijadikan model regresi data panel pada sampel perusahaan BUMN publik di Indonesia tahun 2011 – 2015. Sehingga untuk selanjutnya perlu dilakukan pengujian *hausman test* untuk menentukan model yang terbaik antara *fixed effect model* atau *random effect model*.

2. Hausman Test

Setelah dilakukan *chow test*, terlihat bahwa hasil dari uji tersebut menolak hipotesis nol yang sudah ditentukan, yaitu *model common effect* bukan model terbaik untuk regresi data panel. Langkah selanjutnya adalah melakukan *hausman test* untuk menentukan model yang terbaik untuk regresi data panel, yaitu antara *fixed effect model* atau *random effect model*. Pada *hausman test, equation estimation Eviews* 9 dipilih *cross-section* dengan *random*. Kemudian diuji dengan *hausaman test* (*correlated random effect – hausman test*) untuk menentukan model yang paling tepat, yaitu *random effect model* atau *fixed effect model*

Pengambilan keputusan yang digunakan dalam pengujian ini didasari dari *output* yang dihasilkan, yaitu nilai *Chi-square* dan *p-value* dengan tingkat signifikansi 0,05. Apabila dalam pengujian ini *p-value* > 0,05 maka model yang paling tepat ntuk regresi data panel adalah *random effect model*. Namun jika *p-value* ≤ 0,05 maka model yang tepat untuk regresi data

panel adalah *fixed effect model*. Hipotesis yang digunakan pada *hausman test* adalah sebagai berikut:

H_0: Model regresi yang tepat untuk data panel adalah *random effect model*

H_1: Model regresi yang tepat untuk data panel adalah *fixed effect model*

Hasil *hausman test* perusahaan BUMN di Indonesia dapat dilihat pada tabel IV.6, kemudian untuk perusahaan BUMN publik pada tabel IV.7, dan untuk perusahaan BUMN non-publik pada tabel IV.8.

Tabel IV.6

Hasil Uji Hausman

Perusahaan BUMN di Indonesia (Publik dan Non-Publik)

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Random Effect
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.816884	5	0.0374

Sumber : Data diolah peneliti menggunakan *eviews 9*

Pada tabel IV.6 hasil uji hausman pada sampel perusahaan BUMN tahun 2011 – 2015 menunjukkan *chi-square* sebesar 11,816884 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0374. Karena nilai probabilitas *chi-square* 0,0374 lebih kecil dari 0,05, berarti dapat disimpulkan bahwa *fixed effect model* menjadi model terbaik untuk regresi data panel dalam penelitian ini.

Pada tabel IV.7 hasil uji hausman pada sampel perusahaan BUMN publik tahun 2011 – 2015 menunjukkan *chi-square* sebesar 20,291716 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0011. Karena nilai probabilitas *chi-square*

0,0011 lebih kecil dari 0,05, berarti dapat disimpulkan bahwa *fixed effect model* menjadi model terbaik untuk regresi data panel dalam penelitian ini.

Tabel IV.7

Hasil Uji Hausman

Perusahaan BUMN Publik di Indonesia

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Random Effect
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	20.291716	5	0.0011

Sumber : Data diolah peneliti menggunakan *eviews 9*

Pada tabel IV.8 hasil uji hausman pada sampel perusahaan BUMN non-publik tahun 2011 – 2015 menunjukkan *chi-square* sebesar 3,163554 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,6748. Karena nilai probabilitas *chi-square* 0,6748 lebih besar dari 0,05, berarti dapat disimpulkan bahwa *random effect model* menjadi model terbaik untuk regresi data panel dalam penelitian ini.

Tabel IV.8

Hasil Uji Hausman

Perusahaan BUMN Non-Publik di Indonesia

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Random Effect
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.163554	5	0.6748

Sumber : Data diolah peneliti menggunakan *eviews 9*

D. Hasil Uji Regresi dan Pembahasan

Setelah melakukan uji regresi model data panel telah ditentukan bahwa *fixed effect model* merupakan model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini dilakukan dengan meregresikan seluruh variabel independen, yaitu ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, ukuran komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit terhadap variabel dependen, yaitu *Return on Asset* (ROA).

Hasil uji regresi perusahaan BUMN di Indonesia dengan *fixed effect model* dapat dilihat pada tabel IV.9, kemudian hasil uji regresi perusahaan BUMN publik di Indonesia dengan *fixed effect model* dapat dilihat pada table IV.10, dan hasil uji regresi perusahaan BUMN non-publik pada table IV.11.

Berdasarkan pada tabel IV.9, persamaan regresi yang menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, remunerasi, ukuran komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit terhadap variabel dependen, yaitu *Return on Asset* (ROA) pada perusahaan BUMN di Indonesia periode 2011 – 2015. Persamaan regresi ini adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{ROA = 0{,}0868 - 0{,}0001\ BODSIZE + 0{,}00273\ BOCISIZE + 0{,}0003\ REM + 0{,}0006\ ACSIZE - 0{,}0695\ ACMEET}$$

Interpretasi dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pada persamaan tersebut dihasilkan nilai konstanta (β) sebesar 0,0868, yang artinya apabila variabel independen BODSIZE, BOCISIZE, REM, ACSIZE, ACMEET, LEV nol maka nilai ROA adalah 0,0868.

Tabel IV.9

Hasil Uji Regresi Data Panel

Fixed Effect Model

Perusahaan BUMN di Indonesia (Publik dan Non-Publik)

Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 06/01/17 Time: 15:01
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 25
Total panel (balanced) observations: 125

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.086820	0.197679	0.439196	0.6615
BODSIZE	-0.000124	0.008091	-0.015270	0.9878
BOCISIZE	0.002729	0.054567	0.050010	0.9602
REM	0.000296	0.008866	0.033369	0.9735
ACSIZE	0.000601	0.006060	0.099108	0.9213
ACMEET	-0.069542	0.026634	-2.610995	0.0105

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.738542	Mean dependent var	0.064112
Adjusted R-squared	0.658728	S.D. dependent var	0.063942
S.E. of regression	0.037354	Akaike info criterion	-3.531183
Sum squared resid	0.132557	Schwarz criterion	-2.852387
Log likelihood	250.6989	Hannan-Quinn criter.	-3.255424
F-statistic	9.253341	Durbin-Watson stat	1.353311
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah peneliti menggunakan *eviews 9*

2) Koefisien regresi BODSIZE negatif sebesar 0,0001, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan BODSIZE sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan maka akan diikuti oleh penurunan kinerja perusahaan sebesar 0,0001 satuan.

3) Koefisien regresi BOCISIZE positif sebesar 0,0027, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan BOCISIZE sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan maka akan diiuti oleh kenaikan kinerja perusahaan sebesar 0,0027 satuan.

4) Koefisien regresi REM positif sebesar 0,0003, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan REM sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan maka akan diikuti oleh kenaikan kinerja perusahaan sebesar 0,0003 satuan.
5) Koefisien regresi ACSIZE positif sebesar 0,0006, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan ACSIZE sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan maka akan diikuti oleh kenaikan kinerja perusahaan sebesar 0,0006 satuan.
6) Koefisien regresi ACMEET negatif sebesar 0,0695, yang menunjukkan setiap kenaikan ACMEET sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan maka akan diikuti oleh penurunan kinerja perusahaan sebesar 0,0695 satuan.

Selanjutnya peneliti melakukan *robustness check* terhadap hasil penelitian pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan pada BUMN publik dan BUMN non-publik, yang bertujuan untuk mengetahui ketahanan estimasi regresi penelitian ini.

Berdasarkan pada tabel IV.10, persamaan regresi yang menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, remunerasi, ukuran komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit terhadap variabel dependen, yaitu *Return on Asset* (ROA) pada perusahaan BUMN publik di Indonesia periode 2011 – 2015. Persamaan regresi ini adalah sebagai berikut:

ROA = -0.030047 + 0.007944 BODSIZE + 0.098182 BOCISIZE + 0.003850 REM - 0.006574 ACSIZE – 0.123973 ACMEET

Tabel IV.10

Hasil Uji Regresi Data Panel

Fixed Effect Model

Perusahaan BUMN Publik di Indonesia

Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 06/01/17 Time: 15:17
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 18
Total panel (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.030047	0.272173	-0.110397	0.9124
BODSIZE	0.007944	0.009708	0.818380	0.4160
BOCISIZE	0.098182	0.059155	1.659754	0.1016
REM	0.003850	0.012440	0.309448	0.7579
ACSIZE	-0.006574	0.006893	-0.953641	0.3437
ACMEET	-0.123973	0.030273	-4.095157	0.0001

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.803370	Mean dependent var	0.067709
Adjusted R-squared	0.738805	S.D. dependent var	0.068242
S.E. of regression	0.034877	Akaike info criterion	-3.657992
Sum squared resid	0.081499	Schwarz criterion	-3.019151
Log likelihood	187.6096	Hannan-Quinn criter.	-3.400374
F-statistic	12.44279	Durbin-Watson stat	1.523552
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah peneliti menggunakan *eviews 9*

Tabel IV.11

Hasil Uji Regresi Data Panel

Random Effect Model

Perusahaan BUMN Non-Publik di Indonesia

Dependent Variable: ROA
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/01/17 Time: 15:40
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 35
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.054412	0.260705	0.208710	0.8361
BODSIZE	0.003579	0.011979	0.298741	0.7673
BOCISIZE	-0.199219	0.107217	-1.858092	0.0733
REM	-1.01E-05	0.011424	-0.000885	0.9993
ACSIZE	0.003893	0.010339	0.376513	0.7093
ACMEET	0.034478	0.046264	0.745250	0.4621

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.059420	0.7257
Idiosyncratic random	0.036534	0.2743

Weighted Statistics

R-squared	0.135295	Mean dependent var	0.014545
Adjusted R-squared	-0.013792	S.D. dependent var	0.035117
S.E. of regression	0.035358	Sum squared resid	0.036256
F-statistic	0.907493	Durbin-Watson stat	1.464267
Prob(F-statistic)	0.489724		

Unweighted Statistics

R-squared	-0.139596	Mean dependent var	0.054863
Sum squared resid	0.100688	Durbin-Watson stat	0.527250

Sumber : Data diolah peneliti menggunakan *eviews 9*

Berdasarkan pada tabel IV.11, persamaan regresi yang menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, remunerasi, ukuran komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit terhadap variabel dependen, yaitu *Return on Asset* (ROA) pada perusahaan

BUMN non-publik di Indonesia periode 2011 – 2015. Persamaan regresi ini adalah sebagai berikut:

ROA = 0,054412 + 0,003572 BODSIZE - 0.199219 BOCISIZE - 0,000010 REM + 0,003893 ACSIZE + 0,003893 ACMEET

E. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t (parsial) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Uji t digunakan untuk menguji hipotesis pada koefisien regresi secara individual, yaitu H_1, H_2, H_3, H4, H_5.

Penentuan hasil hipotesis apakah variabel independen berpengaruh terhadap dependen akan terlihat dari nilai *probability*. H_0 akan diterima apabila nilai probabilitasnya lebih besar dari α (>0,05). Sedangkan H_a akan diterima apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari α (≤0,05). Lalu untuk mengetahui arah hubungan yang positif atau negatif dapat terlihat dari nilai *coefficient*. Hipotesis uji parsial dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap kinerja perusahaan BUMN

H_a: Terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap kinerja perusahaan BUMN

Hasil uji parsial dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.6. Tabel tersebut menggambarkan pengaruh dan arah pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel IV.12 menunjukkan hasil uji hipotesis t (parsial) yang nantinya akan dijadikan dasar penentuan diterima atau tidaknya hipotesis yang sudah ditentukan. Penentuan hasil keputusan dalam penelitian ini adalah H_0 ditolak apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima.

Tabel IV.12

Rekapitulasi Hasil Uji t (Parsial)

	A			B			C		
	Perusahaan BUMN			Perusahaan BUMN Publik			Perusahaan BUMN Non-Publik		
Variabel	Coefficient	Prob.	Ket.	Coefficient	Prob.	Ket.	Coefficient	Prob.	Ket.
BODSIZE	-0.000124	0.9878	H0 Diterima	0.007944	0.416	H0 Diterima	0.003579	0.7673	H0 Diterima
BOCISIZE	0.002729	0.9602	H0 Diterima	0.098182	0.1016	H0 Diterima	-0.199219	0.0733	H0 Diterima
REM	0.000296	0.9735	H0 Diterima	0.00385	0.7579	H0 Diterima	-1.01E-05	0.9993	H0 Diterima
ACSIZE	0.000601	0.9213	H0 Diterima	-0.006574	0.3437	H0 Diterima	0.003893	0.7093	H0 Diterima
ACMEET	-0.069542	0.0105	H0 Ditolak	-0.123973	0.0001	H0 Ditolak	0.034478	0.4621	H0 Diterima

Sumber : Data diolah peneliti menggunakan *eviews 9*

Berikut penjelasan lebih terperinci mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen perusahaan BUMN periode 2011 - 2015:

1. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan

Tabel IV.12 menunjukkan bahwa nilai koefisien ukuran dewan direksi sebesar -0,00012 dan nilai probabilitas sebesar 0,4871 lebih besar dari 0,05. Artinya, ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan BUMN (ROA). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nopiani dan Sulindawati[115], Al-Matari *et al*[116], Bukhori[117] dan

[115] Nopiani, Kadek Dian dan Luh Gede Erni Sulindawati. 2015. "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Bali". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.3 No.1

[116] Yahya Ali Al-Matari *et al*, *loc. cit*

[117] Bukhori, Iqbal, *loc. cit*

Aurora[118] bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Nopiani dan Sulindawati mengatakan bahwa pada dasarnya dewan direksi memang memiliki kewajiban untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pencapaian kinerja perusahaan memang berkaitan dengan kinerja manajemen itu sendiri, dalam hal ini adalah dewan direksi, artinya baik buruknya kinerja dewan direksi terlihat dari kemampuan serta norma dan etika yang dimilikinya, bukan dari ukuran dewan direksi[119]. Memang sudah seharusnya dewan direksi memiliki norma dan etika yang baik, dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadi seperti hanya memperkaya dirinya sendiri dengan melakukan manajemen laba. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab serta norma dewan direksi diatur dalam bab v dalam Peraturan Menteri BUMN tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN Nomor 01/MBU/2011. Al-Matari *et al* menambahkan, pengalaman dan kemampuan dewan direksi yang memadai akan lebih penting untuk memastikan bahwa dewan direksi bekerja secara efektif untuk meningkatkan kinerja perusahaan[120].

Selanjutnya peneliti melakukan *robustness check* pada perusahaan BUMN publik dan perusahaan BUMN non-publik. Berdasarkan tabel IV.12 kolom B terlihat bahwa ukuran dewan direksi memiliki koefisien regresi sebesar 0,00794 dan probabilitas sebesar 0,416. Kemudian pada tabel IV.12

---

[118] Aurora, Akhsita, *loc. cit*

[119] Nopiani, Kadek Dian dan Luh Gede Erni Sulindawati, *Ibid*

[120] Al-Matari, *loc. cit*

kolom C terlihat bahwa ukuran dewan direksi memiliki koefisien regresi sebesar 0,00358 dan probabilitas sebesar 0,7673. Artinya, ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, baik pada kolom B maupun pada kolom C. Dengan demikian dapat disimpulkan dari ketiga hasil regresi pada table IV.12 bahwa pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil *robust*, yaitu ketiganya tidak signifikan.

2. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Perusahaan

Tabel IV.12 pada kolom A menunjukkan bahwa nilai koefisien ukuran dewan komisaris independen sebesar 0,0027, dengan nilai probabilitas sebesar 0,9602 lebih besar dari 0,05. Artinya, ukuran komisaris independen tidak berpengaruhsignifikan terhadap kinerja perusahaan BUMN (ROA). Hasil regresi ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Martsila dan Meiranto[121], Puspitasari dan Ernawati[122], dan Widagdo[123] bahwa ukuran dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Martsila dan Meiranto[124] serta Puspitasari dan Ernawati[125] menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris independen tidak memberikan kontribusi untuk peningkatan kinerja

---

[121] Martsila dan Meiranto, *loc. cit*
[122] Puspitasari dan Ernawati, *loc. cit*
[123] Widagdo, *loc. cit*
[124] Martsila dan Meiranto, *loc. cit*
[125] Puspitasari dan Ernawati, *loc. cit*

perusahaan. Hal ini dikarenakan ukuran dewan komisaris independen yang tinggi mengindikasikan banyaknya komisaris dari luar perusahaan. Komisaris yang berasal dari luar perusahaan tentu memiliki pengetahuan yang lebih sedikit mengenai masalah dan seluk beluk perusahaan. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, peran dari dewan komisaris independen tidak maksimal. Martsila dan Meiranto[126] juga menambahkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen hanya sekedar formalitas untuk memenuhi regulasi saja.

Widagdo juga menambahkan bahwa terdapat kemungkinan komisaris independen kalah suara pada saat dilakukan pengambilan suara untuk pengambilan keputusan, hal itu menyebabkan terganggunya kualitas fungsi pengawasan dalam perusahaan, sehingga kinerja dewan komisaris independen menjadi tidak efektif[127]. Menurut Oktaviani, hal ini disebabkan karena terdapat kecenderungan bahwa kedudukan direksi dalam suatu perusahaan biasanya sangat kuat, bahkan ada direksi yang enggan membagi wewenang serta tidak memberikan informasi yang memadai kepada dewan komisaris independen[128]. Ditambah lagi lemahnya kemampuan dan integritas dewan komisaris independen untuk mengawasi kenerja manajemen yang juga menghambat kinerja dewan komisaris independen. Padahal integritas dan independensi merupakan prinsip agar pelaksanaan *corporate governance*

---

[126] Martsila dan Meiranto, *loc. cit*

[127] Widagdo, *loc. cit*

[128] Oktaviani, Happy Dwi. 2016. "Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Ukuran Komite Audit terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2009 – 2014". *Jurnal Akuntansi UNESA*, Vol.4, No.2, h.1 – 24

dapat berjalan efektif. Dalam hal ini, dewan komisaris independen tidak benar-benar independen dan tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal karena terbatas oleh kebijakan dari pemegang saham mayoritas yang memiliki kemampuan yang besar dalam mengendalikan perusahaan. Survei dari *Asian Development Bank* pada tahun 2004 menemukan bahwa kuatnya kendali pendiri dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris independen tidak independen dan fungsi pengawasan menjadi tidak efektif karena timbul masalah dalam masalah koordinasi, komunikasi, dan pembuatan keputusan[129].

Selanjutnya peneliti melakukan *robustness check* pada perusahaan BUMN publik dan perusahaan BUMN non-publik. Berdasarkan tabel IV.12 kolom B terlihat bahwa ukuran dewan komisaris independen memiliki koefisien regresi sebesar 0,098182 dan probabilitas sebesar 0,1016. Kemudian pada tabel IV.12 kolom C terlihat bahwa ukuran dewan komisaris independen memiliki koefisien regresi sebesar -0,199219 dan probabilitas sebesar 0,0733. Artinya, ukuran dewan komisaris indepeden tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, baik pada kolom B maupun pada kolom C. Dengan demikian dapat disimpulkan dari ketiga hasil regresi pada table IV.12 bahwa pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil *robust*, yaitu ketiganya tidak signifikan.

---

[129] Suhardjanto, Djoko., Aryane Dewi., Erna Rahmawati., dan Firazonia. 2012. "Pengaruh Corporate Governance dalam Praktik Risk Disclosure pada Perbankan Indonesia". *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol.9,No.1, 16 - 30

3. Pengaruh Remunerasi Terhadap Kinerja Perusahaan

Tabel IV.12 kolom A menunjukkan bahwa nilai koefisien remunerasi sebesar 0,0003, dengan probabilitas sebesar 0,9735 lebih besar dari 0,05. Artinya, remunerasi tidak berengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan BUMN (ROA). Hasil ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Matar dkk[130] dan Mohammed dan Phil[131] yang menyatakan bahwa remunerasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Al-Matar *et al* mengatakan ketika kinerja suatu perusahaan meningkat, belum tentu mengartikan bahwa kinerja dewan direksi dan dewan komisaris juga meningkat yang dikarenakan oleh peningkatan remunerasi[132]. Peningkatan remunerasi diperoleh dari *return* perusahaan. Semakin besar *return* yang diperoleh oleh perusahaan, maka remunerasi yang diterima oleh dewan direksi dan komisaris juga akan semakin besar. Remunerasi diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan oleh dewan direksi dan komisaris. Pemberian remunerasi bertujuan untuk mempertahankan dewan direksi dan dewan komisaris agar tetap bertahan pada perusahaan untuk jangka waktu yang panjang. Semakin besar remunerasi yang diberikan kepada dewan direksi dan dewan komisaris, maka ekspetasi *shareholder* kepada dewan direksi dan dewan komisaris juga akan meningkat. Dewan direksi dan dewan komisaris akan dituntut untuk mampu

---

[130] Al- Matar dkk, *loc. cit*

[131] Muhammed, Y. dan D.Phill. 2013. "The Effect of Return on Asset (ROA) on CEO Compensation System in TSX/S&P and NYS Indexes Companies". *International Journal of Scientific & Engineering Research*, Vol.4, No.2

[132] Al-Matar dkk, *loc. cit*

bekerja semaksimal mungkin. Tuntutan yang semakin besar itu yang tidak bisa menjamin dewan direksi dan dewan komisaris dapat terus meningkatkan kinerja perusahaan. Bahkan bisa saja dewan direksi dan dewan komisaris mampu meningkatkan kinerja perusahaan meskipun tidak ada peningkatan remunerasi. Ada faktor lain yang bisa menjadi alasan para dewan direksi dan dewan komisaris untuk meningkatkan kinerjanya seperti kepuasan kerja, pelatihan dan pengembangan, serta lingkungan dan budaya organisasi sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan[133].

Mohammed dan Phil juga mengatakan bahwa remunerasi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan[134]. Hal ini dikarenakan pemberian remunerasi pada setiap perusahaan memang berbeda-beda, tergantung berdasarkan kompleksitas kinerja dewan komisaris dan dewan direksi serta ukuran perusahaan. Apalagi untuk perusahaan berukuran besar, remunerasi tidak lagi menjadi motivasi untuk dewan komisaris dan dewan direksi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi, besar kecilnya remunerasi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Selanjutnya peneliti melakukan *robustness check* pada perusahaan BUMN publik dan perusahaan BUMN non-publik. Berdasarkan tabel IV.12 kolom B terlihat bahwa remunerasi memiliki koefisien regresi sebesar 0,0039 dan probabilitas sebesar 0,7579. Kemudian pada tabel IV.12 kolom C terlihat bahwa remunerasi memiliki koefisien regresi sebesar -0,000001 dan

---

[133] Suprihati. 2014. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Perusahaan Sari Jati di Sragen". *Jurnal Paradigma,* Vo.12, No.1, 93 - 112

[134] Mohammed dan Phil, *loc, cit*

probabilitas sebesar 0,9993. Artinya, remunerasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, baik pada kolom B maupun pada kolom C. Dengan demikian dapat disimpulkan dari ketiga hasil regresi pada table IV.12 bahwa pengaruh remunerasi terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil *robust*, yaitu ketiganya tidak signifikan.

4. Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan

Tabel IV.12 kolom A menunjukkan bahwa nilai koefisien ukuran komite audit sebesar 0,0006, dengan probabilitas 0,9213 lebih besar dari 0,05. Artinya, ukuran komite audit tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan BUMN (ROA). Hasil ini senada dengan penelitian dari Rimardhani *et al*[135], Makhrus[136], Lestari[137], Yunizar dan Rahardjo[138], dan Widyati[139], yang menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Sesuai dengan hasil penelitian dari Rimardhani *et al* (2016) yang menyatakan bahwa jumlah komite audit tidak mampu menjamin keefektifan kinerja komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan[140]. Pembentukan komite audit hanya atas dasar pemenuhan regulasi yang mensyaratkan bahwa perusahaan diwajibkan untuk membentuk komite audit. Sehingga pada praktiknya peran komite audit kurang optimal

---

[135] Rimardhani, Helfina., R. Rustam Hidayat., Dwiatmanto. 2016. ”Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas Perusahaan Studi pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Tahun 2012 – 2014”. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.31, No.

136 Makhrus, *loc. cit*

[137] Lestari, Yuni Tri. 2015. “Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan: Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Intervening”. *Jurnal dan Ilmu Riset Akuntansi*, Vol.4, No.7

[138] Yunizar dan Raharjo, *loc cit*

[139] Widyati, *loc cit*

[140] Rimardhani, Helfina *et a*l., *loc. cit*

dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian pada manajemen perusahaan. Selain itu, untuk memelihara kualitas laporan keuangan dan membantu dewan komisaris belum sepenuhnya tercapai oleh komite audit. Terutama dalam hal pengawasan proses pelaporan keuangan, komite audit hanya melakukan penelaahan atas informasi keuangan dan akuntansi yang dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi tidak langsung terlibat dalam penyelesaian masalah keuangan perusahaan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Makhrus bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan[141]. Hal ini dikarenakan keberadaan komisaris independen sebagai ketua komite audit tidak mampu menguatkan peran komite audit sebagai pengawas yang independen. Padahal seharusnya komite audit memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memelihara proses kredibilitas penyusunan laporan keuangan. Dengan berjalannya fungsi komite audit yang efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan semakin baik, sehingga konflik keagenan yang dapat mengganggu proses peningkatan kinerja perusahaan dapat diminimalisasi. Akan tetapi, fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab anggota komite audit sebagi wakil dari komisaris independen tidak efektif karena pembentukan komite audit hanya sebagai pemenuhan regulasi saja.

Kemudian, Lestari menambahkan bahwa komite audit merupakan hal baru bagi perusahaan, sehingga sistem pengawasan kinerjanya belum bisa maksimal, akibatnya pembentukan komite audit ini menimbulkan kendala-

[141] Makhrus, *loc. cit*

kendala baru seperti permasalahan komunikasi dengan dewan komisaris, dewan direksi, audit internal, serta pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan komite audit sebagai aspek yang penting dalam keberhasilan kinerja komite audit[142]. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran komite audit tidak akan mempengaruhi kinerja perusahaan.

Selanjutnya peneliti melakukan *robustness check* pada perusahaan BUMN publik dan perusahaan BUMN non-publik. Berdasarkan tabel IV.12 kolom B terlihat bahwa ukuran komite audit memiliki koefisien regresi sebesar -0,0066 dan probabilitas sebesar 0,3437. Kemudian pada tabel IV.12 kolom C terlihat bahwa ukuran komite audit memiliki koefisien regresi sebesar 0,0039 dan probabilitas sebesar 0,7093. Artinya, ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, baik pada kolom B maupun pada kolom C. Dengan demikian dapat disimpulkan dari ketiga hasil regresi pada table IV.12 bahwa pengaruh remunerasi terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil *robust*, yaitu ketiganya tidak signifikan.

5. Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan

Tabel IV.12 kolom A menunjukkan bahwa nilai koefisien frekuensi pertemuan komite audit sebesar -0,0695, yang berarti bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan (ROA). Artinya, semakin besar frekuensi pertemuan komite audit maka akan

[142] Lestari, Yuni Tri, *loc. cit*

menurunkan kinerja perusahaan, begitupun sebaliknya. Dilihat dari nilai probabilitas yang terdapat pada tabel IV.12 menunjukkan nilai 0,0105 lebih kecil dari 0,05. Artinya, frekuensi pertemuan komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil ini senada dengan penelitian dari Yunizar dan Rahardjo[143] dan Al-Matar *et al*[144].

Yunizar dan Rahardjo menyatakan bahwa jumlah frekuensi komite audit yang terlalu banyak dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, hal tersebut membuat pertemuan komite audit tidak efektif dan tidak bisa meningkatkan kinerja perusahaan[145]. Selain itu, menurut Al-Matar *et al*, frekuensi pertemuan komite audit yang terlalu banyak seringkali hanya digunakan untuk menghabiskan waktu bersama, tidak digunakan untuk mengawasi proses pelaporan keuangan, mengidentifikasi resiko manajemen, dan memantau pengendalian internal[146]. Hal tersebut mengakibatkan masalah-masalah yang muncul dalam perusahaan, khususnya masalah dalam proses pelaporan keuangan tidak menemukan penyelesaian. Selain itu, pembentukan komite audit diindikasikan hanya bersifat *mandatory* terhadap peraturan yang ada.mengakibatkan komite audit belum mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

Selanjutnya peneliti melakukan *robustness check* pada perusahaan BUMN publik dan perusahaan BUMN non-publik. Berdasarkan tabel IV.12

---

143 Yunizar dan Rahardjo, *loc. cit*

144 Al-Matar dkk, *loc. cit*

145 Yunizar dan Rahardjo, *loc. cit*

146 Al-Matar dkk, *loc. cit*

kolom B terlihat bahwa frekuensi pertemuan komite audit memiliki koefisien regresi sebesar -0,124 dan probabilitas sebesar 0,0001. Hasil ini sama dengan hasil regresi pada kolom A, yaitu frekuensi pertemuan komite audit memiliki pengaruh negatif signfikan terhadap kinerja perusahaan. Kemudian pada tabel IV.12 kolom C terlihat bahwa ukuran komite audit memiliki koefisien regresi sebesar 0,0345 dan probabilitas sebesar 0,4621. Artinya, frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil pada kolom C ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Bouaziz[147] dan Al-Matari *et al*[148] yang mengatakan bahwa frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Bouaziz mengatakan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena rapat yang dilakukan oleh komite audit dinilai kurang efektif[149]. Hal ini berkaitan dengan keberadaan komite audit yang hanya dijadikan sebagai pemenuhan regulasi saja. Hasil rapat komite audit tidak serta merta langsung mempengaruhi kinerja perusahaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari ketiga hasil regresi pada table IV.12 bahwa pengaruh ukuran komite audit terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil tidak *robust*, karena frekuensi pertemuan komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan BUMN dan

---

[147] Bouaziz, *loc. cit*

[148] Yahya Ali Al-Matari *et al, loc. cit*

[149] Bouaziz, *loc. cit*

BUMN publik, sedangkan frekuensi pertemuan komite audit memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan BUMN non-publik.

F. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen yang bisa dilihat dari besar nilai koefisien determinasi (*adjusted R-Square*). Nilai *adjusted R-square* selalu berada diantara 0 dan 1. Nilai *adjusted R-square* yang kecil menandakan keterbatasan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai *adjusted R-square* yang semakin besar atau semakin mendekati satu menandakan bahwa variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Berdasarkan hasil regresi model perusahaan (BUMN) di Indonesia yang ditampilkan pada tabel IV.9 menunjukkan nilai *adjusted R-square* sebesar 0,66. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia sebesar 66% variabel dependen yaitu *Return on Asset* (ROA) dapat dijelaskan oleh keenam variabel independennya, yaitu ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, remunerasi, ukuran komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit. Sedangkan sisanya sebanyak 34% dijelaskan faktor-faktor lain diluar variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen, yaitu ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, remunerasi, ukuran komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit terhadap variabel dependen, yaitu kinerja perusahaan yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) pada perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2011 – 2015. Berikut adalah kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini:

1. Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan pengalaman dan kemampuan yang memadai lebih berpengaruh terhadap kinerja perusahaan daripada hanya sekedar ukuran. Selanjutnya peneliti melakukan *robustness check* terhadap pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan BUMN (BUMN publik dan non-publik), BUMN publik dan BUMN non-publik, penelitian ini memberikan hasil *robust*.
2. Ukuran dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan keberadaan dewan komisaris independen hanya sekedar formalitas untuk memenuhi regulasi saja, sehingga peran dewan komisaris independen pada perusahaan belum bisa efektif. Selanjutnya peneliti melakukan *robustness check* terhadap pengaruh

ukuran dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan BUMN (BUMN publik dan non-publik), BUMN publik dan BUMN non-publik, penelitian ini memberikan hasil *robust*.

3. Remunerasi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan pa faktor lain yang perlu diperhatikan seperti kepuasan kerja, pengembangan dan pelatihan kerja, serta lingkungan dan budaya organisasi. Setelah peneliti melakukan *robustness checks* terhadap pengaruh remunerasi terhadap kinerja perusahaan BUMN (BUMN publik dan non-publik), BUMN publik dan BUMN non-publik, penelitian ini memberikan hasil *robust*.
4. Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan keberadaan komite audit merupakan hal baru bagi perusahaan, sehingga sistem pengawasan kinerjanya belum bisa maksimal, akibatnya pembentukan komite audit ini menimbulkan kendala-kendala baru seperti permasalahan komunikasi. Setelah peneliti melakukan *robustness check* terhadap pengaruh ukuran komite audit terhadap kinerja perusahaan BUMN (BUMN publik dan non-publik), BUMN publik dan BUMN non-publik, penelitian ini memberikan hasil *robust*.
5. Frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan frekuensi pertemuan komite audit yang terlalu banyak dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan. Setelah peneliti melakukan *robustness checks* terhadap pengaruh ukuran dewan direksi

terhadap kinerja perusahaan BUMN (BUMN publik dan non-publik), BUMN publik dan BUMN non-publik, penelitian ini memberikan hasil tidak *robust*.

B. Implikasi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaannya guna menjaga eksistensi perusahaan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan agen dan prinsipal secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil dari penelitian kali ini, menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit juga memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sehingga diharapkan, perusahaan bisa mengurangi jumlah rapat komite audit agar tidak terlalu banyak, sebaiknya upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan bisa diimplementasikan langsung tanpa perlu terlalu banyak berdiskusi.

C. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, remunerasi, ukuran komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan BUMN periode 2011 – 2015, maka peneliti memiliki beberapa saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Menambahkan pengukuran untuk *corporate governance* yang lebih spesifik agar dapat menunjukkan kinerjanya terhadap efektivitas implementasi *corporate governance* untuk meningkatkan kinerja

perusahaan, seperti frekuensi rapat dewan direksi, frekuensi rapat dewan komisaris, latar belakang dewan komisaris dan dewan direksi, kompetensi dewan direksi dan dewan komisaris, serta budaya perusahaan. Kemudian untuk penelitian selanjutnya yang akan menggunakan sampel perusahaan BUMN disarankan menggunakan variabel privatisasi .

2. Menambahkan variasi proksi pada variabel terikat yaitu berdasarkan perhitungan akuntansi dan perhitungan pasar, supaya bisa diketahui perbedaan dari masing-masing proksi yang digunakan.
3. Menambahkan jumlah observasi agar hasil yang didapat lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Matari, Y.A., Al-Swidi, A.K., Fadzil, F.H., dan Al-Matari, E.M. 2012. "Board of Directors, Audit Committee Characteristics and Performance of Saudi Arabia Listed Companies". *International Review of Management and Marketing*, Vol.2, No.4, h. 241-251.

Al-Matar, E.M., Al-Swidi, A.K., Faudziah, F.H. 2014. "Audit Committee Characteristics and Executive Committee Charactersitics and Firm Performance in Oman: Empirical Study". *Asian Social Science,* Vol.10, No. 12, h.149-171

Aurora, Akhsita. 2012. "Corporate Governance and Firm Performance in Indian Pharmaceutical Sector". *Asian Profile an International Journal*, Vol.40, No.6, h.537 - 550

Boediono, Gideon. 2005. "Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur". *Simposium Nasional Akuntansi* (SNA) VIII Solo.

Bouaziz, Zied. 2012. "The Impact of Presence Audit Committees on The Financial Performance of Tunisian Companies". *IJMBS*, Vol.2, No.4

Bukhori, Iqbal dan Raharja. 2012. "Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan". *Diponegoro Journal of Accounting*, h.1 – 12

Cornett M.M, dkk,. 2006. Earning Management, Corporate Governance, and True Financial Performance''. Retrieved from: https://ssrn.com/abstract=886142

Darmawati, D., Khomsiyah dan Rika G. Rahayu. 2004. "Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol.8, No.1

Dhanis, R. P. S. U. 2012. "Pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010". *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.*

Eisenhardt, K.M. 1989. "Agency Theory: An Assesment and Review". *Academy of Management Review*. Vol. 14. No. 1, h.57-74.

Endrianto, Wendy. 2010. "Analisa Pengaruh Penerapan Basal dan Corporate Governance terhadap Manajemen Risiko pada PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk". *Tesis Universitas Indonesia.*

Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan.* Bandung: Alfabeta.

Fama, Eugene F. Dan Michael C. Jensen. 1983. "Separation of Ownership and Contril". *Journal of Law and Economics*, Vol.26.

Febria, Ririind Lahmi. 2013. "Pengaruh Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas". *Jurnal Akuntansi*, Vol.1, No.3

Ferial, Fery., Suhadak, dan Siti Ragil Handayani. 2016. "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan dan Efeknya terhadap Nilai Peusahaan". *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.33, No.1, h.146 - 153

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gill, Amarjit dan John D. Obradovich. 2012. "The Impact of Corporate Governance and Financial Leverage on the Value of American Firms". *International Research Journal of Finance and Economics*, Vol.91, h.1 – 14

Gujarati, Damodar N., dan Dawn C. Porter. 2013. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 – Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat. Penerjemah: Prayogo P. Harto

Gupta, Pooja dan Aarti Mehta Sharma. 2014. *"A Study of the Impact of Corporate Governance Practices on Firm Performance in Indian and South Korean Companies". Procedia – Social and Behavioral Science*, Vol.133, h.4 – 11

Hastuti, Yenny Widya. 2011. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Secara Internal dan Eksternal terhadap Kinerja Keuangan: Studi Kasus di Bank yang Terdaftar di BEI 2006 – 2009". *Skripsi yang Dipublikasikan*, Universitas Diponegoro

Herwidayatmo. 2000. "Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik Indonesia". *Usahawan*, No.10.

Hinuri, Hindarmojo. 2002. *The Essence of Good Corporate Governance; Konsep dan Implementasi pada Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal dan Sinergy Communication.

Hoque, Mohammad Ziaul, Md. Rabiul Islam, dan Hasnan Ahmed. 2013. "Corporate Governance and Bank Performance: The Case of Bangladesh". *SSRN*, h.1 – 37

Isbanah, Yuyun. 2015. "Pengaruh Esop, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *Journal of Research in Economics and Management*, Vol.15, No.1, h.28 - 41

Jensen, Michael C. dan Wiliam H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, pp. 305 – 360

Jensen, Michael C. dan Wiliam H. Meckling. 1983. “Agency Problems and Residual Claims”. *Journal of Law and Economics,* Vol. 26

Kaihatu, Thomas S. 2006. “Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia”. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.8, No.1. h.1 – 9

Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep – 29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep – 134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan *Good Corporate Goverance* pada BUMN

Keputusan Sekretaris Kementrian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK - 16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Komite Nasional Good Corporate Governance. 2002. *Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif*. Jakarta.

Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.

Kurniawan, Vito Janitra. 2014. “Pengaruh antara Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) dengan Struktur Modal perusahaan. *Skripsi yang dipublikasikan,* Universitas Diponegoro

Laksana, Jaya. 2015. “Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2008 – 2012)”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.11, No.1, h.269 – 288

Lestari, Yuni Tri. 2015. “Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan: Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Intervening”. *Jurnal dan Ilmu Riset Akuntansi*, Vol.4, No.7

Makhrus, Mohammad. 2013. “Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan melalui Manajemen Laba sebagai Variabel Intervening”. *Jurnal Akuntansi dan Akuntansi Islam*, Vol.1, No.1, h.53-77

Martsila, Ika Surya dan Wahyu Meiranto. 2013. “Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.2, No.4

Muhammed, Y. dan D.Phill. 2013. “The Effect of Return on Asset (ROA) on CEO Compensation System in TSX/S&P and NYS Indexes Companies”. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, Vol.4, No.2

Muller, Victor Octavian. 2014. “Do Corporate Board Compensation Characteristics Influence the Financial Performance of Listed Companies?”. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 109, h.983 – 988

Muskibah. 2010. “Tanggung Jawab Direksi dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vo.2, No.3

Nachrowi, Djalal Nachrowi dan Hardius Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuanga.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universita Indonesia.

Nopiani, Kadek Dian dan Luh Gede Erni Sulindawati. 2015. “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Bali”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.3 No.1

Nugroho, Mufid Pinto. 2013. “Analisis Pengaruh Corporate Governance terhadap Struktur Modal Perusahaan”. *Skripsi yang dipublikasikan*, Universitas Diponegoro

Oktaviani, Happy Dwi. 2016. “Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Ukuran Komite Audit terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2009 – 2014”. *Jurnal Akuntansi UNESA*, Vol.4, No.2, h.1 – 24

Pamudji, Sugeng dan Aprillya Trihartati. 2010. “Pengaruh Independensi dan Efektivitas Komite Audit terhadap Manajemen Laba”. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.2, No.1, h.21 – 29

Pandya, H. 2011. “Corporate Governance Structure and Financial Performance of Sleceted Indian Banks”. *Journal of Management&Public Policy* 2, 2, 4 – 21

Parimana, Komang Agung Surya. 2015. “Pengaruh Privatisais, Kompensasi Manajemen Eksekutif, dan Ukuran Perusahaan pada Kinerja Keuangan”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.10, No.3, h.753 - 762

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Purwani, Tri. 2010. “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan”. *Majalah Ilmiah Informatika*, Vol.1, No.2,

Puspitasari, Filia dan Endang Ernawati. 2010. “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha”. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, Vol.3, No.2, h.189 – 215

Prasinta, Dian. 2012. “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan”. *Accounting Analysis Journal*, Vol.1, No.2, h.1 – 7

Rahadian, Andhika. 2014. “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Struktur Modal Perusahaan Studi Empiris pada Perusahaan anufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2010 – 2012”. *Skripsi, Universitas Diponegoro.*

Raithatha, Mehul dan Surenderrao Komera. 2016. “Excecutive Compensation and Firm Performance: Evidence from Indian Firms”. *IIMB Management Review*, 28, h.160 – 169

Rimardhani, Helfina., R. Rustam Hidayat., Dwiatmanto. 2016. ”Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas Perusahaan Studi pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Tahun 2012 – 2014”. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.31, No. 1

Rostami, Shoeyb., Zeynab Rostami, dan Samin Kohansal. 2016. “The Effect of Corporate Governance Components on Return on Assets and Stock Return of Companies Listed in Tehran Stock Exchange”. *Procedia Economics and Finance*, 36, h.137 - 146

Sam’ani. 2008. “Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa fek Indonesia (BEI) Tahun 2004 – 2007”. *Thesis*, Universitas Diponegoro

Sinaga, Nobert Stevan. 2014. “Analisis Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan dan Growth Opportunity Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 – 2013. *Skripsi yang dipublikasikan*, Universitas Diponegoro

Sofian, Siregar. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Suhardjanto, Djoko., Aryane Dewi., Erna Rahmawati., dan Firazonia. 2012. “Pengaruh Corporate Governance dalam Praktik Risk Disclosure pada Perbankan Indonesia”. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol.9, No.1, 16 - 30

Suprihati. 2014. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Perusahaan Sari Jati di Sragen”. *Jurnal Paradigma*, Vo.12, No.1, 93 - 112

Sutrisno. 2013. *Manajemen Keuangan*; *Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

Tertius, Melia Agustina dan Yulius Jogi Christiawan. 2015. "Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Persahaan pada Sektor Keuangan". *Business Accounting Review*, Vol.3, No.1, h.223 – 232

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Verhezen, Peter., Erry Riyana H., dan Pri Notowidigdo. 2012. *Is Coroprate Governance Relevant? How Good Corporate Governance Practices Affect Indonesian Organization*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Widagdo, Dominikus Octavianto Kresno dan Anis Chairi. 2014. "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.3, No.3, h.1 – 9

Widaryono, Agus. 2011. Ekonometrika: *Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia FE Universitas Islam.

Widyastuti, Umi. 2015. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ.

Widyati, Maria Fransisca. 2013. "Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol.1, No.1, h.234 – 249

Wulandari, Etty Retno. 2013. *Good Corporate Governance Konsep, Prinsip, dan Praktik*. Jakarta: Lembaga Komisaris Direksi Indonesia (LKDI).

Wulandari, Ndaruningpuri. 2006. "Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia". *Fokus Ekonomi*, Vol.1, No.2, h.120 - 136

www.bumn.go.id/ halaman/situs

Yunizar, Rendy Irawan dan Shiddiq Nur Rahardjo. 2014. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.3, No.4, h.1 – 10

Lampiran 1

Sampel Perusahaan BUMN

No	Perusahaan	Tahun	BODSIZE	BOCISIZE	REM	ACSIZE	ACMEET	ROA
1.	PT. Adhi Karya Tbk	2011	5	0,4	22,98	3	0,37	0,030
	PT. Adhi Karya Tbk	2012	5	0,3	22,85	3	0,28	0,027
	PT. Adhi Karya Tbk	2013	5	0,3	23,09	3	0,30	0,042
	PT. Adhi Karya Tbk	2014	6	0,3	23,57	2	0,25	0,032
	PT. Adhi Karya Tbk	2015	6	0,3	23,44	3	0,24	0,028
2.	PT. Aneka Tambang Tbk	2011	6	0,7	23,54	4	0,34	0,127
	PT. Aneka Tambang Tbk	2012	6	0,3	24,00	4	0,21	0,152
	PT. Aneka Tambang Tbk	2013	6	0,3	23,28	4	0,35	0,019
	PT. Aneka Tambang Tbk	2014	6	0,3	23,46	4	0,52	-0,035
	PT. Aneka Tambang Tbk	2015	6	0,5	23,24	4	0,85	-0,048
3.	PT. Angkasa Pura I	2011	5	0,2	20,62	3	0,32	0,054
	PT. Angkasa Pura I	2012	6	0,2	23,48	3	0,12	0,055
	PT. Angkasa Pura I	2013	6	0,2	23,65	3	0,16	0,050
	PT. Angkasa Pura I	2014	6	0,2	23,92	3	0,23	0,061
	PT. Angkasa Pura I	2015	6	0,2	23,81	3	0,34	0,043
4.	PT. Angkasa Pura II	2011	5	0,2	22,45	4	1,00	0,100
	PT. Angkasa Pura II	2012	7	0,3	23,10	4	0,26	0,113

	PT. Angkasa Pura II	2013	7	0,3	22,84	4	0,95	0,077
	PT. Angkasa Pura II	2014	7	0,3	23,27	4	0,84	0,072
	PT. Angkasa Pura II	2015	6	0,3	23,16	4	1,00	0,083
5.	PT. Mandiri Tbk	2011	10	0,6	25,25	5	0,79	0,023
	PT. Mandiri Tbk	2012	11	0,6	25,87	6	0,81	0,025
	PT. Mandiri Tbk	2013	11	0,6	25,93	6	1,00	0,026
	PT. Mandiri Tbk	2014	11	0,6	24,70	6	0,68	0,024
	PT. Mandiri Tbk	2015	11	0,5	24,30	5	0,56	0,023
6.	PT. Bank Negara Indonesia Tbk	2011	10	0,6	25,38	4	0,97	0,020
	PT. Bank Negara Indonesia Tbk	2012	10	0,6	25,65	4	0,65	0,021
	PT. Bank Negara Indonesia Tbk	2013	10	0,6	26,27	4	0,81	0,023
	PT. Bank Negara Indonesia Tbk	2014	10	0,5	26,14	4	0,84	0,026
	PT. Bank Negara Indonesia Tbk	2015	9	0,5	25,86	4	0,83	0,018
7.	PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk	2011	11	0,6	25,31	6	0,42	0,032
	PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk	2012	11	0,5	25,71	8	0,19	0,034
	PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk	2013	11	0,5	25,91	8	0,33	0,034
	PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk	2014	11	0,7	26,39	8	0,36	0,030
	PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk	2015	11	0,6	26,49	6	0,44	0,029

8.	PT. Bank Tabungan Negara Tbk	2011	6	0,5	24,68	6	0,34	0,013
	PT. Bank Tabungan Negara Tbk	2012	7	0,5	24,91	4	0,28	0,012
	PT. Bank Tabungan Negara Tbk	2013	7	0,5	24,68	5	0,30	0,012
	PT. Bank Tabungan Negara Tbk	2014	6	0,5	24,44	5	0,45	0,008
	PT. Bank Tabungan Negara Tbk	2015	6	0,4	24,17	4	0,27	0,011
9.	PT. Garuda Indonesia Tbk	2011	6	0,4	23,73	4	0,29	0,045
	PT. Garuda Indonesia Tbk	2012	8	0,3	24,46	3	0,19	0,04
	PT. Garuda Indonesia Tbk	2013	8	0,4	24,25	4	0,14	0,004
	PT. Garuda Indonesia Tbk	2014	6	0,3	23,62	4	0,32	-0,11
	PT. Garuda Indonesia Tbk	2015	7	0,3	23,99	3	0,32	0,02
10.	PT. Indofarma Tbk	2011	5	0,4	22,36	5	0,39	0,033
	PT. Indofarma Tbk	2012	5	0,5	22,45	5	0,30	0,036
	PT. Indofarma Tbk	2013	4	0,5	22,50	4	0,47	-0,042
	PT. Indofarma Tbk	2014	4	0,3	22,18	3	0,36	0,001
	PT. Indofarma Tbk	2015	4	0,3	22,30	3	0,44	0,004
11.	PT. Jasa Marga Tbk	2011	5	0,3	24,28	3	0,32	0,062
	PT. Jasa Marga Tbk	2012	5	0,3	24,28	3	0,23	0,062
	PT. Jasa Marga Tbk	2013	5	0,3	23,76	3	0,53	0,044

	PT. Jasa Marga Tbk	2014	5	0,3	24,02	3	0,39	0,038
	PT. Jasa Marga Tbk	2015	6	0,3	24,08	3	0,29	0,039
12.	PT. Kimia Farma Tbk	2011	5	0,4	19,79	4	0,29	0,096
	PT. Kimia Farma Tbk	2012	5	0,4	19,79	3	0,23	0,097
	PT. Kimia Farma Tbk	2013	5	0,4	19,93	3	0,28	0,087
	PT. Kimia Farma Tbk	2014	5	0,4	20,00	3	0,27	0,080
	PT. Kimia Farma Tbk	2015	5	0,4	20,23	3	0,29	0,078
13.	PT. Perkebunan Nusantara III	2011	5	0,2	23,70	4	0,32	0,139
	PT. Perkebunan Nusantara III	2012	6	0,2	23,63	4	0,21	0,075
	PT. Perkebunan Nusantara III	2013	5	0,2	23,22	3	0,33	0,020
	PT. Perkebunan Nusantara III	2014	5	0,2	23,21	3	0,27	0,007
	PT. Perkebunan Nusantara III	2015	6	0,4	23,75	3	0,29	-0,006
14.	PT. Pertamina	2011	8	0,3	25,33	4	0,42	0,066
	PT. Pertamina	2012	9	0,5	25,33	4	0,28	0,068
	PT. Pertamina	2013	9	0,3	25,33	4	0,37	0,062
	PT. Pertamina	2014	9	0,5	25,33	5	0,39	0,030
	PT. Pertamina	2015	9	0,5	25,33	5	0,39	0,025

15.	PT. Pembangunan Perumahan	2011	5	0,3	22,32	3	0,63	0,107
	PT. Pembangunan Perumahan Tbk	2012	5	0,4	22,38	3	0,63	0,036
	PT. Pembangunan PerumahanTbk	2013	5	0,4	22,60	3	0,70	0,034
	PT. Pembangunan Perumahan Tbk	2014	6	0,4	23,80	3	0,86	0,036
	PT. Pembangunan Perumahan Tbk	2015	6	0,3	23,86	3	0,76	0,044
16.	PT. Perusahaan Gas Negara Tbk	2011	6	0,4	24,79	5	0,58	0,199
	PT. Perusahaan Gas Negara Tbk	2012	6	0,3	24,86	5	1,00	0,234
	PT. Perusahaan Gas Negara Tbk	2013	6	0,3	24,81	5	0,84	0,205
	PT. Perusahaan Gas Negara Tbk	2014	6	0,3	24,73	5	1,00	0,120
	PT. Perusahaan Gas Negara Tbk	2015	6	0,3	25,24	5	0,93	0,062
17.	PT. Perusahaan Listrik Negara	2011	10	0,3	23,56	8	0,42	0,012
	PT. PLN	2012	10	0,3	24,01	4	0,33	0,006
	PT. PLN	2013	9	0,2	24,35	6	0,40	0,006
	PT. PLN	2014	9	0,2	24,46	6	0,39	0,026
	PT. PLN	2015	8	0,2	24,23	6	0,41	0,013

18.	PT. Pupuk Indonesia HC	2011	6	0,1	23,47	3	0,29	0,200
	PT. Pupuk Indonesia HC	2012	6	0,2	22,82	3	0,19	0,099
	PT. Pupuk Indonesia HC	2013	6	0,3	24,07	3	0,37	0,054
	PT. Pupuk Indonesia HC	2014	6	0,3	24,52	3	0,27	0,067
	PT. Pupuk Indonesia HC	2015	6	0,3	23,77	3	0,71	0,201
19.	PT. Semen Indonesia Tbk	2011	7	0,3	24,65	4	0,34	0,201
	PT. Semen Indonesia Tbk	2012	7	0,5	24,17	3	0,77	0,185
	PT. Semen Indonesia Tbk	2013	7	0,3	24,63	4	0,51	0,174
	PT. Semen Indonesia Tbk	2014	7	0,4	24,82	5	0,84	0,162
	PT. Semen Indonesia Tbk	2015	7	0,3	24,89	4	0,59	0,119
20.	PT. Tambang Batu Bara Tbk	2011	6	0,3	24,32	3	0,39	0,250
	PT. Tambang Batu Bara Tbk	2012	6	0,3	24,62	3	0,28	0,228
	PT. Tambang Batu Bara Tbk	2013	6	0,3	24,30	4	0,37	0,156
	PT. Tambang Batu Bara Tbk	2014	6	0,3	24,48	4	0,32	0,136
	PT. Tambang Batu Bara Tbk	2015	6	0,3	24,55	4	0,37	0,121

21.	PT. Taspen	2011	5	0,2	23,45	4	0,39	0,006
	PT. Taspen	2012	5	0,2	23,37	3	0,47	0,003
	PT. Taspen	2013	6	0,2	23,41	3	0,19	0,010
	PT. Taspen	2014	6	0,2	23,67	3	0,27	0,021
	PT. Taspen	2015	6	0,2	23,63	3	0,34	0,003
22.	PT. Telkom Tbk	2011	8	0,4	25,37	6	0,79	0,150
	PT. Telkom Tbk	2012	8	0,4	25,54	6	0,53	0,165
	PT. Telkom Tbk	2013	8	0,3	25,08	5	0,70	0,159
	PT. Telkom Tbk	2014	8	0,3	25,12	5	0,68	0,152
	PT. Telkom Tbk	2015	8	0,4	24,86	4	0,83	0,140
23.	PT. Timah	2011	5	0,5	24,26	4	0,61	0,137
	PT. Timah	2012	6	0,5	23,91	4	0,39	0,161
	PT. Timah	2013	6	0,5	23,51	4	0,79	0,137
	PT. Timah	2014	6	0,3	23,81	3	1,00	0,071
	PT. Timah	2015	6	0,5	24,03	4	0,83	0,065
24.	PT. Waskita Karya Tbk	2011	5	0,2	22,46	3	0,11	0,034
	PT. Waskita Karya Tbk	2012	5	0,3	23,18	3	0,11	0,030
	PT. Waskita Karya Tbk	2013	6	0,3	23,36	4	0,47	0,042
	PT. Waskita Karya Tbk	2014	6	0,3	23,35	4	0,50	0,040
	PT. Waskita Karya Tbk	2015	6	0,7	23,39	4	0,46	0,035

25.	PT. Wijaya Karya Tbk	2011	5	0,4	23,11	3	0,34	0,048
	PT. Wijaya Karya Tbk	2012	6	0,3	23,42	5	0,09	0,046
	PT. Wijaya Karya Tbk	2013	7	0,3	23,51	5	0,37	0,050
	PT. Wijaya Karya Tbk	2014	6	0,3	23,58	5	0,27	0,047
	PT. Wijaya Karya Tbk	2015	7	0,4	24,08	6	0,39	0,036

Lampiran 2

Hasil Uji Statistik Deskriptif Perusahaan BUMN

	BODSIZE	BOCISIZE	REM	ACSIZE	ACMEET
Mean	6.728000	0.371219	23.90787	4.088000	0.466160
Median	6.000000	0.333333	23.92438	4.000000	0.390000
Maximum	11.00000	0.714286	26.49054	8.000000	1.000000
Minimum	4.000000	0.142857	19.79300	2.000000	0.090000
Std. Dev.	1.846426	0.122565	1.303183	1.204936	0.244157
Skewness	1.059205	0.325835	-0.901054	1.246827	0.796260
Kurtosis	3.105151	2.813914	4.794555	4.604086	2.487781
Jarque-Bera	23.43083	2.392193	33.68760	45.78854	14.57547
Probability	0.000008	0.302372	0.000000	0.000000	0.000684
Sum	841.0000	46.40238	2988.484	511.0000	58.27000
Sum Sq. Dev.	422.7520	1.862754	210.5875	180.0320	7.391957
Observations	125	125	125	125	125

Lampiran 3

Hasil Uji Multikolinearitas Perusahaan BUMN

	BODSIZE	BOCISIZE	REM	ACSIZE	ACMEET
BODSIZE	1.000000	0.473539	0.698602	0.670556	0.230095
BOCISIZE	0.473539	1.000000	0.353872	0.424239	0.296721
REM	0.698602	0.353872	1.000000	0.501270	0.288715
ACSIZE	0.670556	0.424239	0.501270	1.000000	0.179658
ACMEET	0.230095	0.296721	0.288715	0.179658	1.000000
LEV	0.304252	0.288732	0.274319	0.223267	-0.056546

Lampiran 4

Hasil Uji Chow Perusahaan BUMN

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FIXEDEFFECT
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.486560	(24,95)	0.0000
Cross-section Chi-square	152.847035	24	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 06/04/17 Time: 21:46
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 25
Total panel (balanced) observations: 125

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.168997	0.125110	-1.350791	0.1793
BODSIZE	-0.011563	0.005012	-2.306958	0.0228
BOCISIZE	-0.060785	0.053118	-1.144335	0.2548
REM	0.012235	0.006038	2.026307	0.0450
ACSIZE	0.003221	0.006274	0.513460	0.6086
ACMEET	0.059626	0.024222	2.461701	0.0153

R-squared	0.111930	Mean dependent var	0.064112
Adjusted R-squared	0.074616	S.D. dependent var	0.063942
S.E. of regression	0.061511	Akaike info criterion	-2.692406
Sum squared resid	0.450242	Schwarz criterion	-2.556647
Log likelihood	174.2754	Hannan-Quinn criter.	-2.637255
F-statistic	2.999692	Durbin-Watson stat	0.471369
Prob(F-statistic)	0.013805		

Lampiran 5

Hasil Uji Chow Perusahaan BUMN Publik

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FIXEDEFFECT
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	13.247714	(17,67)	0.0000
Cross-section Chi-square	132.550561	17	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 06/04/17 Time: 21:50
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 18
Total panel (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.112132	0.155491	-0.721144	0.4728
BODSIZE	-0.008732	0.006310	-1.383861	0.1701
BOCISIZE	-0.180593	0.086873	-2.078822	0.0407
REM	0.010568	0.007485	1.411864	0.1617
ACSIZE	0.007609	0.007875	0.966244	0.3367
ACMEET	0.057156	0.030904	1.849438	0.0679

R-squared	0.142425	Mean dependent var	0.067709
Adjusted R-squared	0.091379	S.D. dependent var	0.068242
S.E. of regression	0.065050	Akaike info criterion	-2.562985
Sum squared resid	0.355445	Schwarz criterion	-2.396331
Log likelihood	121.3343	Hannan-Quinn criter.	-2.495781
F-statistic	2.790129	Durbin-Watson stat	0.442055
Prob(F-statistic)	0.022170		

Lampiran 6

Hasil Uji Chow Perusahaan BUMN Non-Publik

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FIXEDEFFECT
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.637600	(6,23)	0.0010
Cross-section Chi-square	31.657245	6	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 06/04/17 Time: 21:53
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.046301	0.295207	0.156841	0.8765
BODSIZE	-0.001647	0.011187	-0.147247	0.8840
BOCISIZE	0.003904	0.119158	0.032765	0.9741
REM	0.001551	0.013540	0.114565	0.9096
ACSIZE	-0.011570	0.012182	-0.949777	0.3501
ACMEET	0.066411	0.045649	1.454817	0.1565

R-squared	0.141570	Mean dependent var	0.054863
Adjusted R-squared	-0.006435	S.D. dependent var	0.050977
S.E. of regression	0.051141	Akaike info criterion	-2.953664
Sum squared resid	0.075846	Schwarz criterion	-2.687033
Log likelihood	57.68912	Hannan-Quinn criter.	-2.861623
F-statistic	0.956524	Durbin-Watson stat	0.797353
Prob(F-statistic)	0.460257		

Lampiran 7

Hasil Uji Hausman Perusahaan BUMN

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: RANDOMEFFECT
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.816884	5	0.0374

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
BODSIZE	-0.000124	-0.004097	0.000031	0.4759
BOCISIZE	0.002729	-0.013186	0.000489	0.4715
REM	0.000296	0.006191	0.000027	0.2567
ACSIZE	0.000601	0.000483	0.000006	0.9605
ACMEET	-0.069542	-0.034766	0.000147	0.0041

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 06/04/17 Time: 21:47
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 25
Total panel (balanced) observations: 125

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.086820	0.197679	0.439196	0.6615
BODSIZE	-0.000124	0.008091	-0.015270	0.9878
BOCISIZE	0.002729	0.054567	0.050010	0.9602
REM	0.000296	0.008866	0.033369	0.9735
ACSIZE	0.000601	0.006060	0.099108	0.9213
ACMEET	-0.069542	0.026634	-2.610995	0.0105

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.738542	Mean dependent var	0.064112
Adjusted R-squared	0.658728	S.D. dependent var	0.063942
S.E. of regression	0.037354	Akaike info criterion	-3.531183
Sum squared resid	0.132557	Schwarz criterion	-2.852387
Log likelihood	250.6989	Hannan-Quinn criter.	-3.255424
F-statistic	9.253341	Durbin-Watson stat	1.353311
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 8

Hasil Uji Hausman Perusahaan BUMN Publik

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: RANDOMEFFECT
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	20.291716	5	0.0011

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
BODSIZE	0.007944	-0.002526	0.000047	0.1263
BOCISIZE	0.098182	0.041919	0.000255	0.0004
REM	0.003850	0.012212	0.000073	0.3272
ACSIZE	-0.006574	-0.004937	0.000006	0.5185
ACMEET	-0.123973	-0.078335	0.000164	0.0004

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 06/04/17 Time: 21:51
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 18
Total panel (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.030047	0.272173	-0.110397	0.9124
BODSIZE	0.007944	0.009708	0.818380	0.4160
BOCISIZE	0.098182	0.059155	1.659754	0.1016
REM	0.003850	0.012440	0.309448	0.7579
ACSIZE	-0.006574	0.006893	-0.953641	0.3437
ACMEET	-0.123973	0.030273	-4.095157	0.0001

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.803370	Mean dependent var	0.067709
Adjusted R-squared	0.738805	S.D. dependent var	0.068242
S.E. of regression	0.034877	Akaike info criterion	-3.657992
Sum squared resid	0.081499	Schwarz criterion	-3.019151
Log likelihood	187.6096	Hannan-Quinn criter.	-3.400374
F-statistic	12.44279	Durbin-Watson stat	1.523552
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 9

Hasil Uji Hausman Perusahaan BUMN Non-Publik

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: RANDOMEFFECT
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.163554	5	0.6748

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
BODSIZE	0.010406	0.003579	0.000072	0.4199
BOCISIZE	-0.252484	-0.199219	0.001170	0.1195
REM	-0.000740	-0.000010	0.000007	0.7867
ACSIZE	0.008687	0.003893	0.000014	0.2051
ACMEET	0.036450	0.034478	0.000408	0.9223

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 06/04/17 Time: 21:56
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.020381	0.277058	0.073564	0.9420
BODSIZE	0.010406	0.014668	0.709425	0.4852
BOCISIZE	-0.252484	0.112543	-2.243437	0.0348
REM	-0.000740	0.011737	-0.063026	0.9503
ACSIZE	0.008687	0.011009	0.789057	0.4381
ACMEET	0.036450	0.050481	0.722041	0.4775

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.652553	Mean dependent var	0.054863
Adjusted R-squared	0.486383	S.D. dependent var	0.050977
S.E. of regression	0.036534	Akaike info criterion	-3.515300
Sum squared resid	0.030698	Schwarz criterion	-2.982038
Log likelihood	73.51775	Hannan-Quinn criter.	-3.331218
F-statistic	3.927015	Durbin-Watson stat	1.792544
Prob(F-statistic)	0.002742		

Lampiran 10

Hasil Uji Regresi Data Panel Perusahaan BUMN (Publik dan Non-Publik)

Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 06/01/17 Time: 15:01
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 25
Total panel (balanced) observations: 125

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.086820	0.197679	0.439196	0.6615
BODSIZE	-0.000124	0.008091	-0.015270	0.9878
BOCISIZE	0.002729	0.054567	0.050010	0.9602
REM	0.000296	0.008866	0.033369	0.9735
ACSIZE	0.000601	0.006060	0.099108	0.9213
ACMEET	-0.069542	0.026634	-2.610995	0.0105

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.738542	Mean dependent var	0.064112
Adjusted R-squared	0.658728	S.D. dependent var	0.063942
S.E. of regression	0.037354	Akaike info criterion	-3.531183
Sum squared resid	0.132557	Schwarz criterion	-2.852387
Log likelihood	250.6989	Hannan-Quinn criter.	-3.255424
F-statistic	9.253341	Durbin-Watson stat	1.353311
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 11

Hasil Uji Regresi Data Panel Perusahaan BUMN Publik

Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 06/01/17 Time: 15:17
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 18
Total panel (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.030047	0.272173	-0.110397	0.9124
BODSIZE	0.007944	0.009708	0.818380	0.4160
BOCISIZE	0.098182	0.059155	1.659754	0.1016
REM	0.003850	0.012440	0.309448	0.7579
ACSIZE	-0.006574	0.006893	-0.953641	0.3437
ACMEET	-0.123973	0.030273	-4.095157	0.0001

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.803370	Mean dependent var	0.067709
Adjusted R-squared	0.738805	S.D. dependent var	0.068242
S.E. of regression	0.034877	Akaike info criterion	-3.657992
Sum squared resid	0.081499	Schwarz criterion	-3.019151
Log likelihood	187.6096	Hannan-Quinn criter.	-3.400374
F-statistic	12.44279	Durbin-Watson stat	1.523552
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 12

Hasil Uji Regresi Data Panel Perusahaan BUMN Non-Publik

Dependent Variable: ROA
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/01/17 Time: 15:40
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 35
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.054412	0.260705	0.208710	0.8361
BODSIZE	0.003579	0.011979	0.298741	0.7673
BOCISIZE	-0.199219	0.107217	-1.858092	0.0733
REM	-1.01E-05	0.011424	-0.000885	0.9993
ACSIZE	0.003893	0.010339	0.376513	0.7093
ACMEET	0.034478	0.046264	0.745250	0.4621

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.059420	0.7257
Idiosyncratic random	0.036534	0.2743

Weighted Statistics

R-squared	0.135295	Mean dependent var	0.014545
Adjusted R-squared	-0.013792	S.D. dependent var	0.035117
S.E. of regression	0.035358	Sum squared resid	0.036256
F-statistic	0.907493	Durbin-Watson stat	1.464267
Prob(F-statistic)	0.489724		

Unweighted Statistics

R-squared	-0.139596	Mean dependent var	0.054863
Sum squared resid	0.100688	Durbin-Watson stat	0.527250

RIWAYAT HIDUP

Finni Amalia merupakan anak pertama dari tiga saudara yang lahir di Bekasi, pada tanggal 21 Mei 1995. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SDIT Gema Nurani, Bekasi pada tahun 2007 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri 5 Bekasi. Selama menempuh pendidikan selama tiga tahun, pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 4 Bekasi dan lulus pada tahun 2013.

Pada tahun 2013, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada Program Studi S1 Manajemen melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti beberapa organisasi, diantaranya Himpunan Mahasiswa Manajemen (HMM) pada tahun 2014-2016. Pada tahun 2014 penulis menjadi anggota HMM dan ditempatkan sebagai staff Biro Administrasi dan setahun kemudian menempati posisi sebagai *Chief Financial Officer* (CFO). Selain itu pada tahun 2015-2016 penulis mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia dan menjadi anggota Generasi Baru Indonesia.

Pada tahun 2015 penulis pernah mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Bakrie Autoparts selama tiga bulan. Di sana penulis ditempatkan pada divisi *Finance and Accounting*.